



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

LAPORAN KINERJA

**DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR**



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air pada tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan dalam capaian kinerjanya. Target yang telah di sepakati dalam Perjanjian Kinerja dengan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dapat tercapai dengan Memuaskan. Hal tersebut bisa terjadi berkat pertolongan Allah SWT, Kerja keras dan kekompakan tim Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya serta dukungan rekan-rekan baik internal maupun eksternal Kementerian PUPR (para stakeholder).



Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pekerjaan Umum serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disebutkan bahwa salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan public dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi ataupun Kementerian Lembaga yang akuntabel.

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air atas penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran (DIPA). Untuk itu, di dalam Laporan Kinerja ini akan diuraikan mengenai histori dari awal perencanaan hingga pencapaian akhir kinerja selama tahun anggaran 2022.

Demikian laporan kinerja ini disusun. Semoga laporan kinerja ini dapat memberikan gambaran tentang akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air selama tahun

anggaran 2022 dan menjadi umpan balik guna meningkatkan kinerja di tahun-tahun berikutnya.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air



ARVI ARGYANTORO, MA

Ringkasan Eksekutif

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air memiliki tugas yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air. Dan juga memiliki Fungsi Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air :

- a) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- b) Penyusunan dan evaluasi standar pelayanan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- c) Pelaksanaan analisis dan asesmen pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- d) Penyusunan rekomendasi Kerjasama prakarsa badan usaha;
- e) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- f) Pengusahaan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah bagi pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- g) Penyiapan pelaksanaan program penggabungan infrastruktur;
- h) Pengelolaan tenaga ahli dan pejabat fungsional pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- i) Pengembangan perjanjian kerjasama pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- j) Penyusunan rekomendasi penetapan pemenang dan penunjukan badan usaha pelaksana;
- k) Pemantauan dan evaluasi target pemenuhan standar layanan pada pelaksanaan kerjasama pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- l) Pemantauan pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan kerjasama pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- m) Pelaksanaan penyelesaian permasalahan dan sengketa pelaksanaan kerjasama pembiayaan infrastruktur sumber daya air; dan
- n) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Sumber Daya

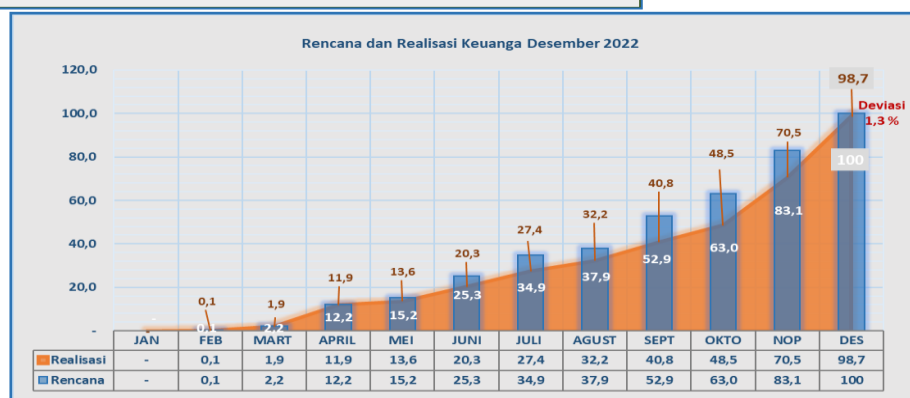
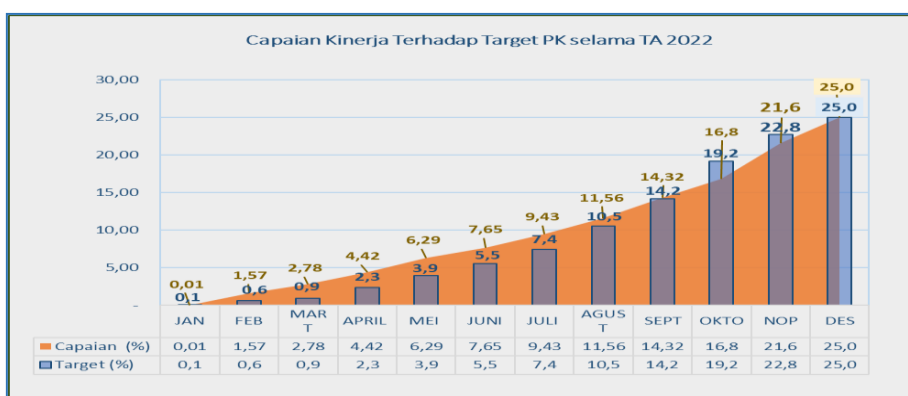
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air selama tahun anggaran 2022 memiliki beberapa sumber daya dalam mendukung kinerjanya, yaitu:

1. Pagu anggaran sebesar Rp 11.250.000.000,00 (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah) sesuai DIPA NOMOR: SP DIPA- 033.16.1.631003/2022 tanggal 17 November 2020. Mengalami 4x revisi DIPA dengan pagu diakhir tahun sebesar Rp Rp 9.494.539.000,00 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
2. Sumber daya manusia, jumlah pegawai Direktorat PPISDA sebanyak 44 orang terdiri dari 26 orang PNS, 8 Non PNS/Tenaga

Penunjang, 10 Tenaga Pendukung Individual. 3. Sarana dan Prasarana, terletak di Gedung ex Kemenpera, lantai 3 wing 4 dan sarana pendukung lainnya.

Capaian Kinerja

Capaian kinerja Direktorat atas target yang ada di Perjanjian Kinerja sebesar 25 %, dengan output sebanyak 18 terdiri atas 7 rekomendasi kebijakan, 1 dokumen, 5 kesepakatan, dan 5 laporan. Sedangkan capaian realisasi anggaran berdasarkan e-monitoring PUPR sebesar Rp 9.368.348.000,00 atau sekitar 98,67% capaian keuangannya dan 99,03 % untuk capaian fisiknya.



Progress Proyek KPBU

Selama tahun anggaran 2022 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air melakukan beberapa proyek KPBU, berikut progress proyek-proyek tersebut:

No.	Proyek	Tahapan KPBU	Progres TA 2022
Solicited			
1.	Bendungan Merangin, Jambi	Penyiapan	Kick Off Penyusunan Dokumen <i>Final Business Case</i> (24 Maret 2022)
2.	Bendungan Bodri, Jawa Tengah	Penyiapan	1. Penyusunan Dokumen AMDAL (Januari-November 2022)

			2. Konfirmasi Pendahuluan AP dari Kementerian Keuangan (29 November 2022)
3.	DI Colo, Jawa Tengah	Penyiapan	1. Penyusunan Dokumen Studi Pendahuluan- <i>Outline Business Case</i> (Agustus-Desember 2022) 2. Konsultasi Publik (6 Desember 2022)
Unsolicited			
4.	Pemeliharaan Bendungan Bintang Bano dan Penyediaan Infrastruktur PLTM Bintang Bano Kapasitas 6,3 MW, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat	Transaksi	1. <i>Market Consultation</i> (23 Mei 2022) 2. <i>Market Interest Confirmation</i> (26 Agustus 2022) 3. Penerbitan Persetujuan Pengadaan Badan Usaha (14 November 2022) 4. Prakuifikasi (21 November-26 Desember 2022)
5.	PLTA 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji, Sumatera Selatan	Penyiapan	1. Penerbitan Surat Izin Prakarsa (8 Maret 2022) 2. Penyampaian Dokumen Studi Kelayakan oleh Calon Pemrakarsa (31 Agustus 2022) 3. <i>Market Sounding</i> (8 Desember 2022) 4. Penyampaian Dokumen Final Studi Kelayakan oleh Calon Pemrakarsa (27 Desember 2022)
6.	DI Komering, Sumatera Selatan	Penyiapan	1. Penerbitan Surat Izin Prakarsa (28 April 2022) 2. Konsultasi Publik (1 September 2022) 3. Pernyataan Kesesuaian Syariah dari DSN-MUI (8 November 2022) 4. <i>Market Sounding</i> (20 Desember 2022)
7.	Saluran Interkoneksi <i>High Level Diversion</i> Wilayah Sungai Lombok, Nusa Tenggara Barat	Penyiapan	1. Penerbitan Surat Izin Prakarsa (20 Juni 2022) 2. Konsultasi Publik (22 September 2022) 3. Pernyataan Kesesuaian Syariah dari DSN-MUI (8 November 2022) 4. <i>Market Sounding</i> (20 Desember 2022)

Perbandingan Capaian Kinerja

Perbandingan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada Tahun 2020, 2021, dan 2022 adalah sebagai berikut

NO	PERBANDINGAN	TA 2020	TA 2021	TA 2022
SASARAN KEGIATAN: MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERUMAHAN				
INDIKATOR KINERJA: TINGKAT PENCAPAIAN PELAKSANAAN PENYIAPAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SDA				
1	PAGU RENSTRA (rupiahdlm juta)	11.043	16.000	47.290
2	PAGU DIPA (rupiahdlm juta)	11.042	11.048	9.494
3	CAPAIAN ATAS TARGET PK	24,56%	24,25%	25%
4	CAPAIAN ANGGARAN (rupiahdlmjuta)	10.081 (90,61%)	10.022 (90,72%)	9.368 (98,67%)
5	CAPAIAN OUTPUT	20	15	18

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	i
	RINGKASAN EKSKLUSIF	iii
	DAFTAR ISI	vi
	DAFTAR TABEL	ix
	DAFTAR GRAFIK	xi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	I.1 LATAR BELAKANG	1
	I.2 TUGAS DAN FUNGSI	2
	I.3 STRUKTUR ORGANISASI	4
	I.4 ISU STRATEGIS	5
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	8
	2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS	9
	2.2 PERJANJIAN KINERJA	16
	2.3 METODE PENGUKURAN	18
	2.4 TARGET TAHUN 2022 MENURUT RENSTRA DAN DIPA	22
	2.4.1 KERANGKA PENDANAAN	23
	2.5 POHON KINERJA	24
BAB III	KAPASITAS ORGANISASI	29
	3.1 SUMBER DAYA MANUSIA	29

	3.1.1	REKAPITULASI PEGAWAI BERDASARKAN STATUS PEGAWAI	30
	3.1.2	REKAPITULASI PEGAWAI BERDASARKAN PENGGOLONGAN LAINNYA	33
	3.1.3	ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI	37
	3.1.4	PENINGKATAN KUALITAS SDM	39
	3.2	SARANA PRA SARANA	41
	3.3	DAFTAR ISIAN PELAKSANA ANGGARAN	44
BAB IV		AKUNTABILITAS KINERJA	47
	4.1	CAPAIAN KINERJA	47
	4.1.1	CAPAIAN KINERJA ATAS PERJANJIAN KINERJA	48
	4.1.2	CAPAIAN KINERJA PER RINCIAN OUTPUT, KOMPONEN DAN PAKET KEGIATAN	53
	4.2	PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA	82
	4.2.1	PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	82
	4.2.2	PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT PPISDA DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH	83
	4.2.3	PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN STANDAR NASIONAL	85
	4.3	REALISASI ANGGARAN	87
	4.3.1	REALISASI ANGGARAN PER RO TA 2022	87
	4.3.2	REALISASI ANGGARAN PER PAKET KEGIATAN TA 2022	88
	4.3.3	SANDINGAN REALISASI ANGGARAN TA 2022 DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	88
	4.4	ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI	92

	4.5	ANALISIS KINERJA ORGANISASI	93
	4.5.1	ANALISIS KEBERHASILAN	93
	4.5.2	ANALISIS KEGAGALAN	94
	4.6	ANALISIS DAMPAK MANFAAT	95
	4.7	PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO	97
	4.8	EVALUASI DIREKTORAT PPISDA	
	4.8.1	EVALUASI SAKIP TA 2021	98
	4.8.2	TINDAK LANJUT TERHADAP EVALUASI SAKIP 2021	101
BAB V	PENUTUP		
	5.1	KESIMPULAN	106
	5.2	PERMASALAHAN/KENDALA	107
	5.3	REKOMENDASI	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN			

DAFTAR TABEL

2.1	Kontribusi Sasaran Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air terhadap Sasaran Program I Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur.	12
2.2	Kontribusi Indikator 2 Sasaran Kegiatan 3 terhadap indikator 2 yang ada pada Sasaran Program I Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur.	13
2.3	Target PK yang telah di tanda tangani oleh Direktur PPISDA dengan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Tahun anggaran 2022	17
2.4	Kronologis Revisi PK Direktorat PPISDA Tahun anggaran 2022	17
2.5	Indikator Sasaran Program, Kegiatan dan bobot untuk perhitungannya	19
2.6	Detail bobot untuk perhitungan capaian kinerja sampai jenjang komponen	21
2.7	Target tahun 2022 menurut Renstra disandingkan dengan DIPA	23
2.8	Pohon Kinerja Direktorat PPISDA	24
3.1	Daftar Pegawai PPISDA TA 2022	33
3.2	Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Jabatan Fungsional	36
3.3	Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Golongan	36
3.4	Pemetaan Kebutuhan Pegawai Direktorat PPISDA	38
3.5	Daftar Pegawai yang Mengikuti Diklat selama TA 2022	40
3.6	Daftar Rekapitulasi Hasil Inventarisasi BMN TA 2022	43
3.7	Kronologis Revisi DIPA TA 2022	44
4.1	Capaian Kinerja Direktorat PPISDA berdasarkan target Perjanjian Kinerja 2022	48
4.2	Capaian Kinerja Direktorat PPISDA disandingkan dengan target Renstra dan DIPA TA 2022	49
4.3	Cascading Perhitungan Capaian Kinerja Direktorat PPISDA TA 2022	50
4.4	Target dan Capaian pada Rincian Output I (Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA)	54

4.5	Target dan Capaian pada Rincian Output 2 (Study Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur SDA)	59
4.6	Target dan Capaian pada Rincian Output 3 (Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA)	61
4.7	Target dan Capaian pada Rincian Output 4 (Dukungan Kerjasama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA)	67
4.8	Target dan Capaian pada Rincian Output 5 (Proyek KPBU yang siap dikerjasamakan)	70
4.9	Target dan Capaian pada Rincian Output 6 (Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA)	75
4.10	Target dan Capaian pada Rincian Output 7 (Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA)	81
4.11	Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya	83
4.12	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target jangka Menengah	84
4.13	Realisasi anggaran per Rincian Output TA 2022	87
4.14	Realisasi anggaran per Paket Kegiatan TA 2022	90
4.15	Sandinagn realisasi anggar TA 2020-2022	92
4.16	Pemantauan inovasi pengendalian pada tingkat UPRT-2 Direktorat PPISDA	98
4.17	Penilaian Evaluasi sakip TA 2021 Direktorat PPISDA disandingkan dengan TA 2020	99
4.18	Penilaian Evaluasi SAKIP TA 2021 Direktorat PPISDA	101

DAFTAR GRAFIK

3.1	Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Status Pegawai	30
3.2	Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	34
3.3	Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenjang Gender	34
3.4	Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenjang Usia	35
3.5	Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan	36
4.1	Kronologis Capaian Kinerja Direktorat PPISDA Selama Tahun Anggaran 2022	48
4.2	Kronologis Perubahan Anggaran Komponen Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA TA 2023	56
4.3	Kronologis Perubahan Anggaran Penanganan Tanggap Darurat Bencana Coronan Covid 19 Di Lingkungan Direktorat PPISDA	57
4.4	Kronologis Perubahan Anggaran Komponen Penyusunan Identifikasi Dan Pipeline Proyek Kpbu Bidang SDA TA 2022	59
4.5	Kronologis Perubahan Anggaran Komponen Study Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur SDA	60
4.6	Kronologis Perubahan Anggaran Kegiatan Penyusunan Kajian Pra Studi Kelayakan Kpbu Sektor SDA TA 2022	63
4.7	Kronologis Perubahan Anggaran Kegiatan Penyusunan Pra Studi Kelayakan Brownfield Sektor SDA	65
4.8	Kronologis Perubahan Anggaran Kegiatan Penyusunan Evaluasi Kajian Studi Kelayakan Kpbu Unsolicited Sektor SDA TA 2022	67
4.9	Kronologis Perubahan Anggaran Kegiatan Penyiapan Dokumen Pengusahaan Dukungan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Proyek Kpbu Sektor SDA TA 2022	69
4.10	Kronologis Perubahan Anggaran Kegiatan Penyiapan Pelaksana Transaksi Kpbu Infrastruktur SDA TA 2022	72
4.11	Kronologis Perubahan Anggaran Kegiatan Pelaksanaan Transaksi Dan Pendampingan Kerjasama Pembiayaan Infrastruktur Bendungan TA 2022	74
4.12	Kronologis Perubahan Anggaran Kegiatan Penyusunan Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Infrastruktur SDA TA 2022	77

4.13	Kronologis Perubahan Anggaran Kegiatan Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Kpbu Sda Melalui Media Informasi	79
4.14	Kronologis Perubahan Anggaran Kegiatan Penyusunan Pengelolaan Risiko Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Infrastruktur SDA	81
4.15	Sandingan Rencana Dan Capaian Anggaran Per Bulan Selama TA 2022	90
4.16	Sandingan Rencana Dan Capaian Fisik Per Bulan Selama TA 2022	91



BAB

1

- ⇒ **LATAR BELAKANG**
- ⇒ **TUGAS DAN FUNGSI**
- ⇒ **STRUKTUR ORGANISASI**
- ⇒ **ISU STRATEGIS**

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu prasyarat dalam menciptakan pemerintah yang baik dan terpercaya, hal tersebut dapat terwujud dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya di sebut SAKIP merupakan serangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang di rancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja diselenggarakan secara berjenjang dari tingkat satuan kerja/unit kerja, unit organisasi sampai tingkat kementerian/lembaga. Kinerja disini merupakan hasil/output dari suatu kegiatan/program yang telah maupun hendak di capai, dari mulai dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, laporan kinerja sampai dengan review dan evaluasi kinerja sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur dengan jelas, Semua penjabaran tersebut tertuang dalam beberapa peraturan, diantaranya: Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Presiden no 29 tahun 2014, Permen PANRB nomor 53 Tahun 2014, Permen PUPR nomor 09 tahun 2018 dan Permen PUPR nomor 23 Tahun 2020.

Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 308/KMK.09/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian SAKIP di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keandalan pelaporan, mengukur tingkat implementasi SAKIP, perbaikan manajemen kinerja serta memonitor tindak lanjut atas hasil rekomendasi periode sebelumnya.

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air yang kemudian di sebut Direktorat PPISDA menyusun laporan kinerja tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, capaian kinerja yang terukur kepada pemberi amanah atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi yang terukur (akuntabel) dan transparan.

Laporan Kinerja juga dapat digunakan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan dengan tahun berikutnya

Rencana kegiatan sesuai program yang telah ditetapkan disusun sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing unit eselon III di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan dituangkan dalam Rencana Strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2020 - 2024. Rencana Strategis Direktorat ini memuat program, kegiatan, dan sasaran kegiatan eksisting serta kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi.

Implementasi tugas dan fungsi yang diamanatkan pada Direktorat PPISDA diwujudkan dengan menyelenggarakan kegiatan- kegiatan yang diperlukan, mendukung tugas dan fungsi berdasarkan kepada anggaran yang telah tercantum dalam DIPA. Keseluruhan aktivitas yang dilakukan unit kerja yang menggunakan dana APBN di lingkungan pemerintahan wajib dipantau dimulai dari perencanaan berupa target-target yang hendak diraih baik target fisik maupun target keuangan, proses penyelenggaraan/ pelaksanaan aktivitas dan kegiatan, capaian-capaian yang berhasil diraih baik secara fisik maupun secara keuangan, serta permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja berikut tindak lanjut kinerja kedepannya. Keseluruhan hal tersebut harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja sebagai wujud akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2020 pasal 545, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka kedudukan, tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Direktorat PPISDA yaitu sebagai berikut:

KEDUDUKAN:

Unit kerja Direktorat PPISDA dipimpin oleh Direktur PPISDA yang berada dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

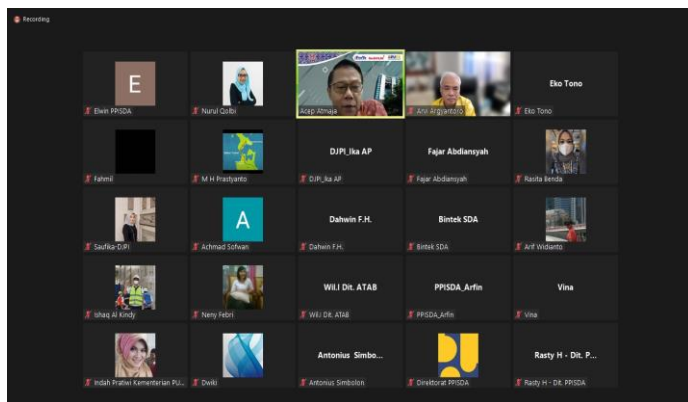
TUGAS

Direktorat PPISDA memiliki tugas yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air.

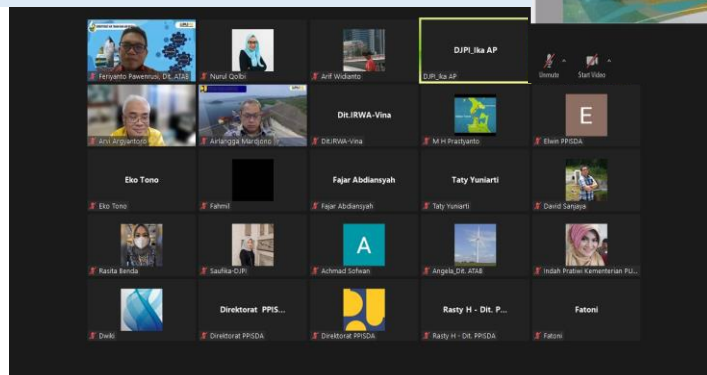
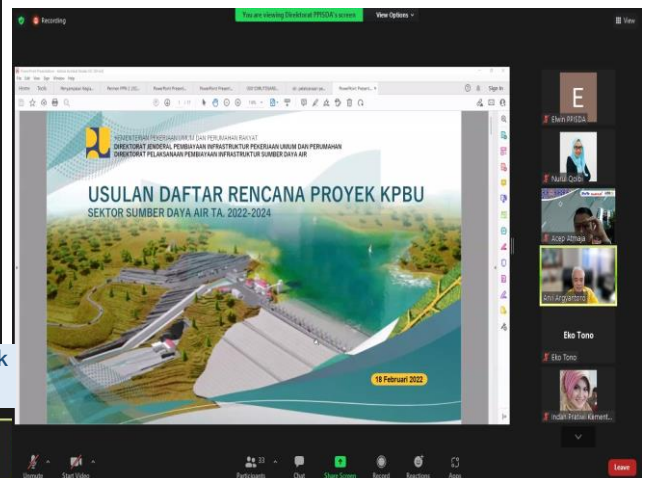
FUNGSI:

Direktorat PPISDA dalam melaksanakan tugas yang tersebutkan di atas, dibutuhkan fungsi dalam menyelenggarakannya:

- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air
- penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air; dan
- pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

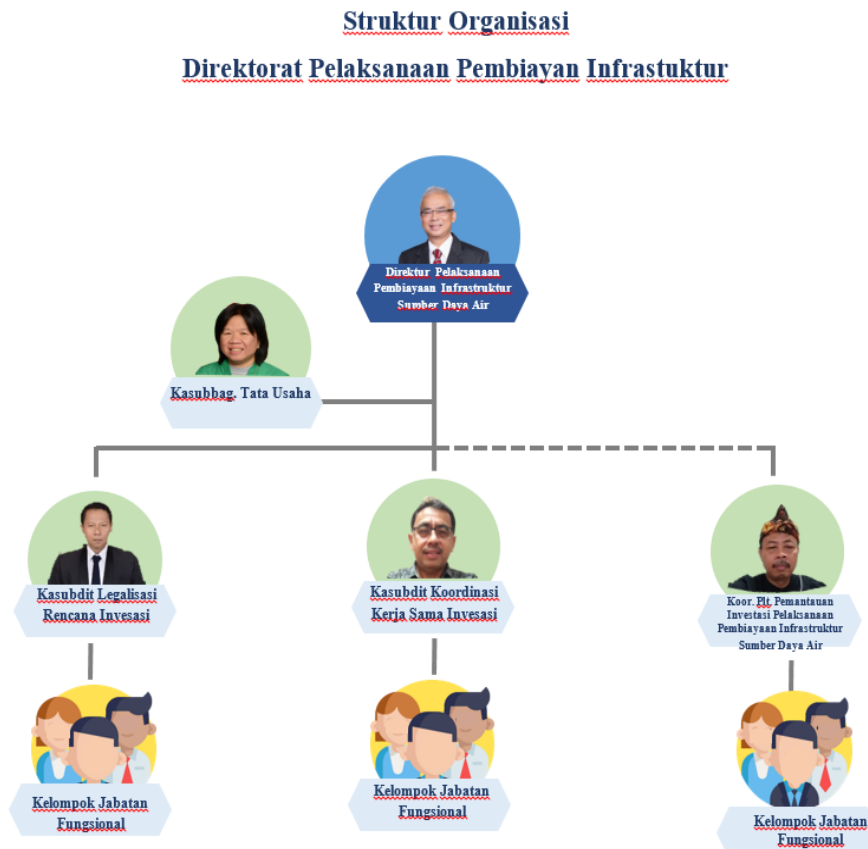


Tangkapan Layar Rapat Pembahasan Usulan Daftar Rencana Proyek KPBU Sektor SDA TA 2023



1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja terdiri atas 2 subdirektorat dan satusubagian tata usaha. Adapun 2 Subdirektorat tersebut yaitu Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi dan Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi. Berikut Struktur Organisasi Direktorat PPISDA:



Gambar 1.1.
Struktur
Organisasi
Direktorat PPISDA

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air dibantu oleh:

1.3.1 Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi

Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan legalisasi rencana investasi di bidang pelaksanaan pembiayaan

infrastruktur sumber daya air.

Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi terdiri atas kelompok jabatan fungsional (JF), diantaranya :

1. JF Analis Kebijakan Ahli Muda
2. JF Analis Kebijakan Ahli Pertama
3. JF Pengelola Pengadaan Barang Jasa Ahli Pertama
4. JF Analis Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Ahli Pertama

1.3.2 Subdirektorat Koordinasi Kerjasama Investasi

Subdirektorat Koordinasi Kerjasama Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pelaksanaan percepatan Kerjasama pemerintah dan badan usaha, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi Kerjasama investasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air.

Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi terdiri atas kelompok jabatan fungsional (JF), diantaranya :

1. JF Analis Kebijakan Ahli Madya
2. JF Analis Kebijakan Ahli Muda
3. JF Pranata Humas Ahli Muda
4. JF Analis Kebijakan Ahli Pertama
5. JF Teknik Pengairan Ahli Pertama

1.3.3 Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumah tanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

1.4 ISU STRATEGIS

Pada tahun ketiga Renstra 2020-2024, Direktorat PPISDA menghadapi berbagai isu-isu ataupun kendala dalam mencapai target kinerja sesuai dengan yang telah dituangkan dalam Renstra tersebut. Berikut ini merupakan isu-isu strategis pada Direktorat PPISDA selama tahun anggaran 2022. Isu-isu dan kendala tersebut yaitu:

1. Dinamisasi alokasi anggaran Dit. PPISDA. Berdasarkan usulan anggaran TA. 2023 Dit. PPISDA mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp. 19,14 Miliar. Namun berdasarkan Pagu Indikatif Dit. PPISDA hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp. 11,39 Miliar, sedangkan pada Pagu Anggaran, dan Pagu Alokasi Anggaran mendapatkan anggaran sebesar 12,39 Miliar
2. Belum adanya kepastian kapasitas fiskal Ditjen. SDA untuk pembayaran Availability Payment (AP). Berdasarkan informasi dari Dit. SSPSDA, pada tahun 2026 Ditjen. SDA memiliki kapasitas fiskal untuk pembayaran AP sebesar Rp 800 M, namun akan terjadi peningkatan kebutuhan pembayaran AP pada tahun-tahun berikutnya. Sehingga diperlukan upaya untuk memenuhi kebutuhan pembayaran AP tersebut.
3. Belum terdapat studi terkait Blended Finance Proyek KPBUsDA. Dalam rangka mengurangi beban fiskal APBN dalam pembayaran AP, maka diperlukan kajian penggunaan blended finance dalam pemenuhan pembayaran AP
4. Pelaksanaan KPBUsDA OP berdasarkan UU SDA 17/2019 Pasal 57 ayat (8) yang menyatakan bahwa kerja sama pendanaan tidak termasuk kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, sehingga diperlukan alternatif solusi untuk pelaksanaan KPBUsDA sektor SDA
5. Pada proyek KPBUsDA yang memanfaatkan Bendungan Multiguna milik Kementerian PUPR untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) maupun PLTM, isu yang berkembang yaitu adanya tahapan negosiasi dalam proses penunjukan langsung di PT PLN sehingga badan usaha tidak mendapatkan kepastian tarif listrik dalam PJBL (Perjanjian Jual Beli Listrik).





BaB

2

- ⇒ **URAIAN SINGKAT RENSTRA**
- ⇒ **PERJANJIAN KINERJA**
- ⇒ **METODE PENGUKURAN**
- ⇒ **TARGET**
- ⇒ **POHON KINERJA**

PERENCANAAN kinerja

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian memiliki posisi yang sangat strategis. Renstra Kementerian PUPR berkedudukan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), di mana dalam penyusunan Renstra K/L harus berpedoman pada RPJMN. Selain itu, Renstra Kementerian PUPR juga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja K/L). Penyusunan Renja K/L juga dilakukan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan penjabaran target tahunan RPJMN.

Selanjutnya dokumen Renja K/L yang telah tersusun, menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga sebagai organisasi/instansi pengguna anggaran dalam penyusunan RKA K/L. RKA K/L yang telah disusun oleh Kementerian/Lembaga tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai input dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebelum nanti akhirnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dokumen Renstra Kementerian dijabarkan ke dalam target tahunan yaitu Renja K/L dan kemudian dijadikan acuan di dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) setelah



Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) diterbitkan. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Perjanjian Kinerja memuat indikator kinerja sesuai dengan Renstra dan

anggaran sesuai dengan DIPA.

Target di dalam Perjanjian Kinerja kemudian dijabarkan menjadi target bulanan dalam bentuk dokumen Rencana Aksi Kinerja dan akan dipantau serta dievaluasi setiap bulan yang tertuang di dalam dokumen Monev Kinerja Bulanan. Proses perencanaan kinerja tingkat kementerian di atas juga berlaku sama dengan lingkup di bawahnya, dari Unit organisasi, unit kerja maupun satuan kerja. Dari kementerian kemudian akan turun ke unit organisasi, unit kerja kemudian ke satuan kerja jika ada. Adapun pada akhir tahun maka masing-masing pelaksana anggaran dari mulai tingkat kementerian, unit organisasi, maupun unit kerja akan disusun Laporan Kinerja yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja akan membandingkan kinerja antara target yang telah tercantum di dalam Perjanjian Kinerja dengan capaiannya.

2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS

Capaian pembangunan infrastruktur pada RPJMN 2015-2019 dalam bidang Sumber Daya Air adalah pembangunan 29 bendungan baru sebagai bagian dari rencana pembangunan 65 bendungan 2015-2019, sehingga kapasitas tampung per kapita meningkat menjadi 59,91 m³/detik. Dengan tambahan bendungan baru tersebut, layanan air irigasi untuk 12,5% lahan sawah beririgasi di Indonesia dapat dilayani oleh waduk. Selain itu, dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, telah dibangun 0,99 juta Ha irigasi baru dan rehabilitasi pada 2,9 juta Ha irigasi eksisting. Dalam rangka mendukung akses air minum universal, pembangunan bendungan baru menambah kapasitas air baku sebesar 24,9 m³/detik.

Dalam upaya mencapai target pertumbuhan PDB skenario menengah dalam RPJMN 2020-2024, kebutuhan belanja infrastruktur diperkirakan mencapai Rp.6.445 Triliun. Akan tetapi, kemampuan penyediaannya hanya sebesar 3,46% dari PDB sehingga terdapat gap cukup signifikan dalam pendanaan infrastruktur. Untuk itu diperlukan upaya kreatif untuk mendorong peran serta investasi masyarakat dan badan usaha salah satunya melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Tujuan Direktorat PPISDA 2020-2024:

“Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Melalui Skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Dalam Rangka Mendukung Pemenuhan Infrastruktur Sumber Daya Air”

Dalam Rancangan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024, pembangunan 18 waduk multiguna menjadi salah satu major project dengan indikasi pendanaan sebesar Rp 201,5 Triliun dimana Rp 47,5 Triliun dipenuhi oleh APBN, Rp 90 Triliun dipenuhi oleh KPBU, dan Rp 64 Triliun dipenuhi oleh swasta. Manfaat dari *major project* ini adalah tersedia nyapasokan air baku dari waduk sebesar 23,5 m³/detik dan pasokan listrik 2.438 MW dan tersedianya pasokan air di 51 daerah irigasi premium.

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan pembiayaan infrastruktur dengan sumber dana non konvensional, khususnya Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang kemudian diperbarui karena adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja kementerian sehingga pengaturan terkait pelaksanaan KPBU dalam penyediaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan perlu diganti menjadi Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2021 tentang dalam Penyediaan Infrastruktur di Kementerian PUPR, jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan terdiri atas : (1) Infrastruktur jalan (2) **Infrastruktur Sumber Daya Air dan irigasi**; (3) Infrastruktur air minum; (4) infrastruktur air limbah terpusat; (5) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat; (6) Infrastruktur system pengelolaan sampah; (7) Infrastruktur ekonomi fasilitas perkotaan seperti pasar; (8) Infrastruktur fasilitas pendidikan, penelitian, dan pengembangan; (9) Infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya; (10) Infrastruktur perumahan rakyat; (11) Infrastruktur bangunan negara berupa perkantoran, rumah negara dan sarana pendukung lainnya.

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air merupakan salah satu Unit Kerja di DJPI yang memiliki tanggung jawab untuk mendukung Unor Teknis (Direktorat Jenderal Sumber Daya Air) untuk melaksanakan major project yang tercantum dalam Rancangan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024. Dukungan tersebut terkait dengan pembiayaan infrastruktur melalui Skema KPBU sektor sumber daya air.

2.1.1 Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air merupakan kondisi yang diinginkan untuk dapat dicapai. Sasaran kegiatan merupakan penjabaran dari tujuan kedalam langkah-langkah yang lebih rinci. Penjabaran ini dilakukan guna mempermudah pencapaian tujuan.

Sasaran kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya fasilitasi tahapan penyiapan, perencanaan, transaksi, pemantauan dan evaluasi 9 proyek KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air, antara lain 6 proyek bendungan, 2 proyek SAB, dan 1 proyek daerah irigasi;
2. Terlaksananya pendampingan dalam pemenuhan pembiayaan proyek KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air; dan
3. Terlaksananya layanan perkantoran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA.

Direktorat PPISDA perlu mendampingi dan membantu pemenuhan pembiayaan proyek KPBU infrastruktur SDA yang terdiri dari 6 proyek bendungan, 2 proyek SAB, dan 1 proyek daerah irigasi pada periode 2020-2024. Tidak hanya pemenuhan pembiayaan, direktorat perlu memfasilitasi proyek KPBU. Fasilitasi dilakukan mulai dari tahap penyiapan, perencanaan, transaksi, pemantauan, hingga evaluasi. Hal ini berarti PPI SDA tidak hanya memastikan biaya proyek terpenuhi, namun juga proyek yang dijalankan dengan skema KPBU perlu untuk didampingi hingga proses evaluasi. Selain itu, pelayanan perkantoran juga penting untuk diperhatikan. Layanan perkantoran perlu dilaksanakan untuk memastikan operasionalisasi berjalan.

Dalam upaya meningkatkan pemanfaatan sumber pembiayaan infrastruktur sumber daya air melalui skema KPBU, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA perlu melaksanakan tiga poin yang tercantum dalam sasaran yang telah ditetapkan di atas. Pelaksanaan sasaran membutuhkan arahan kebijakan dan strategi agar tugas dan fungsi direktorat tidak keluar dari koridor yang telah ditetapkan (terkait arahan kebijakan dan strategi akan dijelaskan pada bab selanjutnya). Jika pelaksanaan fasilitasi proyek KPBU, pendampingan dalam pemenuhan pembiayaan proyek, dan pelayanan perkantoran dapat dicapai, maka Direktorat PPI SDA telah mampu mendukung pemenuhan infrastruktur SDA.

Detail manual Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan persentase perhitungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air yang ikut berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Program Direktorat Jenderal pembiayaan Infrastruktur dapat dilihat pada tabel berikut :

SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN					
SP 1	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBUI Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung Sistem Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif. IKSP, merupakan nilai komposit dari indikator 1. Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%) 2. Tingkat Ketersediaan KPBUI Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, yang siap dikerjasamakan (%)	IKSP2, dihitung pejumlahan dari indikator Kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (30%) 1. Survey Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dibandingkan dengan target. Indikator 2 (70%) 2. Dihitung berdasarkan jumlah paket KPBUI yang siap dikerjasamakan akibat kegiatan penyiapan Pembiayaan infrastruktur SDA, Jalan dan Jembatan, Permukiman dan Perumahan (realisasi jumlah Paket Pembiayaan KPBUI yang masuk tahap lelang pada tahun berjalan)		Internal dan Eksternal

Tabel 2.1 Kontribusi Sasaran Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air terhadap Sasaran Program 1 Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENG HITUN GAN	SUMBER DATA
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN					
SK 3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air komposit dari indikator 1. Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Pembiayaan Infrastruktur (%) 2. Tingkat Implementasi kegiatan transaksi paket pembiayaan infrastruktur Sumber Daya Air (%)	IKSP2, dihitung Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (50%) 1. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerjasama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air yang disusun dibandingkan dengan target. Indikator 2 (50%) 2. Jumlah paket KPBU Sumber Daya Air yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target.		Internal dan Eksterna I

Tabel 2.2 Kontribusi Indikator 2 Sasaran Kegiatan 3 terhadap indikator 2 yang ada pada Sasaran Program 1 Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur.

Sesuai dengan Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur 2020-2024, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air ikut berkontribusi dalam mencapai target Sasaran Program seperti yang terlihat pada tabel kinerja yang terdapat Sasaran Program 1, Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya yang mana turunannya adalah Sasaran Kegiatan Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan. Indikator 2 pada Sasaran Program dengan nilai bobot sebesar 70 %, maka turunannya terdapat pada indikator 2 yang ada di Sasaran Kegiatan Direktorat PPISDA dengan

bobot nilai sebesar 50 %. Dimana dalam 50 % ini adalah nilai dari paket KPBU yang siap dikerjasamakan.

2.1.2 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a) Pengembangan regulasi dan kebijakan teknis dalam rangka mendukung dan percepatan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- b) Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air di tingkat pusat dan daerah;
- c) Peningkatan kontribusi dan manfaat pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- d) Pengembangan sumber pendanaan dan skema pembiayaan infrastruktur sumber daya air yang efisien, akuntabel dan berkelanjutan;
- e) Percepatan Kerjasama pemerintah dan badan usaha pada pembiayaan infrastruktur sumber daya air dengan mendorong partisipasi masyarakat, mitra, dan pemangku kepentingan terkait;
- f) Pendampingan Badan Usaha dalam pemenuhan pembiayaan proyek KPBU infrastruktur sumber daya air;
- g) Memastikan dan mendorong peningkatan kualitas penyediaan dan operasional infrastruktur sumber daya air yang melalui skema KPBU;

2.1.3 Strategi

Strategi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a) Pembentukan Tim KPBU untuk sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan KPBU pada tahap perencanaan, penyiapan, transaksi, monitoring, dan evaluasi;
- b) Peningkatan koordinasi dengan Unit Organisasi Teknis untuk mengidentifikasi proyek-proyek infrastruktur sumber daya air yang akan dibiayai dengan skema KPBU dan terkait penerbitan dokumen izin lingkungan dan pembebasan lahan untuk proyek-proyek yang akan dibiayai dengan skema KPBU;
- c) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya terkait penentuan PJPB untuk proyek-proyek yang akan dibiayai dengan skema KPBU;
- d) Menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk pembangunan dan operasional infrastruktur sektor sumber daya air;
- e) Mengembangkan system teknologi informasi dalam rangka memberikan bimbingan teknis terkait pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;

- f) Relaksasi ketentuan pembayaran ketersediaan layanan (AP) untuk proyek unsolicited;
- g) Melakukan kajian terhadap Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral No. 50 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk membahas tentang mekanisme dan konsep kerjasama pembelian tenaga listrik;
- h) Melakukan kajian terhadap Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya No. 55 tahun 2019 tentang Besaran Biaya Pokok Penyediaan Pembangunan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk menyepakati perhitungan pendapatan dari listrik dan harga jual listrik PT. PLN (Persero) kepada masyarakat.
- i) Pemanfaatan bendungan multiguna baru yang memiliki potensi sebagai pembangkit listrik melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
- j) Pemberian dukungan terkait dengan pembiayaan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku kepentingan yang terus diupayakan pada kegiatan konservasi, pendayagunaan, serta pengendalian daya rusak, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga operasi dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air;
- k) Pemberian dukungan terkait dengan pembiayaan untuk pendayagunaan sumber daya air dalam pemenuhan kebutuhan air baku untuk air bersih, diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan/defisit air, wilayah tertinggal dan wilayah strategis; dan
- l) Pemberian dukungan terkait dengan pembiayaan untuk pengendalian daya rusak terutama dalam hal penanggulangan banjir yang dilaksanakan selaras antara pendekatan struktural dan pendekatan non-struktural melalui konservasi sumber daya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah, diutamakan pada daerah berpenduduk padat, konektivitas antar pusat ekonomi dan kawasan strategi



Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Potensi Proyek KPBU Daerah Irigasi Colo dan Daerah Irigasi Semen Krinjo di Jawa Tengah dan Jawa Timur



2.2 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan Perjanjian Kerja yang berisikan perjanjian antara Pihak yang diberikan tanggung jawab (dalam hal ini Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air) dengan Pihak Pimpinan yang memberikan tanggung jawab (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur). Dokumen ini secara otomatis menjadi kontrak kinerja yang

harus dipenuhi oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air selama satu tahun kepada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur. Dokumen Perjanjian Kinerja disusun setelah adanya alokasi pagu anggaran yang jelas. Hal ini dimaksudkan agar Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang dibuat lebih realistis dengan kegiatan dan ketersediaan dana yang ada. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) ini juga akan menjadi bahan acuan dalam Pengukuran Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air. Berikut ini merupakan Perjanjian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA Tahun Anggaran 2022 terkait pelaksanaan program dengan target yang ingin di capai.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	100,00%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	25,00%

KEGIATAN
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN

Herry Trisaputra Zuna
HERRY TRISAPUTRA ZUNA

Perjanjian
Kinerja awal
Direktorat
PPISDA

ANGGARAN
Rp1.250.000.000,00

JAKARTA, JANUARI 2022
DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
SUMBER DAYA AIR

Arvi Argiantoro
ARVI ARGYANTORO

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air pada awal tahun 2022 telah menetapkan perjanjian kinerja yang mencakup 1 sasaran kegiatan dengan nilai anggaran sebesar Rp 11.250.000.000,00 (Sebelas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) Sesuai DIPA Nomor : SP DIPA- 033.16.1.631003/2021 tanggal 17 Nopember 2021.

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASLINE	TARGET
SP. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	99,67 %	100 %
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan		

IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	24,25 %	25 %
Kegiatan: Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Anggaran: 11.250.000.000,00		

Tabel 2.3 Target PK yang telah di tanda tanagani oleh Direktur PPISDA dengan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Tahun anggaran 2022

Selama tahun 2022, Direktorat PPISDA mengalami revisi DIPA yang berkaitan dengan perubahan pagu Anggaran, sehingga mengakibatkan revisi Perjanjian Kinerja

2.3.1 Revisi Perjanjian Kinerja

Selama tahun 2022, Direktorat PPISDA telah mengalami 4 kali revisi DIPA, sedangkan revisi PK sebanyak 2x. Revisi PK dilakukan jika ada perubahan target ataupun perubahan pagu anggaran selama tahun berjalan. Revisi PK pertama dilakukan pada bulan Nopember 2022, dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp 10.244.539.000,00 (Sepuluh milyar dua ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dan target masih sama sebesar 25%. Perubahan pagu ini terjadi karena adanya optimalisasi anggaran di lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur sedangkan Direktorat PPISDA terkena optimalisasi anggaran sebesar Rp1.005.461.000,00 (satu milyar lima juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah). Revisi PK ke dua dilakukan pada bulan Desember 2022, dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp 9.494.539.000,00) dan target masih sama sebesar 25%. Perubahan pagu di akhir tahun ini terjadi karena adanya realokasi anggaran yang terblokir (Automatic Adjusment) ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

NO	History	Time	Pagu	Keterangan
1	PK Awal	Januari 2022	11.250.000.000,00	PK awal sesuai dengan anggaran awal yang ada di DIPA awal
2	PK Revisi 1	November 2022	10.244.539.000,00	Revisi PK 1, perubahan pagu anggaran akibat adanya optimalisasi Anggaran sebesar Rp1.005.461.000,00
3	PK Revisi 2	Desember 2022	9.494.539.000,00	Realokasi Anggaran TA 2022 yang Terblokir Automatic Adjusment ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebesar 750 juta

Tabel 2.4 Kronologis Revisi PK Direktorat PPISDA Tahun anggaran 2022

2.3 METODE PENGUKURAN

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi. Kinerja suatu organisasi bisa diketahui hanya jika organisasi tersebut mempunyai kriteria/indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Indikator keberhasilan biasanya dikaitkan dengan target-target tertentu yang akan dicapai.

Indikator kegiatan (Output) merupakan indikator yang di gunakan untuk menilai keberhasilan dalam capaian kinerja dan output yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut. Penetapan indikator dilakukan dengan kriteria-kriteria tertentu sehingga mudah untuk diukur, mudah untuk dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang telah di tentukan. Indikator Kinerja Utama Output Direktorat PPISDA adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan SDA;
2. Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur SDA;
3. Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA;
4. Dukungan Kerjasama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA;
5. Proyek KPBU SDA yang di kerjasamakan;
6. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan SDA;
7. Kinerja Pembiayaan Infrastruktur SDA.

Metode pengukuran yang dilakukan untuk mengukur capaian kinerja Direktorat PPISDA berpedoman pada perhitungan yang terdapat dalam Tabel Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur tahun 2020 - 2024. Sasaran Kegiatan yang ada di Renstra DJPI saling terintegrasi dari Unit kerja yang satu ke unit kerja yang lain, sehingga mengakibatkan adanya sharing dalam pencapaian sasaran kegiatannya. Berikut ini adalah Tabel Indikator Sasaran Kegiatan dan Cara Perhitungannya berdasarkan Renstra DJPI Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

SASARAN PROGRAM /SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN
SK 03	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Komposit dari indikator-indikator Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur SDA sbb :

			1.	Tingkat Implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan paket pembiayaan Infrastruktur SDA (%)	Indikator 1 (50%) : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerjasama Pelaksanaan Pembiayaan SDA yang disusun dibandingkan dengan target
			2.	tingkat implementasi kegiatan transaksi paket pembiayaan infrastruktur SDA	Indikator 2 (50%) : Jumlah Proyek KPBU Sumber Daya Air yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target (Sumber Renstra DJPI)

Tabel 2.5 Indikator Sasaran Program, Kegiatan dan bobot untuk perhitungannya

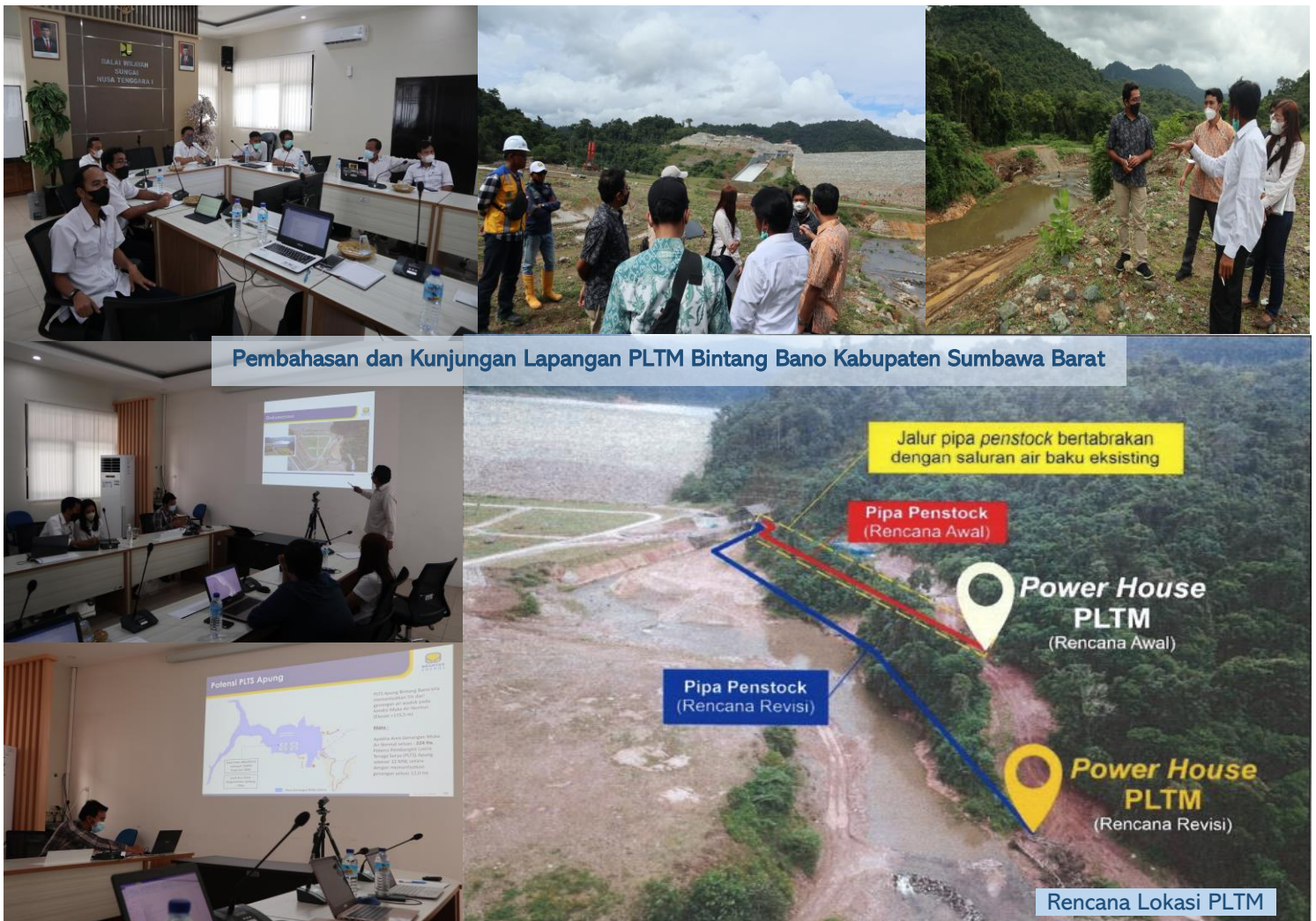
Selanjutnya tabel 2.3, dijabarkan kembali mengenai bobot perhitungan capaian setiap Rincian output dan komponennya. Berikut bobot perhitungan capaian kinerja terlampir dalam tabel 2.4:

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	RINCIAN OUTPUT	BOBOT RO	KOMPONEN	BOBOT KOMPONEN
SASARAN PROGRAM : MENINGKATNYA DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA					
IKSP : Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung system, kebijakan pembiayaan yang efisien dan efektif					
Sasaran Kegiatan : meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur SDA					
Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA					
TINGKAT PENCAPAIAN PELAKSANAAN PENYIAPAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SDA Target 25%	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA yang disusun dibandingkan	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA	30 %	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA	50%
				Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU	50%

	dengan target (50 %)			Infrastruktur SDA	
		Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur SDA	20 %	Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur SDA	100%
		Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA	30%	Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA	40%
				Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA – rp	60%
		Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	20%	Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur SDA	
		NSPK Pembiayaan Infrastruktur SDA	-	-	
	Jumlah Proyek KPBU Sumber Daya Air yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target (50%)	Proyek KPBU SDA yang siap dikerjasamakan	35%	Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur SDA	60%
				Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur	40%

			SDA	
	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	35%	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	100%
	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	30%	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	100%

Tabel 2.6 Detail bobot untuk perhitungan capaian kinerja sampai jenjang komponen



2.4 TARGET TAHUN 2022 MENURUT RENSTRA dan DIPA

Pada tahun anggaran 2022 Direktorat PPISDA memiliki target renstra sebanyak 20 target dengan perincian: 9 rekomendasi kebijakan, 2 dokumen, 2 kesepakatan, 2 NSPK dan 5 laporan dengan rencana anggaran dalam renstra sebesar Rp 47.290.000.000,00 (empat puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah). Sedangkan dalam dokumen DIPA, jumlah target sebanyak 18 target dengan perincian: 7 rekomendasi kebijakan, 1 dokumen, 5 kesepakatan, dan 5 laporan dengan pagu anggaran dalam DIPA sebesar Rp 11.250.000.000,00 (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Berikut tabel sandingan target renstra dan target DIPA tahun anggaran 2022 Direktorat PPISDA:

NO	SASARAN STRATEGIS /SASARAN PROGRAM /IKSP/SK/IKK /OUTPUTKEGIATAN /INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN	SAT	TARGET RENSTRA	PAGU	TARGET DIPA	PAGU DIPA AWAL
SASARAN PROGRAM : MENINGKATNYA DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA						
IKSP : Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung system, kebijakan pembiayaan yang efisien dan efektif						
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur SDA						
Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA						
PELAKSANA : DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR						
OUTPUT KEGIATAN						
1	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA		3	3.100	2	1.000
	1 Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA	RK	1	600	1	500
	2 Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur SDA	RK	2	2.500	1	500
2	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur SDA		1	600	1	500
	1 Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur SDA	RK	1	600	1	500
3	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA		4	31.900	3	4.000
	1 Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA	RK	2	14.400	1	1.500
	2 Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA	RK	2	17.500	2	2.500

4	Dukungan Kerjasama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA			1	1.000	1	500
	1	Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja sama Investasi Infrastruktur SDA	RK	1	1.000	1	500
5	Proyek KPBU SDA yang di kerjasamakan			2	5.090	5	3.000
	1	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur SDA	DOK	2	2.440	1	1.000
	2	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur SDA	KS	2	2.650	5	2.000
6	NSPK Pembiayaan Infrastruktur SDA			2	1.800	-	-
	1	Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur SDA	NSPK	2	1.800	-	-
7	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan SDA			4	3.500	4	950
	1	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	LAP	4	3.500	4	950
8	Kinerja Pembiayaan Infrastruktur SDA			1	300	1	300
	1	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	LAP	1	300	1	300
	TOTAL			20	47.290	18	10.250

Tabel 2.7 Target tahun 2022 menurut Renstra disandingkan dengan DIPA

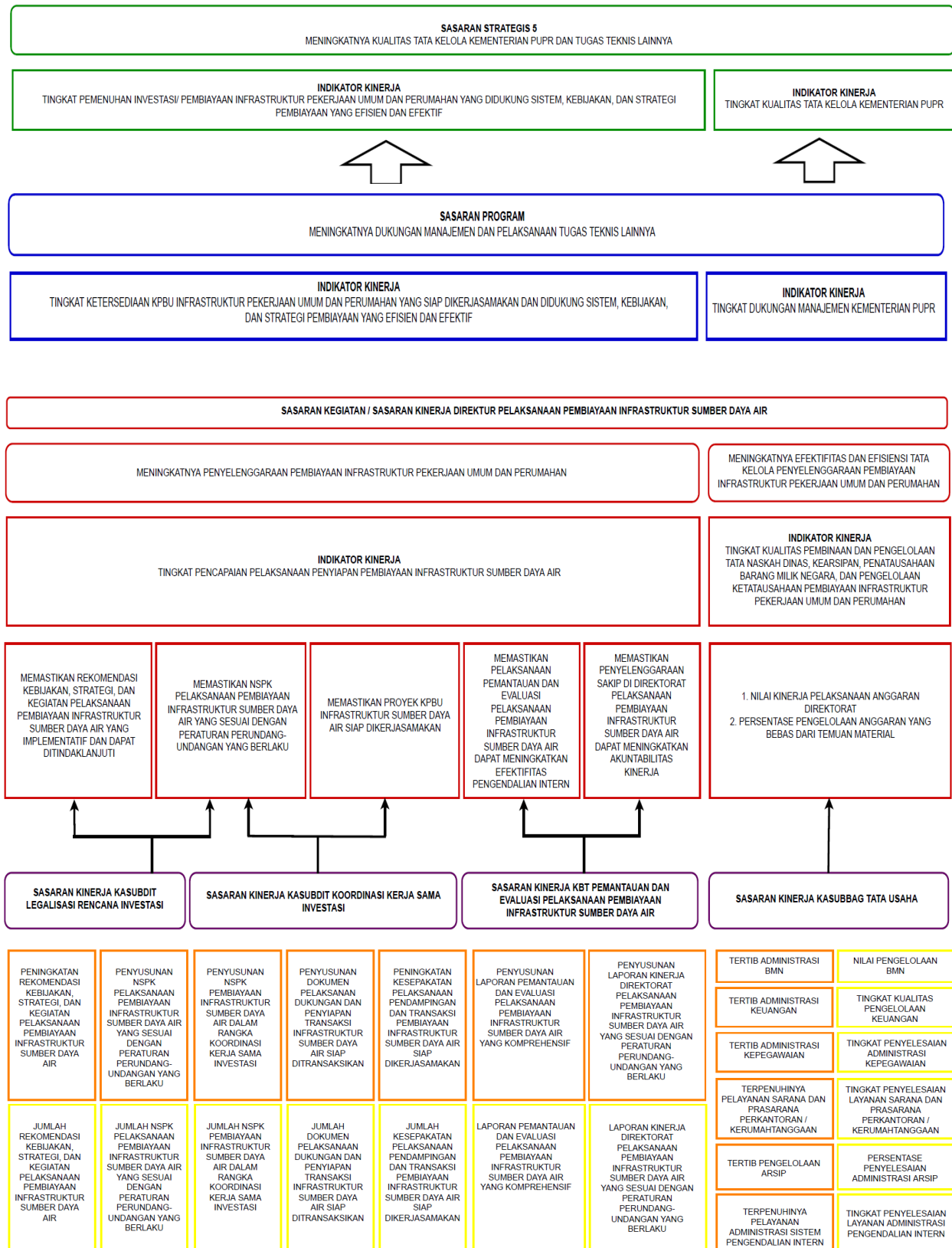
2.4.1 Kerangka Pendanaan

Seperti halnya target kinerja, rencana anggaran dalam kementerian lembaga ataupun suatu organisasi pemerintah telah di rencanakan dalam rencana strategi yang memiliki periode selama 5 tahun yang dikenal dengan sebutan RENSTRA. Kebutuhan pendanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat PPISDA pada tahun anggaran 2022 juga telah direncanakan dalam Renstra Direktorat PPISDA periode 2020 – 2024. Tabel kerangka pendanaan terlampir pada Lampiran laporan ini.

2.5 Pohon KINERJA 2022

Hubungan antaran Sasaran Strategis Kementerian PUPR, Sasaran Kinerja Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan, Sasaran Kinerja Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan Strategi untuk memastikan bahwa Sasaran Kinerja tercapai adalah sebagai berikut:

POHON KINERJA



MATRIK PEMBAGIAN PERAN HASIL

NAMA DAN JABATAN PEGAWAI	INTERMEDIATE OUTCOME / PRODUK DAN/ATAU LAYANAN TIM KERJA PADA SUBDIT LEGALISASI RENCANA INVESTASI DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	
KASUBDIT LEGALISASI RENCANA INVESTASI	REKOMENDASI KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KEGIATAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR YANG IMPLEMENTATIF DAN DAPAT DITINDAKLANJUTI	NSPK PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR YANG SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
IKA AGUS PAWIYARTI SKBT PERENCANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR (JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA)	1. DRAF REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR YANG AKURAT DAN TERSELESAIKAN TEPAT WAKTU 2. DRAF REKOMENDASI KEBIJAKAN PERENCANAAN, KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR YANG AKURAT DAN TERSELESAIKAN TEPAT WAKTU	1. DRAF NSPK PERENCANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR YANG SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, AKURAT, DAN TERSELESAIKAN TEPAT WAKTU
ARIF WIDIANTO SKBT PENYIAPAN INVESTASI INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR (JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA)	1. DRAF REKOMENDASI KEBIJAKAN PRA STUDI KELAYAKAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR YANG AKURAT DAN TERSELESAIKAN TEPAT WAKTU 2. DRAF REKOMENDASI KEBIJAKAN DUKUNGAN KERJA SAMA PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR YANG AKURAT DAN TERSELESAIKAN TEPAT WAKTU	1. DRAF NSPK PENYIAPAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR YANG SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, AKURAT, DAN TERSELESAIKAN TEPAT WAKTU
JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	DATA DAN INFORMASI TERKAIT KEBIJAKAN DAN KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR YANG LENGKAP, AKURAT, MUTAKHIR, DAN INFORMATIF SERTA BERBASIS SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	DATA DAN INFORMASI MENGENAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PERENCANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR YANG LENGKAP DAN MUTAKHIR
JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	DATA DAN INFORMASI TERKAIT KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERENCANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR YANG LENGKAP, AKURAT, MUTAKHIR, DAN INFORMATIF	-
JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	DATA DAN INFORMASI TERKAIT KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR YANG LENGKAP, AKURAT, MUTAKHIR, DAN INFORMATIF	-
JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	DATA DAN INFORMASI TERKAIT KEBIJAKAN DALAM PRA STUDI KELAYAKAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR YANG LENGKAP, AKURAT, MUTAKHIR, DAN INFORMATIF	-
JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	DATA DAN INFORMASI TERKAIT KOORDINASI DAN SINKRONISASI PRA STUDI KELAYAKAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR YANG LENGKAP, AKURAT, MUTAKHIR, DAN INFORMATIF	-
JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	-	DATA DAN INFORMASI MENGENAI NSPK PENYIAPAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR YANG SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT, LENGKAP, DAN MUTAKHIR
JF PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	DATA DAN INFORMASI TERKAIT KEBIJAKAN DUKUNGAN KERJA SAMA PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR YANG LENGKAP, AKURAT, MUTAKHIR, DAN INFORMATIF SERTA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU	-

MATRIK PEMBAGIAN PERAN HASIL

NAMA DAN JABATAN PECAWA	INTERMEDIATE OUTCOME / PRODUK DAN/ATAU LAYANAN TIM KERJA PADA SUBDIT KOORDINASI KERJA SAMA INVESTASI DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR		
KASUBDIT KOORDINASI KERJA SAMA INVESTASI	DOKUMEN PELAKSANAAN DUKUNGAN DAN PENYIAPAN TRANSAKSI PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR SIAP DITRANSAKSIKAN	KESEPAKATAN PELAKSANAAN PENDAMPINGAN DAN TRANSAKSI PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR SIAP DIKERJASAMAKAN	NSPK PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR SIAP DISUSUN DALAM RANGKA KOORDINASI KERJA SAMA INVESTASI
NANIK YULIA WIDIYANTI SKBT DUKUNGAN DAN PENYIAPAN TRANSAKSI INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR (JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA)	PENYIAPAN PELAKSANAAN TRANSAKSI PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR SIAP DITRANSAKSIKAN	-	-
ISHAQ AL KINDY SKBT PENDAMPINGAN DAN TRANSAKSI INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR (JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA)	-	PELAKSANAAN TRANSAKSI DAN PENDAMPINGAN KERJA SAMA PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BENDUNGAN SIAP DIKERJASAMAKAN	PENYUSUNAN PEDOMAN TATA CARA PELAKSANAAN PENGADAAN BADAN USAHA KPB DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU
JF TEKNIK PENGAIRAN AHLI PERTAMA	1. TELAAHAN KAJIAN TEKNIS DOKUMEN FBC SECARA LENGKAP, AKURAT, DAN INFORMATIF 2. TELAAHAN DOKUMEN AMDAL SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU 3. TELAAHAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL DALAM DOKUMEN FBC SECARA LENGKAP, AKURAT, DAN INFORMATIF 4. TELAAHAN OUTSTANDING ISSUE DALAM DOKUMEN FBC SECARA LENGKAP DAN AKURAT	-	-
JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	-	1. DOKUMEN PERJANJIAN KPB YANG IMPLEMENTATIF DAN SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU 2. SK MENTERI PUPR TENTANG TIM KPB PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN YANG MEMANFAATKAN INFRASTRUKTUR BENDUNGAN YANG DIBENTUK SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU	1. SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGADAAN BADAN USAHA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR YANG SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, AKURAT, DAN TERSELESAIKAN SECARA TEPAT WAKTU
JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	-	1. DOKUMEN PENGADAAN YANG IMPLEMENTATIF DAN SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU 2. SK MENTERI PUPR TENTANG PANITIA PENGADAAN BADAN USAHA KPB PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN YANG MEMANFAATKAN INFRASTRUKTUR BENDUNGAN YANG DIBENTUK SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU	-
JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	1. TELAAHAN ASPEK HUKUM DAN KELEMBAGAAN DOKUMEN FBC SECARA LENGKAP, AKURAT, DAN INFORMATIF 2. TELAAHAN DOKUMEN LARAP SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU 3. TELAAHAN BENTUK KERJA SAMA DALAM DOKUMEN FBC SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU 4. KONSEP KONSULTASI PASAR (MARKET CONSULTATION) YANG INFORMATIF DAN MARKETABLE	-	-
JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	1. TELAAHAN ASPEK EKONOMI DAN RISIKO DALAM DOKUMEN FBC SECARA LENGKAP, AKURAT, DAN INFORMATIF 2. TELAAHAN DUKUNGAN PEMERINTAH DALAM DOKUMEN FBC SESUAI PERATURAN/ KETENTUAN YANG BERLAKU 3. KONSEP PENYEDIAAN RUANG DATA DAN INFORMASI YANG INFORMATIF	-	-
JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	-	1. DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN YANG LENGKAP DAN SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU	-
JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	-	1. DOKUMEN PENGEMBANGAN DATA ROOM KPB BIDANG SUMBER DAYA AIR BERBASIS WEB SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU	-

MATRIK PEMBAGIAN PERAN HASIL

NAMA DAN JABATAN PEGAWAI	INTERMEDIATE OUTCOME / PRODUK DAN/ATAU LAYANAN TIM KERJA PADA BIDANG TUGAS PEMANTAUAN DAN EVALUASI DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	
EKO SUPARTONO KBT PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR (JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA)	LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR YANG KOMPREHENSIF	LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR YANG SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
INDAH PRATIWI SKBT EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR (JF PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA)	1. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR SECARA BERKALA DAN MENYELURUH 2. PENYUSUNAN PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BENDUNGAN MELALUI SKEMA KPBU SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU 3. PENYEDIAAN INFORMASI KPBU SEKTOR SUMBER DAYA AIR MELALUI MEDIA INTERNAL DIREKTORAT PPISDA SECARA LENGKAP, INFORMATIF, DAN MENARIK	1. PENYIAPAN DATA DAN INFORMASI KINERJA DIREKTORAT PPISDA SECARA AKURAT, MUTAKHIR, DAN INFORMATIF 2. PENYUSUNAN REKOMENDASI YANG IMPLEMENTATIF UNTUK PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA DIREKTORAT PPISDA
JF ANALIS KERJA SAMA	-	1. TELAAHAN REALISASI PENCAPAIAN KINERJA DIREKTORAT PPISDA TERHADAP TARGET YANG DITETAPKAN SECARA BULANAN SECARA LENGKAP DAN INFORMATIF 2. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT PPISDA SECARA AKURAT 3. TELAAHAN ATAS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN / PERMASALAHAN KINERJA DIREKTORAT PPISDA SECARA KOMPREHENSIF
JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	1. TELAAHAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI TAHAP PERENCANAAN PEMBIAYAAN, PERSIAPAN INVESTASI, DAN PERSIAPAN LELANG INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR SECARA KOMPREHENSIF 2. PEMUTAKHIRAN DATA DAN INFORMASI KPBU SEKTOR SUMBER DAYA AIR PADA APLIKASI <i>MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM</i> YANG DILAKUKAN SECARA BERKALA 3. KONSEP PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BENDUNGAN MELALUI SKEMA KPBU PADA TAHAP PERENCANAAN, PERSIAPAN, TRANSAKSI DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN YANG DISUSUN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG BERLAKU 4. KONSEP MEDIA INTERNAL DIREKTORAT PPISDA YANG MENARIK DAN INFORMATIF	-

MATRIK PEMBAGIAN PERAN HASIL

NAMA DAN JABATAN PEGAWAI	INTERMEDIATE OUTCOME / PRODUK DAN/ATAU LAYANAN TIM KERJA PADA SUBBAGIAN TATA USAHA DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR					
KASUBBAG TATA USAHA	1. PEMELIHARAAN BMN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PPISDA SECARA BERKALA	1. LAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN YANG AKUNTABEL	1. DATA DAN INFORMASI PEGAWAI YANG AKURAT, LENGKAP DAN MUTAKHIR 2. LAYANAN ADMINISTRASI PEGAWAI YANG OPTIMAL 3. MENINGKATKAN PEMANFAATAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK (TNDE) OLEH PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PPISDA	1. LAYANAN KERUMAHTANGGAAN YANG OPTIMAL 2. LAYANAN ADMINISTRASI TANGGAP DARURAT BENCANA COVID-19 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PPISDA TERKELOLA DENGAN BAIK	1. ARSIP AKTIF DAN INAKTIF DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PPISDA TERDOKUMENTASI DENGAN BAIK	1. LAYANAN ADMINISTRASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN DI DIREKTORAT PPISDA TERLAKSANAAN DENGAN BAIK
PENGELOLA DOKUMENTASI	1. DATA HASIL PEMELIHARAAN BMN YANG LENGKAP DAN AKURAT	1. DATA HASIL PENGELOLAAN ANGGARAN YANG LENGKAP DAN AKURAT 2. BERKAS PELAKSANAAN ANGGARAN YANG AKUNTABEL	1. DATA DAN INFORMASI PEGAWAI YANG AKURAT, LENGKAP DAN MUTAKHIR 2. LAYANAN ADMINISTRASI PEGAWAI YANG OPTIMAL 3. MENINGKATKAN PEMANFAATAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK (TNDE) OLEH PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PPISDA	1. DATA PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN / KERUMAHTANGGAAN YANG LENGKAP DAN AKURAT 2. PELAKSANAAN PENANGGAPAN COVID-19 TERDOKUMENTASI DENGAN BAIK	1. DATA PENGELOLAAN ARSIP YANG TERDOKUMENTASI DENGAN BAIK	1. DATA HASIL PELAKSANAAN PENGENDALIAN INTERN DI DIREKTORAT PPISDA TERLAKSANAAN DENGAN BAIK

Tabel 2.8 Pohon Kinerja Direktorat PPISDA



BAB

3

- ⇒ **SUMBER Daya MANUSIA**
- ⇒ **SARANA dan PRASARANA**
- ⇒ **Dipa**

Kapasitas Organisasi

Dalam rangka mewujudkan sasaran kegiatan yang telah diamanatkan dalam Renstra Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, dibutuhkan sumber daya yang harus dapat berkolaborasi dan saling melengkapi. Ada 3 golongan sumber daya yang masuk dalam kapasitas organisasi ini, yaitu 1). Sumber daya manusia yang dapat melaksanakan tugas ; 2). Sarana dan Prasarana ; dan 3). Anggaran yang telah disediakan untuk dikelola.

3.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Usaha Pemerintah dalam mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, maka diperlukan Pegawai Negeri sebagai unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Pokok-Pokok Kepegawaian juga disebutkan dalam undang-undang di maksud di mana perlu mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme .

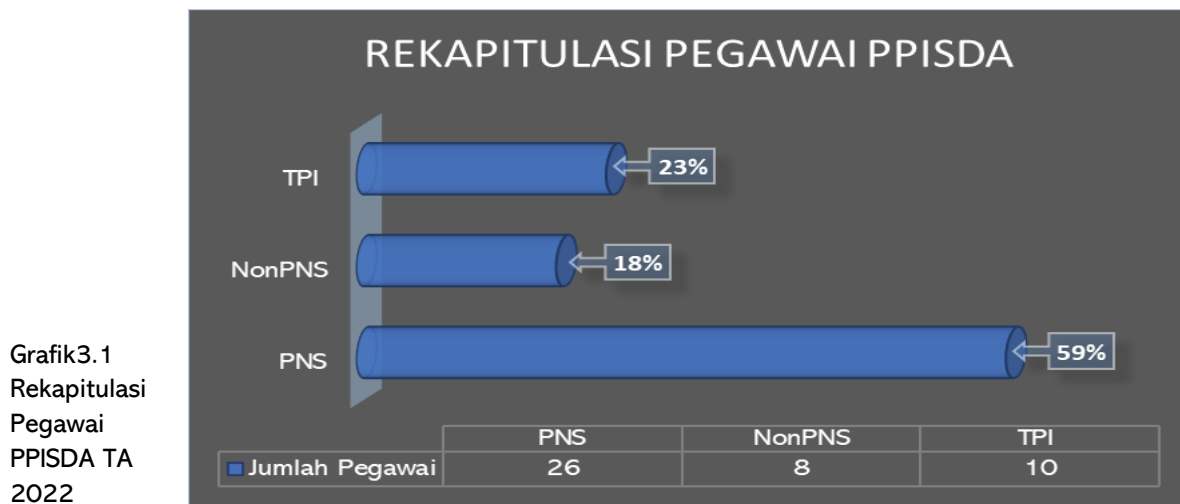
Dalam mencapai tujuan di atas, dibutuhkan sebuah sistem untuk pengelolaan pegawai Negeri sipil yang disebut “Manajemen Pegawai Negeri Sipil”. Manajemen Pegawai Negeri Sipil merupakan keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian.

Pada dasarnya, sumber daya manusia merupakan penunjang keberhasilan dalam mencapai tujuan apabila mencukupi dari sisi jumlah, kualitas, dan professional dibidangnya, apalagi sumber daya manusia yang dimiliki mempunyai motivasi tinggi, kreatif dan mampu mengembangkan inovasi, maka pencapaian kinerja akan semakin baik. Sebagai upaya perbaikan untuk pengembangan sumber daya manusia, perlu

dilakukan penyusunan roadmap pengembangan sumber daya manusia dengan terencana dan terstruktur. Hal demikian selaras dengan amanat Presiden Joko Widodo agar pada Pegawai Negeri Sipil membudayakan core value Aparatur Sipil Negara (ASN), BerAKHLAK yang merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai dasar ini diharapkan mampu menciptakan generasi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki semangat berkarya, berkualitas serta profesional dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

3.1.1 Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Status Pegawai

Direktorat PPISDA membutuhkan dukungan sumber daya manusia untuk mencapai target kinerjanya. Jumlah pegawai di lingkungan Direktorat PPISDA pada tahun anggaran 2022 sebanyak 44 orang. Terdiri dari 26 orang PNS, 8 Non PNS/Tenaga Penunjang, 10 Tenaga Pendukung Individual. Berikut ini tabel dan grafik Persentasi Pegawai beserta daftar nama Pegawai Direktorat PPISDA TA. 2022 sebagai berikut :



Dari rekapitulasi tersebut diperoleh informasi bahwa terdapat 2 (dua) Eselon III yaitu Kepala Sub Sudirektorat Legalisasi Rencana Investasi dan Kepala Sub Sudirektorat Koordinasi Kerjasama Investasi. Kemudian, terdapat 1 (satu) Koordinator Bidang Tugas (KBT) Pemantauan dan Evaluasi PPISDA dan 5 Sub Koordinator Bidang Tugas (SKBT) yaitu SKBT Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, SKBT Penyiapan Insvestasi Sumber Daya Air, SKBT Dukungan dan Penyiapan Transaksi Infrastruktur Sumber Daya Air, SKBT Pendampingan dan Transaksi Infrastruktur Sumber Daya Air dan SKBT Pelaporan dan Evaluasi Direktorat PPISDA.

NO	NAMA PEGAWAI	L/P	NIP	JABATAN
1	Ir. Arvi Argyantoro, MA	L	196409121991031002	Direktur PPISDA
SUB SUDIREKTORAT LEGALISASI RENCANA INVESTASI				
2	Acep Atmaja, S.ST., MT.	L	196603171990091001	Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi
3	Ika Agus Pawiyarti, ST	P	198408132009122002	SKBT Program Dan Anggaran PPISDA/ Analis Kebijakan Ahli Muda
4	Arif Widiyanto, SE	L	198510182009121002	SKBT Penyiapan Investasi PPISDA/ Analis Kebijakan Ahli Muda
5	Ethana Rahmaini Putri W, SE	P	199407232019032009	Analis Kebijakan Pertama
6	Saufika Hanjani, S.Tr.M	P	199604212019032011	Analis Kebijakan Pertama
7	Luqman Afif Khairuddin, S.ST	L	199412042019031006	Analis Kebijakan Pertama
8	Yuni Arta Brilliani, S.AB., M.B.A.	P	199506092020122008	Analis Kebijakan Pertama
9	Fajar Abdiansyah, SE., M.E.	L	198912162020121003	Analis Kebijakan Pertama
10	Putri Irina Mayang Sari, S.E., M.Si	P	199006282020122005	Analis Kebijakan Pertama
11	Berny Valayo, S.Kom	L	H05041983092018001	Penyusunan Monev dan Pelaporan
12	Esa Agung Hartono, SH	L	H18041980092018001	Penelaah Kebijakan
13	Muhammad Hardyan P, S.Ars.	L	-	Tenaga Pendukung Individual (TPI)
14	Reynard Nathaniel, ST	L	-	Tenaga Pendukung Individual (TPI)
15	Rasty Hikmahwaty	P	-	Tenaga Pendukung Individual (TPI)
16	Ulqi Hibar Nadiyah	P	-	Tenaga Pendukung Individual (TPI)
SUB SUDIREKTORAT KOORDINASI KERJASAMA INVESTASI				
17	Arfin, ST, MT	L	197006111998031003	Kasubdit Koordinasi Kerjasama Investasi

18	Nanik Yulia Widiyanti, S.E.I	P	198007272008022003	SKBT Penjajakan Minat Pasar dan Konsultasi Publik PPISDA/ Analisis Kebijakan Ahli Muda
19	Ishaq Al Kindy, ST	L	198311032009121001	SKBT Penyiapan Pengadaan Badan Usaha PPISDA/ Analisis Kebijakan Ahli Muda
20	Muchlis Ahmad Tri S, S.Si	L	199212022018021001	Teknik Pengairan Ahli Pertama
21	Dahwin Ferry Harahap, SE	L	199204282019031007	Analisis Kebijakan Pertama
22	Dias Shinta Devi, S.Tr.M	P	199604182019032010	Analisis Kebijakan Pertama
23	Achmad Sofwan, S.E, M.Sc	L	198810292020121001	Analisis Kebijakan Pertama
24	Christy Januari Sinurya, M.Si	p	199101172020122003	Analisis Kebijakan Pertama
25	Restu Wahyuni, S.E., M.B.A.	P	199301042020122005	Analisis Kebijakan Pertama
26	Fatoni Imam Wibowo, S.E., M.M.	L	199501232020121004	Analisis Kebijakan Pertama
27	Neny Febriyanti	P	-	Tenaga Pendukung Individual (TPI)
28	Ganis Erlia Angesti, SE	P	--	Tenaga Pendukung Individual (TPI)
29	R.A.Khoiri Lulu Najmi	P	-	Tenaga Pendukung Individual (TPI)
30	Elwin Zanur, S.Sos	L	-	Tenaga Pendukung Individual (TPI)
31	Dwiki Hermawan, S.Si	L	-	Tenaga Pendukung Individual (TPI)
32	Taufik Akbar	L	-	Tenaga Pendukung Individual (TPI)
SUB TATA USAHA				
33	Dwi Hanani Setyawati, SE	P	196706221997032001	Kasubag Tata Usaha
34	Suryanto	L	198004032009111001	Pengelola Dokumentasi
35	Vamella Yunny C, SH, MH	P	H21061992092018001	Penelaah Kebijakan
36	Fiyandi Ardiyansyah, SE,Sy	L	H27111984062018001	Penelaah Tata Naskah
37	Syafaat Arbianto	L	E10051988092018001	Penelaah BMN

38	Anjar Wahyu Putra	L	H18101991092018001	Pengemudi
39	Irma Susanti	p	H22061981092018002	Pramubakti
40	Nurwanto	L	E05121975062018001	Pramubakti
KOORDINATOR				
41	Eko Supartono, SST, M.Si	L	196407011987031001	KPT Pemantauan Investasi PPISDA/ Analis Kebijakan Ahli Madya
42	Indah Pratiwi, S.Sos, M.Si	P	198204022008012018	SKBT Evaluasi dan Pelaporan PPISDA/ Pranata Humas Ahli Muda
43	Nurul Fauzia, MM	P	198103112009122001	Analis Kerjasama
44	Nurul Qolbi, S.E., M.Sc.	P	199210312020122003	Analis Kebijakan Pertama

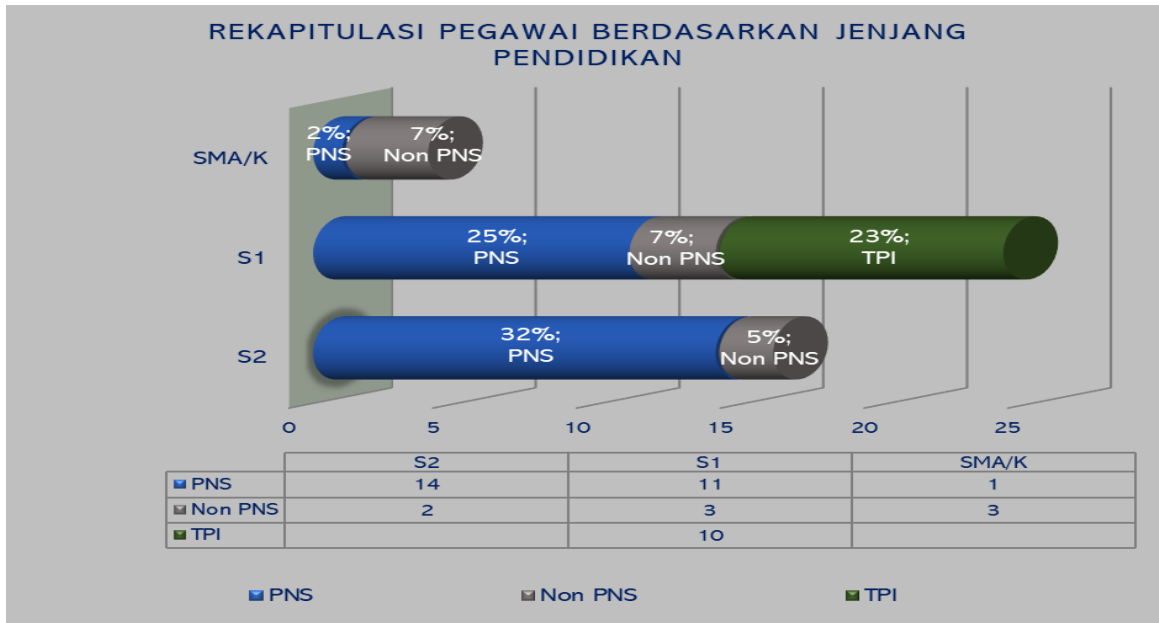
Tabel 3.1 Daftar Pegawai PPISDA TA 2022

Amanat Presiden Joko Widodo: “agar pada Pegawai Negeri Sipil membudayakan core value Aparatur Sipil Negara (ASN), BerAKHLAK yang merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif”

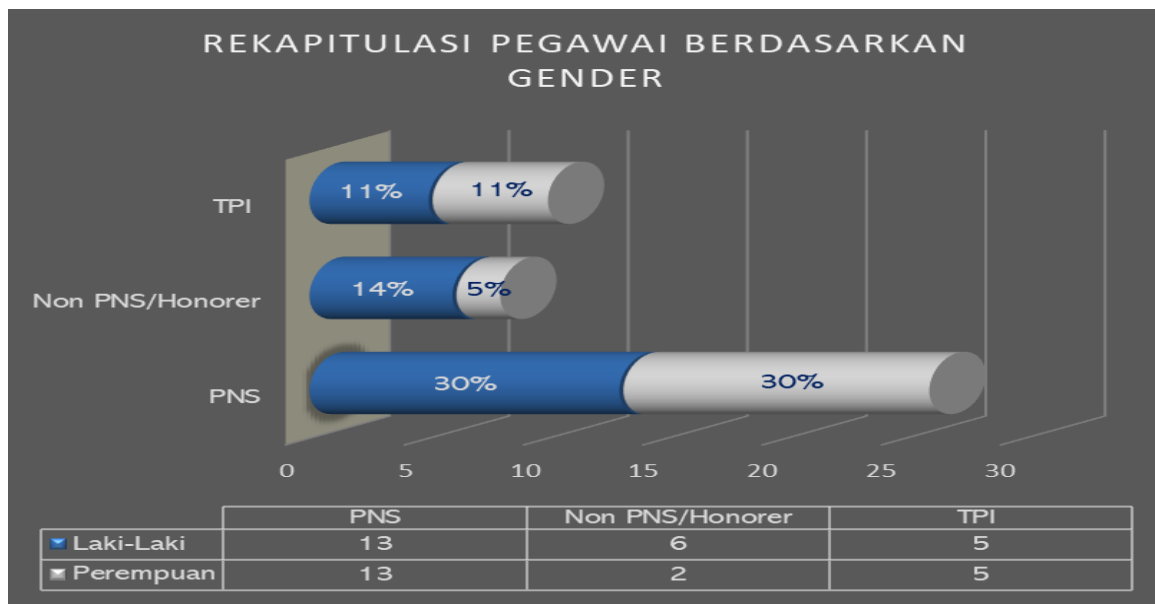
3.1.2 Rekapitulasi Pegawai berdasarkan penggolongan Lainnya

Rekapitulasi pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat PPISDA berdasarkan Jenjang Pendidikan, Gender, Usia, jabatan dapat dilihat pada grafik dan tabel yang ada berikut.

Berdasarkan grafik 3.2, Pengelompokan pegawai berdasarkan jenjang pendidikan. Total 44 jumlah pegawai terdiri dari: 14 orang PNS memiliki jenjang Pendidikan S2 setara dengan 32%, 11 orang PNS memiliki jenjang Pendidikan S1 setara dengan 25% dan 1 orang PNS memiliki jenjang Pendidikan SMA setara dengan 2%. Untuk pegawai Non PNS yang biasa lebih dikenal dengan sebutan honorer, 2 orang memiliki jenjang Pendidikan S2 setara dengan 5%, 3 orang memiliki jenjang Pendidikan S1 setaradengan 7% dan 3 orang memiliki jenjang Pendidikan SMA setara dengan 7%. Tenaga Pendukung Individual berjumlah 10 orang yang, kesemuanya memiliki jenjang Pendidikan S1 jika dipresentasikan sebesar 23%



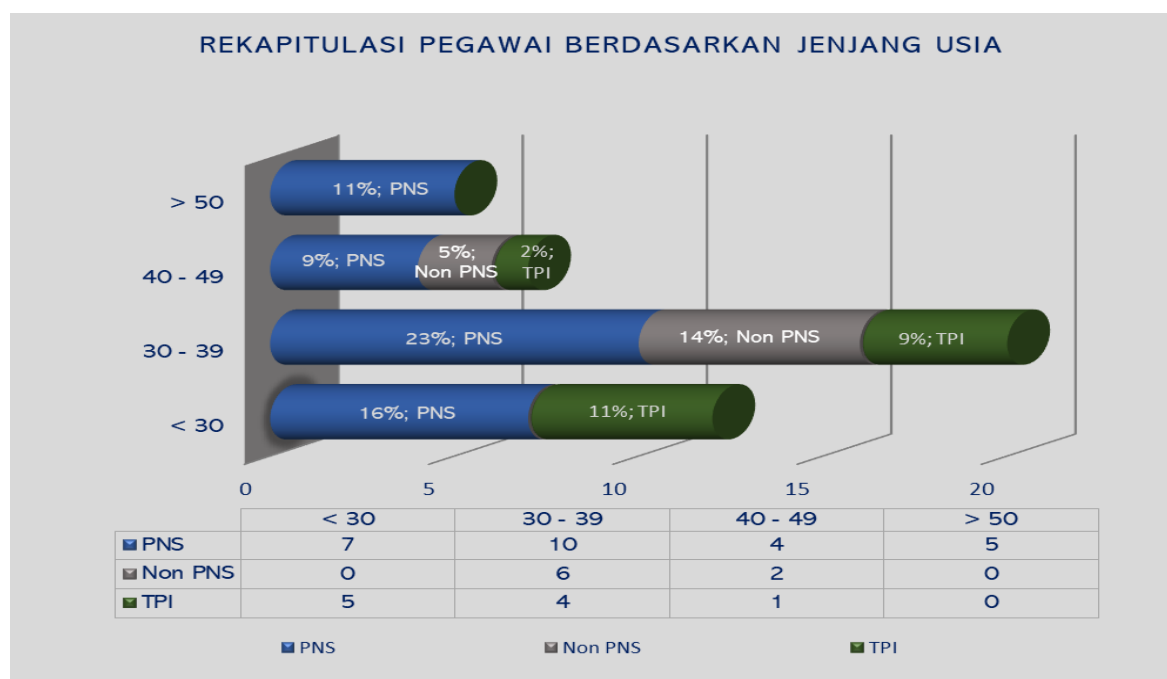
Grafik 3.2 Rekapitulasi pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan



Grafik 3.3 Rekapitulasi pegawai berdasarkan Jenjang Gender

Pada grafik 3.3, Pengelompokan pegawai berdasarkan gender. Total 44 jumlah pegawai terdiri dari: PNS perempuan sebanyak 13 orang (30%), sementara PNS laki-laki sebanyak 13 orang (30%). Untuk Pegawai Non PNS/ Honorer Perempuan sebanyak 2 orang (5%), sedangkan untuk pegawai non PNS laki-laki sebanyak 6 orang (14). Tenaga Penunjang Individual (TPI) perempuan berjumlah 5 orang (11%) dan Tenaga Penunjang Individual (TPI) laki-laki berjumlah 5 orang (11%).

Pada grafik 3.4, Pengelompokan pegawai berdasarkan usia. Total 44 jumlah pegawai terdiri dari: PNS yang berusia 50 tahun keatas sebanyak 5 orang (11%), PNS yang rentang usianya 40-49 tahun sebanyak 4 orang (9%), PNS yang rentang usianya 30-39 tahun sebanyak 10 orang (23%), sementara PNS yang usianya dibawah 30 tahun sebanyak 7 orang (16%). Untuk Pegawai Non PNS/Honorer yang berusia 50 tahun keatas tidak ada, pegawai non PNS yang rentang usianya 40-49 tahun sebanyak 2 orang (5%), pegawai non PNS yang rentang usianya 30-39 tahun sebanyak 6 orang (14%), pegawai non PNS yang usianya dibawah 30 tahun tidak ada. Tenaga Penunjang Individual (TPI) yang berusia 50 tahun keatas tidak ada, Tenaga Penunjang Individual (TPI) yang rentang usianya 40-49 tahun sebanyak 1 orang (2%), Tenaga Penunjang Individual (TPI) yang rentang usianya 30-39 tahun sebanyak 4 orang (9%), Tenaga Penunjang Individual (TPI) yang usianya dibawah 30 tahun 5 orang (11%).



Grafik 3.4 Rekapitulasi Pegawai Jenjang Usia

Berikut ini merupakan tabel Rekapitulasi PNS berdasarkan Jabatan Fungsional:

No	Nama Jabatan	Jumlah Pegawai
Jabatan Struktural		
1	Direktur	1
2	Kepala Sub-Direktorat Legalisasi Rencana Investasi	1
3	Kepala Sub-Direktorat Koordinasi Kerjasama Investasi	1
4	Kepala Subbag Tata Usaha	1

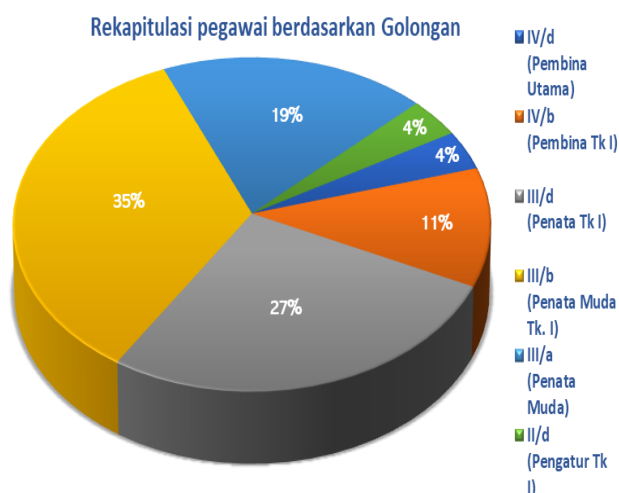
	Jabatan Fungsional	
1	Analisis Kebijakan Ahli Madya	1
2	Analisis Kebijakan Ahli Muda	4
3	Pranata Humas Ahli Muda	1
4	Teknik Pengairan Ahli Pertama	1
5	Analisis Kebijakan Pertama	13
6	Analisis Kerjasama	1
7	Pengelola Dokumentasi	1

Tabel 3.2 Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Jabatan Fungsional

Jika melihat pada tabel 3.2, jumlah jabatan fungsional terbanyak pada Direktorat PPISDA adalah analisis kebijakan sebanyak 18 orang pada seluruh tingkat jabatan. Pada tingkat jabatan ahli madya berjumlah 1 orang. Sedangkan pada tingkat jabatan ahli muda berjumlah 4 orang. Pada tingkat jabatan ahli pertama berjumlah 13 orang. Jabatan fungsional lainnya diantaranya pranata humas ahli muda, pengairan ahli pertama. Sedangkan jabatan fungsional lainnya yang dijabat oleh pegawai di lingkungan Direktorat PISDA satu pegawai yang mengemban jabatan fungsional umum dengan nama analisis kerja sama dan pengelola dokumentasi.

No	Golongan	Σ Pegawai
1	IV/D (Pembina Utama)	1
2	IV/B (Pembina Tk I)	3
3	III/D (Penata Tk I)	7
4	III/B (Penata Muda Tk. I)	9
5	III/A (Penata Muda)	5
6	II/D (Pengatur Tk I)	1
TOTAL		26

Tabel 3.3
Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Golongan



Grafik 3.5
Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Golongan

Pada tabel 3.3 dan grafik 3.5, pengelompokan pegawai berdasarkan golongan. Total PNS sebanyak 26 orang. Untuk golongan IVD sebanyak 1 orang (4%), golongan IVB sebanyak 3 orang (11%), golongan IID sebanyak 7 orang (27%), golongan IIIB sebanyak 9 orang (35%), golongan IIIA sebanyak 5 orang (19%) dan golongan IID sebanyak 1 orang (4%).

3.1.3 Analisis Kebutuhan Pegawai

Selama tahun Anggaran 2022, dalam melaksanakan tugasnya Direktorat PPISDA masih membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat PPISDA. Hal ini guna mendukung pencapaian target kinerja yang lebih maksimal. Berikut ini tabel pemetaan kebutuhan pegawai Direktorat PPISDA selama tahun Anggaran 2022:

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KEBUTUHAN	BAZZETTING	FORMASI	%
I	SUB DIREKTORAT KOORDINASI LEGALISASI RENCANA INVESTASI				
A	SKBT Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air				
1	Analisis Kebijakan Ahli Muda / Analisis Pembiayaan Infrastruktur Ahli Muda	1	1	0	0%
2	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	2	3	1	50%
4	Analisis Anggaran Ahli Pertama	1	0	1	100%
5	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Ahli Pertama	2	0	2	100%
6	Teknik Pengairan Ahli Pertama	2	1	1	50%
7	Analisis Perencanaan (Non PNS)	1	1	0	0%
8	Penelaah Pengelolaan Sumber Daya Air (Non PNS)	1	1	0	0%
	SUB TOTAL	10	7	3	72%
B	Subkoordinator Bidang Tugas Penyiapan Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air				
1	Analisis Kebijakan Ahli Muda / Analisis Pembiayaan Infrastruktur Ahli Muda	1	1	0	0%
2	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	3	3	0	0%
4	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Ahli Pertama	2	0	2	100%
5	Teknik Pengairan Ahli Pertama	2	0	2	100%
6	Penelaah Kebijakan (Non PNS)	1	1	0	0%
7	Penelaah Pengelolaan Sumber Daya Air (Non PNS)	1	1	0	0%
8	Penelaah Bangunan Gedung dan Perumahan (Non PNS)	1	1	0	0%
	Sub Total	11	7	4	63%
II	SUBDIREKTORAT KOORDINASI KERJASAMA INVESTASI				
A	SKBT Dukungan dan Penyiapan Transaksi Infrastruktur Sumber Daya Air				
1	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	1	0	0
2	Teknik Pengairan Ahli Pertama	1	1	0	0
3	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	2	2	0	0

4	Analisis Kerjasama	1	0	1	100%
5	Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan	2	0	2	100%
6	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	1	0	1	100%
	Sub Total	8	4	2	25%
B	Subkoordinator Bidang Tugas Pendampingan dan Transaksi Infrastruktur Sumber Daya Air				
1	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	1	0	0%
2	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	4	4	0	0%
3	Teknik Pengairan Ahli Pertama	1	0	1	100%
4	Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan	1	0	1	100%
5	Analisis Kerjasama	1	0	1	100%
	Sub Total	8	5	3	38%
III	KOORDINATOR BIDANG TUGAS KOORDINATOR BIDANG TUGAS PEMANTAUAN DAN EVALUASI				
1	Analisis Kebijakan Ahli Madya	1	1	0	0%
2	Pranata Humas Ahli Muda	1	1	0	0%
3	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	2	1	1	50%
4	Teknik Pengairan Ahli Pertama	2	0	2	100%
5	Pembiayaan Infrastruktur Ahli Pertama	2	0	2	100%
6	Analisis Kerjasama	1	1	0	0%
	Sub Total	9	4	5	56%
III	SUBBAGIAN TATA USAHA				
1	Arsiparis Ahli Pertama	1	0	1	100%
2	Arsiparis Terampil	1	0	1	100%
3	Analisis Kepegawaian Terampil	2	0	2	100%
4	Pranata Keuangan APBN	2	0	2	100%
5	Penata Laksana Barang Terampil	2	0	2	100%
	Sub Total	8	0	8	100%
Grand Total		54	27	25	46%

Tabel 3.4 Pemetaan Kebutuhan Pegawai Direktorat PPISDA

Pada tabel 3.4 pemetaan kebutuhan pegawai Direktorat PPISDA dapat dilihat, jumlah kebutuhan pegawai, jumlah pegawai yang ada saat ini dan formasi pegawai yang masih kosong dari masing-masing bagian dilingkungan Direktorat PPISDA. Jika dilihat dari kebutuhan jafung di tiap bagian, rata-rata kebutuhan pegawai sesuai jafung sebesar 100 %, yang artinya beberapa bagian masih ada formasi yang belum terisi. mencukupi

kebutuhan pegawai yang sesuai dengan jafung yang dibutuhkan. Namun jika berdasarkan dari total keseluruhan pegawai, kebutuhan pegawai Direktorat PPISDA sebesar 46% dari total kebutuhan pegawai sebesar 54 pegawai.

3.1.4 Peningkatan Kualitas SDM

Pada dasarnya, sumber daya manusia merupakan penunjang keberhasilan dalam mencapai tujuan apabila mencukupi dari sisi jumlah, kualitas, dan professional dibidangnya, apalagi sumber daya manusia yang dimiliki mempunyai motivasi tinggi, kreatif dan mampu mengembangkan inovasi, maka pencapaian kinerja akan semakin baik. Sebagai upaya perbaikan untuk pengembangan sumber daya manusia, selama tahun 2022 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air telah mengikut sertakan pegawainya untuk mengikuti beberapa pendidikan dan pelatihan. Berikut ini daftar pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan selama tahun Anggaran 2022:

NO	NAMA PEGAWAI	JENIS DIKLAT
1	Nanik Yulia Widiyanti, S.E.I	a. Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah & Sertifikasi PBJ Dasar b. Training Hydropower Sustainability Standard
2	Ishaq Al Kindy, ST	a. Pelatihan Financial Modelling KPBU Sektor Sumber Daya Air b. Course Certified PPP Professional (CP3P©) – Execution c. Training Hydropower Sustainability Standard
3	Achmad Sofwan, S.E., M.Sc.	a. Growing Infrastructure: Enabling & Structuring for Private Sector Participation in Finance & Innovation Module 1 b. Pelatihan Financial Modelling KPBU Sektor Sumber Daya Air c. Growing Infrastructure: Enabling & Structuring for Private Sector Participation in Finance & Innovation Module 2 d. Pelatihan Pelaksanaan Anggaran
4	Christy J. Sinuraya, S.E., M.Si.	Pelatihan Financial Modelling KPBU Sektor Sumber Daya Air
5	Restu Wahyuni, S.E., M.B.A.	a. Pelatihan Financial Modelling KPBU Sektor Sumber Daya Air b. Developing Better Infrastructure Business Cases-APMG Accredited Foundation Training Course c. Policy Camp: Policy Brief Mendukung Akselerasi Pembangunan Infrastruktur PUPR

		d. Pelatihan Pembiayaan Perumahan
6	Fatoni Imam Wibowo, S.E., M.M.	a. Pelatihan Financial Modelling KPBU Sektor Sumber Daya Air b. Pelatihan Pelaksanaan Anggaran c. Developing Better Infrastructure Business Cases-APMG Accredited Foundation Training Course
7	Muchlis Ahmad Tri S., S.Si.	a. Course Certified PPP Professional (CP3P©) – Execution b. Training ESG Manual
8	Dahwin Fery Harahap, S.E.	a. Pelatihan Financial Modelling KPBU Sektor Sumber Daya Air b. Course Certified PPP Professional (CP3P©) – Execution
9	Dias Shinta Devi, S.Tr.M	a. Growing Infrastructure: Enabling & Structuring for Private Sector Participation in Finance & Innovation Module 1 b. Pelatihan Financial Modelling KPBU Sektor Sumber Daya Air c. Growing Infrastructure: Enabling & Structuring for Private Sector Participation in Finance & Innovation Module 2 d. Training ESG Manual e. Training Hydropower Sustainability Standard
10	Taufik Akbar, S.E	Pelatihan Financial Modelling KPBU Sektor Sumber Daya Air
11	Indah Pratiwi, S.Sos., M.Si.	Pelatihan Financial Modelling KPBU Sektor Sumber Daya Air
12	Nurul Qolbi, S.E., M.Sc.	a. Growing Infrastructure: Enabling & Structuring for Private Sector Participation in Finance & Innovation Module 1 b. Pelatihan Financial Modelling KPBU Sektor Sumber Daya Air c. Growing Infrastructure: Enabling & Structuring for Private Sector Participation in Finance & Innovation Module 2 d. Pelatihan Pembiayaan Perumahan
13	Neny Febriyanti, S.E.	Pelatihan Financial Modelling KPBU Sektor Sumber Daya Air

Tabel 3.5 Daftar Pegawai yang mengikuti diklat selama tahun anggaran 2022



Rapat evaluasi Penyiapan KPBU TA 2022 dan Percepatan Pelaksanaan KPBU Sektor SDA TA 2023

3.2 SARANA DAN PRASANA

Sarana dan prasarana merupakan alat penunjang keberhasilan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi demi tercapainya kinerja sesuai dengan target. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap unit organisasi/kerja. Apabila sarana dan prasana tidak tersedia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka seluruh kegiatan yang dilakukan tidak akan bisa mencapai hasil sesuai yang di harapkan. Berikut ini adalah Sarana dan Prasaran yang tersedia di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Pembiayaan Infrastruktur SDA.

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	Jumlah	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI
1	3050104001	Lemari Besi/Metal	11	2007, 2020	Baik
2	3050104004	Rak Kayu	1	2021	Baik
3	3050104005	Filing Cabinet Besi	14	2007, 2017, 2019	Baik
4	3050105015	Alat Penghancur Kertas	3	2011	Rusak Ringan, Rusak berat
5	3050105048	LCD Projector/Infocus	2	2015, 2018	Baik
6	3050105053	Acces Control System	1	2015	Baik
7	3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	2018	Baik
8	3050201002	Meja Kerja Kayu	29	2017, 2019, 2020	Baik, Rusak Ringan
9	3050201003	Kursi Besi/Metal	2	2021	Baik
10	3050201008	Meja Rapat	2	2019, 2021	Baik
11	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	43	2017, 2019, 2021	Baik, Rusak Ringan
12	3050201026	Nakas	1	2018	Baik
13	3050201027	Cubikal	25	2020	Baik
14	3050201999	Meubelair Lainnya	2	2021	Baik
15	3050203005	Air Cleaner	1	2020	Baik
16	3050204002	A.C. Sentral	5	2016	Baik
17	3050204004	A.C. Split	6	2016	Baik
18	3050204007	Exhause Fan	3	2016, 2017	Rusak Ringan
19	3050206002	Televisi	3	2017, 2019, 2021	Baik
20	3060102128	Camera Digital	1	2019	Baik
21	3060102165	Camera Conference	1	2020	Baik
22	3100102001	P.C Unit	1	2020	Baik

23	3100102003	Note Book	5	2015, 2017, 2021, 2022	Baik
24	3100102009	Tablet PC	1	2018	Baik
25	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	2015, 2019, 2020	Baik
26	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	2017, 2020	Baik
27	3100204026	Access Point	1	2017	Rusak Berat

Tabel 3.6 Daftar Rekapitulasi Hasil Inventarisasi BMN TA 2022



3.3 DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN

Pada awal tahun anggaran 2022, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air memiliki anggaran sebesar Rp 11.250.000.000,00 (ebelas Milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah) sesuai DIPA NOMOR : SP DIPA-033.16.1.631003/2022 tanggal 17 November 2020. Selama tahun anggaran 2022 Direktorat PPISDA mengalami revisi DIPA selama 4 x. Berikut ini tabel Kronologis Revisi DIPA tahun Anggaran 2022 Direktorat PPISDA:

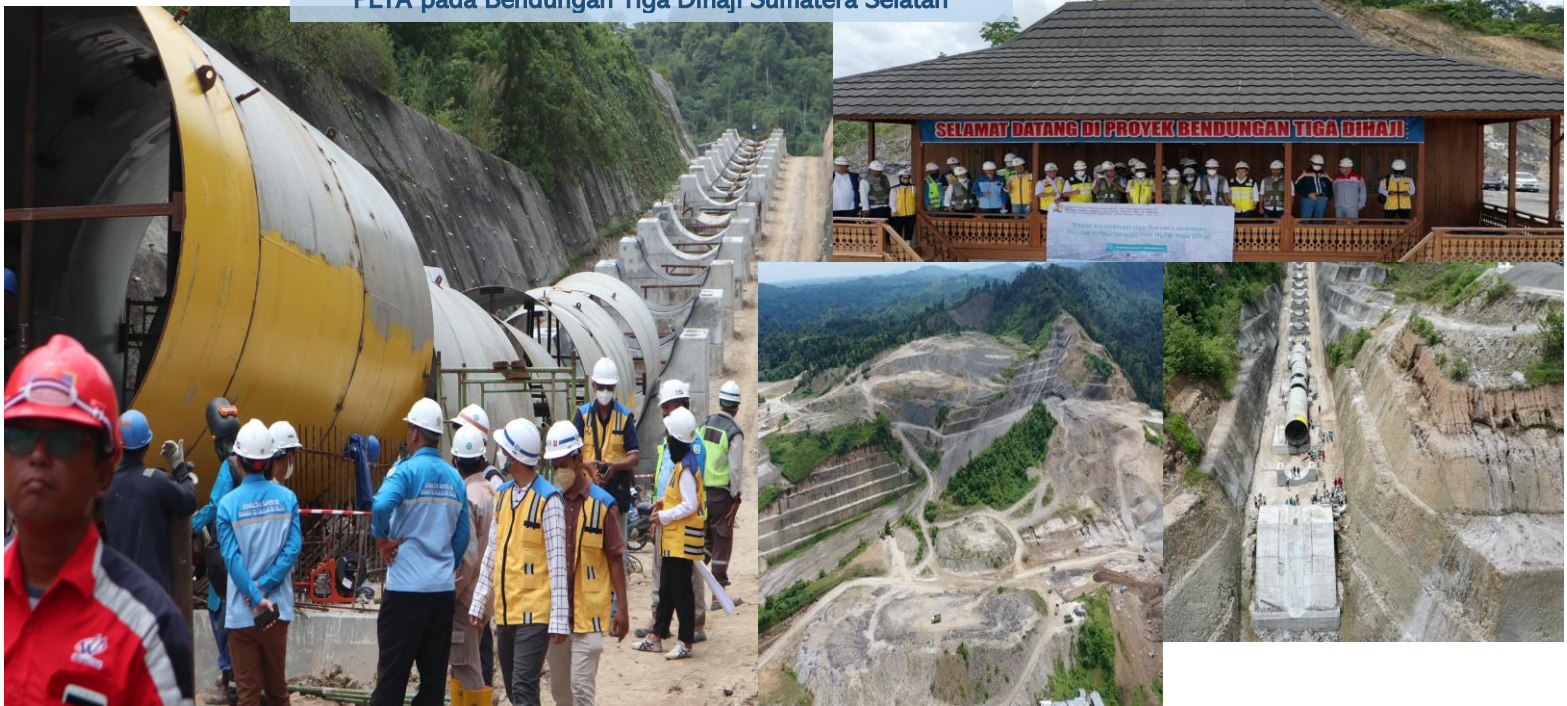
NO	History	Waktu Revisi	Pagu	Keterangan
1	DIPA Awal	17 November 2021	11.250.000.000,00	Pertama kalinya DIPA terbit
2	Revisi 1	16 Desember 2021	11.250.000.000,00	<i>Automatic Adjustment</i> oleh Kementerian Keuangan sebesar 750 juta
3	Revisi 3	27 April 2022	11.250.000.000,00	Pergeseran Anggaran antar KRO karena adanya penambahan paket kegiatan baru pada RO (EBD) pemantauan dan Evaluasi
4	Revisi 6	31 Oktober 2022	10.244.539.000,00	Optimalisasi Anggaran
5	Revisi 8	6 Desember 2022	9.494.539.000,00	Realokasi Anggaran TA 2022 yang Terblokir <i>Automatic Adjustment</i> ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebesar 750 juta

Tabel 3.7 Kronologis revisi DIPA selama TA 2022

- ⇒ Pada tanggal 17 November 2021, DIPA awal telah terbit;
- ⇒ Tanggal 16 Desember 2021 revisi dipa 1, terjadi karena adanya anggaran yang terkena automatic adjustmen oleh kementerian keuangan sebesar 750 juta. Tidak merubah pagu anggaran direktorat, karena posisi anggaran yang terkena AA masih menempel pada pagu dipa;

- ⇒ Tanggal 27 April 2022 revisi dipa 3, terjadi karena adanya pergeseran anggaran antar RO. Akibat dari anggaran EBD yang terkena AA, sehingga diusulkan 2 paket kegiatan baru pada RO EBD yang anggarannya diambilkan dari RO ABF dan AEE. Hal ini tidak mengakibatkan perubahan total pagu anggaran Direktorat PPISDA;
- ⇒ Tanggal 31 Oktober 2022 revisi dipa 6, terjadi karena adanya optimalisasi anggaran di lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur.
- ⇒ Tanggal 6 Desember 2022 revisi dipa 8, terjadi karena adanya realokasi anggaran yang terblokir (Automatic Adjustment) ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebesar 750 juta. Sehingga pagu anggaran Direktorat PPISDA sebesar Rp 9.494.539.000,00.

Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Proyek KPB
PLTA pada Bendungan Tiga Dihaji Sumatera Selatan





BAB

4

- ⇒ **CAPAIAN KINERJA**
- ⇒ **PERBANDINGAN CAPAIAN**
- ⇒ **REALISASI**
- ⇒ **EVALUASI Sakip 2021**
- ⇒ **ANALISIS Efisiensi DAN Efektifitas**

Akuntabilitas Kinerja

Laporan Kinerja merupakan salah satu wujud akuntabilitas kinerja instansi/organisasi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan.

4.1 Capaian Kinerja

Direktorat PPISDA mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air.

Target kinerja pada tahun 2022 ini merupakan tahun ke tiga periode Renstra 2020-2024. Dalam Renstra Direktorat PPISDA memiliki 1 (satu) Indikator kinerja sasaran program, yaitu: Tingkat Ketersediaan KPBUI Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif. Kemudian diturunkan ke renstra masing-masing unit kerja, Indikator kinerja pada Direktorat PPISDA.

Indikator kinerja sasaran kegiatan ini mempunyai 7 (tujuh) output, yaitu:

1. Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA
2. Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur SDA
3. Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA
4. Dukungan Kerjasama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA
5. Proyek KPBUI SDA yang di kerjasamakan
6. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan SDA
7. Kinerja Pembiayaan Infrastruktur SDA
8. Layanan Dukungan Manajemen Internal



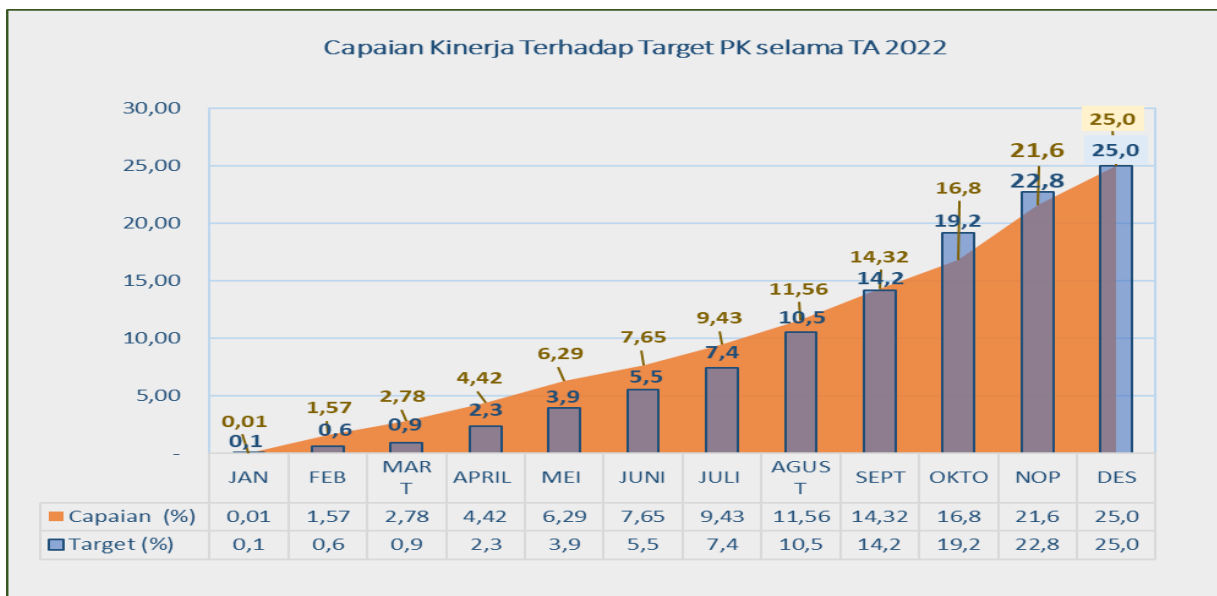
4.1.1 Capaian Kinerja atas Perjanjian Kinerja

Pencapaian Kinerja Direktorat PPISDA selama tahun anggaran 2022 berdasarkan target Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	CAPAIAN KINERJA PK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	%	25	25

Tabel 4.1. Capaian Kinerja Direktorat PPISDA berdasarkan Target Perjanjian Kinerja 2022

Secara keseluruhan, keberhasilan akan capaian kinerja Direktorat PPISDA tahun anggaran 2022 didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan, yakni tingkat pencapaian pelaksanaan penyiapan pembiayaan infrastruktur sumber daya air dengan target sebesar 25%. Pada tabel 4.1 dapat dilihat Direktorat PPISDA pada tahun anggaran 2022 ini telah mencapai targetnya yaitu sebesar 25 %. Perhitungan akan capaian kinerja tersebut telah di hitung rutin setiap bulannya dalam cascading perhitungan capaian kinerja dengan cara mengalikan capaian bulanan dengan bobot yang ada pada Renstra DJPI. Berikut ini grafik kronologis capaian kinerja Direktorat PPISDA setiap bulan disandingkan dengan target capaiannya selama tahun anggaran 2022:



Grafik. 4.1 Kronologis capaian kinerja Direktorat PPISDA selama tahun anggaran 2022

Berikut ini merupakan tabel capaian kinerja yang disandingkan dengan target renstra dan target DIPA TA. 2022 (tabel 4.2) dilanjutkan dengan carscading perhitungan capaian kinerja Direktorat PPSIDA dengan menggunakan target yang ada pada DIPA (tabel 4.3):

NO	SASARAN STRATEGIS /SASARAN PROGRAM /IKSP/SK/IKK /OUTPUTKEGIATAN /INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN		SATUAN	TARGET RENSTRA	TARGET DIPA	CAPAIAN KINERJA
				2022		
1	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA					
	1	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1
	2	Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	2	1	1
2	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur SDA					
	1	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1
3	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA					
	1	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	2	1	1
	2	Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2
4	Dukungan Kerjasama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA					
	1	Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja sama Investasi Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1
5	Proyek KPBU SDA yang di kerjasamakan					
	1	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur SDA	Dokumen	2	1	1
	2	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur SDA	Kesepakatan	2	5	5
6	NSPK Pembiayaan Infrastruktur SDA					
	1	Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur SDA	NSPK	2	-	-
7	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan SDA					
	1	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Laporan	4	4	4
8	Kinerja Pembiayaan Infrastruktur SDA					
	1	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Laporan	1	1	1

Tabel 4.2. Capaian Kinerja Direktorat PPSIDA disandingkan dengan Target Renstra dan DIPA TA 2022

Program	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Baseline 2021 (DJPI)	Target 2022 (DJPI)	KEGIATAN	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	BASELINE 2021 (PPISDA)	TARGET 2022 (PPISDA)	JENIS INDIKATOR	Metode Perhitungan	BOBOT INDIKATOR
Dukungan Manajemen	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat ketersediaan Investasi / Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	61,60%	100%	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	24,25%	25,00%	Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (%)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyediaan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air yang disusun dibandingkan dengan target	50%
				Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (%)								Jumlah Proyek KPBU Sumber Daya Air yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target	50%	


1

1

BOBOT INDIKATOR	Kode KRO	KEGIATAN RINCIAN OUPUT	RINCIAN OUPUT	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT	TARGET RENSTRA		Bobot RO	Komponen	Bobot Komponen	Sub Komponen 2022	Pagu DIPA
					VOL	SAT					
50%	ABF	KEBIJAKAN BIDANG SARANA DAN PRASARANA	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA+RR5:AH7	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA	2	RK	30%	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA	50%	Penyusunan Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA TA. 2023	500.000
				Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur SDA				Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur SDA		50%	Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA
			Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur SDA	2	RK	20%	Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur SDA	100%	Penyusunan Identifikasi dan Pipeline Proyek KPBU Bidang SDA TA. 2022	500.000
				Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA				Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA		3	RK
			Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA		Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA	40%	Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA	1.135.000			
			Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur SDA	1	RK	20%	Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur SDA	100%	Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU Brownfield Sektor SDA	500.000
										Penyusunan Evaluasi Kajian Studi Kelayakan KPBU Unsolicited Sektor SDA TA. 2022	1.060.000
50%	AEE	KEMITRAAN	Proyek KPBU SDA yang siap dikerjasamakan	JumlahPelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur SDA	2	DOK	35%	Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur SDA	60%	Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2022	823.584
				Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur SDA				Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktu SDA		40%	Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Bendungan TA. 2022
	EBD	LAYANAN MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	4	LAP	35%	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	100%	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Infrastruktur SDA Tahun 2022	500.000
										Automatic Adjusment	450.000
										Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan KPBU Sumber Daya Air Melalui Media Informasi	240.000
										Penyusunan Pengelolaan Risiko Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Infrastruktur SDA	240.000
			Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	1	LAP	30%	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	100%	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA Tahun 2022	300.000

2

2

Sub Komponen 2022	Pagu DIPA	TARGET DIPA		CAPAIAN		Judul Rekomendasi Kebijakan / Proyek / Dokumen / NSPK / Layanan (Output)	Σ Capaian Komponen		Σ Capaian Rincan Output		Σ Capaian Komposit IKK		Σ Capaian Sasaran Kegiatan 2022
		VOL	SAT	VOL	SAT		Σ	%	Σ Capaian Komponen	%	Σ	%	
Penyusunan Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA TA. 2023	500.000	1	RK	1	RK	Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA TA. 2023	1						
Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	451.416	-	-	-	-	Laporan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	-	50%	100%	30,00%			
Penyusunan Identifikasi dan Pipeline Proyek KPBU Bidang SDA TA. 2022	500.000	1	RK	1	RK	Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Identifikasi dan Pipeline Proyek KPBU Bidang SDA TA. 2022	1	50%					
Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur SDA	1.000.000	1	RK	1	RK	Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur SDA	1	100%	100%	20,0%			
Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA	1.135.000	1	RK	1	RK	Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Kajian Prastudi Kelayakan KPBU Sektor SDA 2022	1	40%					
Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU Brownfield Sektor SDA	500.000	1	RK	1	RK	Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU Brownfield Sektor SDA	1		100%	30,00%			
Penyusunan Evaluasi Kajian Studi Kelayakan KPBU Unsolicited Sektor SDA TA. 2022	1.060.000	1	RK	1	RK	Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Evaluasi Kajian Studi Kelayakan KPBU Unsolicited Sektor SDA TA. 2022	1	60%					
Penyiapan Dokumen Pengusahaan Dukungan Pemerintah dalam Pelaksanaan Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air TA. 2022	750.000	1	RK	1	RK	Rekomendasi Kebijakan Penyiapan Dokumen Pengusahaan Dukungan Pemerintah dalam Pelaksanaan Proyek KPBU Sektor SDA TA. 2022	1	100%	100%	20,0%			
Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2022	823.584	1	DOK	1	DOK	Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Infrastruktur SDA TA. 2022	1	60%					
Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Bendungan TA. 2022	1.800.000	5	KS	5	KS	1) Bendungan Bodri; 2) Pemeliharaan Bendungan Bintang Bano dan Penyediaan Infrastruktur PLTM Bintang Bano Kapasitas 6,3 MW, NTB; 3) Daerah Irigasi Komerang; 4) Revitalisasi dan Modernisasi Irigasi Sistem Interkoneksi HLD WS Lombok, NTB; 5) PLTA 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji, Sumatera Selatan.	1	40%	100%	35,00%			
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Infrastruktur SDA Tahun 2022	500.000	1	LAP	1	LAP	Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Infrastruktur SDA Tahun 2022					100,0%	50%	
Automatic Adjustment	450.000	1	LAP	1	LAP	Laporan Pengelolaan Risiko Pelaksanaan KPBU Pembiayaan Infrastruktur SDA Tahun 2022 (UPRT)							
Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan KPBU Sumber Daya Air Melalui Media Informasi	240.000	1	LAP	1	LAP	Laporan Pelaksanaan KPBU Sumber Daya Air Melalui Media Informasi	1	100%	100%	35,00%			
Penyusunan Pengelolaan Risiko Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Infrastruktur SDA	240.000	1	LAP	1	LAP	Laporan Penyusunan Pengelolaan Risiko Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Infrastruktur SDA							
Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA Tahun 2022	300.000	1	LAP	1	LAP	Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA Tahun 2022	1	100%	100%	30%			

Tabel 4.3. Cascading perhitungan Capaian Kinerja Direktorat PPISDA TA 2022

Pada tabel 4.2 terlihat perbedaan target renstra dengan target DIPA. Namun pada tahun anggaran 2022 capaian kinerja mengikuti target yang ada di DIPA, sesuai dengan anggaran DIPA yang ada pada Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Direktur PPISDA. Berikut ini rincian capaian kinerja Direktorat PPISDA selama tahun anggaran 2022 berdasarkan target DIPA: 7 Rekomendasi Kebijakan, 1 Dokumen, 5 Kesepakatan dan 5 Laporan. Sedangkan untuk capaian 5 kesepakatan tersebut terdiri dari:

1. Pemeliharaan Bendungan dan Penyediaan Infrastruktur PLTM Bintang Bano (Unsolicited)
2. Bendungan Bodri (solicited)
3. PLTA Tigadihaji (unsolicited)
4. DI Komering (unsolicited)
5. Revitalisasi Dan Modernisasi Irigasi Sistem Interkoneksi High Level Diversion (HLD) Wilayah Sungai (WS) Lombok (unsolicited)

Kelima proyek tersebut dimasukan dalam target PK Tahun 2022 dengan *Cut off* proyek yang dapat diajukan menjadi kesepakatan untuk proyek *unsolicited* dengan catatan sudah selesai Dokumen FS. Sedangkan untuk proyek *solicited* dapat diklaim dengan catatan sudah selesai FBC.

4.1.2. Capaian Kinerja per Rincian Output, Komponen dan Paket Kegiatan

Dalam DIPA Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur, terhadap capaian kinerja atas perjanjian kinerja, setiap paket kegiatan Direktorat PPISDA yang ada pada DIPA memiliki kontribusi dalam mendukung tercapainya kinerja yang ada pada perjanjian kinerja. Berikut ini penjabaran capaian kinerja per paket kegiatan:

RO.1 _PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR Sda

KOMPONEN/INDIKATOR		Target Renstra	Paket Kegiatan		Capaian	Pagu Awal	Pagu Akhir
						(dlm ribuan)	
Komponen 1	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA	1	1	Penyusunan Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA TA. 2023	1 RK	Rp 500.000,-	Rp 638.936,-
			2	Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di	1 Lap	Rp 451.416,- (Rev DIPA 2)	Rp 305.264,-

				Lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA			
Komponen 2	Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur SDA	1		Penyusunan Profil dan Identifikasi Proyek KPBU Sektor SDA	1 RK	Rp 500.000,-	Rp 495.970,-

Tabel 4.4. Target dan Capaian pada Rincian Output 1 (Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA)

RO1.K1 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SDA

Pencapaian terhadap Komponen tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan Paket kegiatan berikut ini:

⇒ Penyusunan Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2023

Judul paket kegiatan yang semula Penyusunan Rencana Kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2023 diubah menjadi Penyusunan Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2023

Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2023 tersebut bertujuan untuk menyusun Rencana Kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2023 dan menyusun Laporan Penyusunan Bahan Masukan Program dan Rencana Kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2023, dengan sasaran tersusunnya Rencana Kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2023 dan Laporan Penyusunan Bahan Masukan Program dan Rencana Kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2023.

Penyusunan rencana kerja dan alokasi anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air dilakukan berdasarkan empat *baseline*: (1). Penyusunan rancangan awal rencana kerja berdasarkan kerangka pendanaan jangka menengah (KPJM) yang bersifat indikatif dengan memperhatikan kinerja tahun-tahun sebelumnya; (2). Berdasarkan pagu indikatif; (3). Berdasarkan pagu anggaran; dan (4). Berdasarkan pagu alokasi anggaran.

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp20.340.000.000,00 berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja TA. 2023. Akan tetapi, setelah Surat Bersama Menteri Keuangan

dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas terkait Pagu Indikatif Belanja K/L TA. 2023 ditetapkan, Direktorat PPI SDA hanya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp12.399.643.000,00. Setelah Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA. 20223 ditetapkan, alokasi anggaran Dit. PPI SDA tidak berubah sehingga berdasarkan pagu anggaran dan pagu alokasi anggaran, Dit. PPI SDA tetap memiliki anggaran sebesar Rp. 12.399.643.000,00.



Rapat Kick Off Penyusunan FBC Proyek KPBU Bendungan Merangin dan Integrasinya dengan sistem Penyediaan air minum

Permasalahan yang di hadapi: Perubahan pipeline (proyek air baku di integrasikan dengan proyek air minum) berdampak pada perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2023.

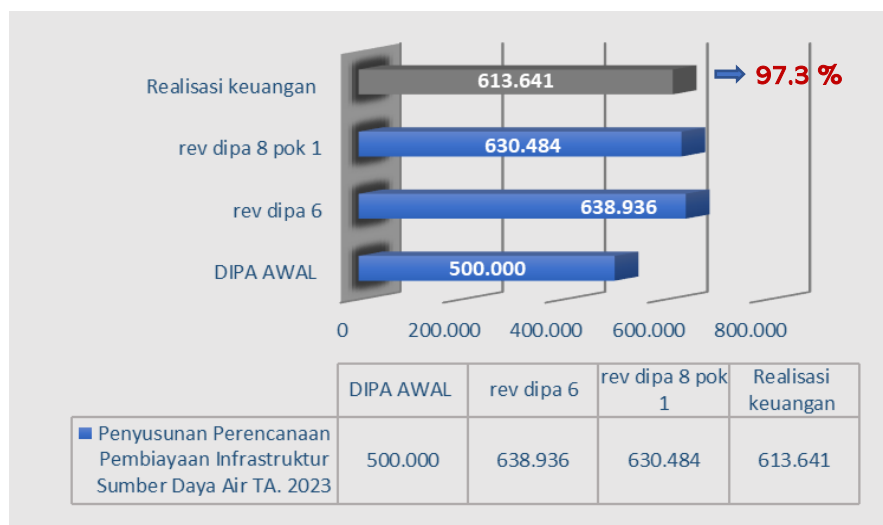
Tindak Lanjut atas permasalahan tersebut di atas: Integrasi perencanaan KPBU sektor SDA mulai dari RPJMN, Renstra PUPR, Renstra Dirjen. SDA, Renstra DJPI, dan Renstra Direktorat PPI SDA.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Paket kegiatan Penyusunan Bahan Masukan Program dan Rencana Kerja Direktorat PPI SDA TA. 2023 yaitu:

1. Rapat Penyusunan Evaluasi Paruh Waktu Renstra Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, tanggal 8 April 2022
2. Rapat Evaluasi Penyiapan KPBU TA.2022 dan Percepatan Pelaksanaan KPBU Sektor Sumber Daya Air TA. 2023-2024, tanggal 20 Oktober 2022

Capaian kinerja paket kegiatan ini sebesar Rp 613.641.328,00 setara dengan 97,3% (keuangan), sedangkan untuk capaian fisiknya sebesar 98% dengan outputnya adalah Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2023. Berikut grafik kronologis perubahan anggaran pada paket kegiatan Penyusunan Bahan Masukan Program dan Rencana Kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2023 dan realisasi anggarannya.

Grafik 4.2.
Kronologis
Anggaran
Komponen
Penyusunan
Perencanaan dan
Panganggaran
Pembiayaan
Infrastruktur SDA TA
2023 (rupiah dalam
ribuan)



⇒ **Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA**

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menerapkan pencegahan penyebaran dan perlindungan kepada pegawai Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air dari penularan Covid-19.

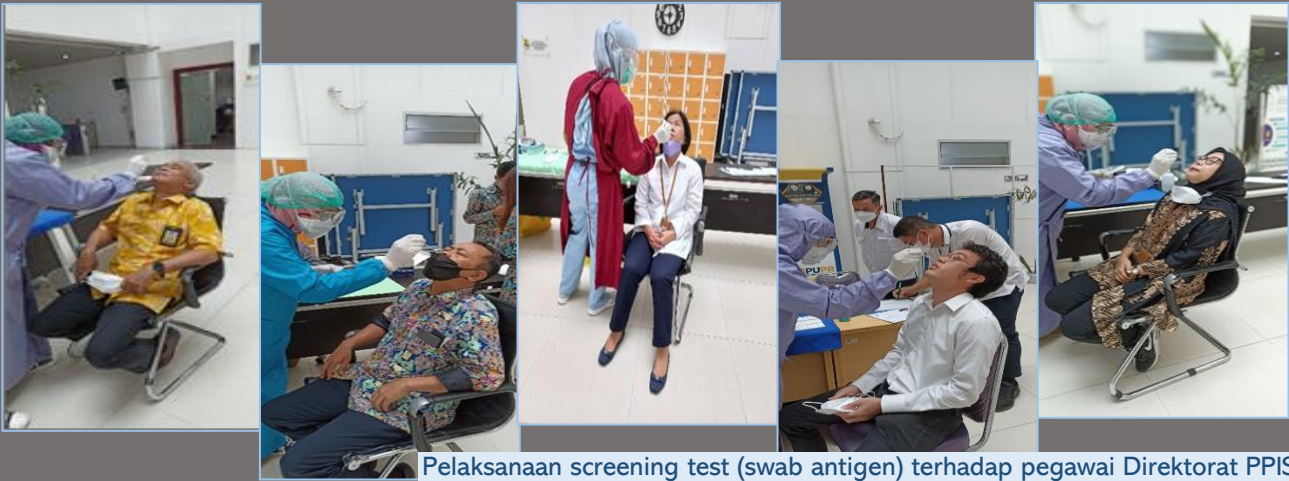
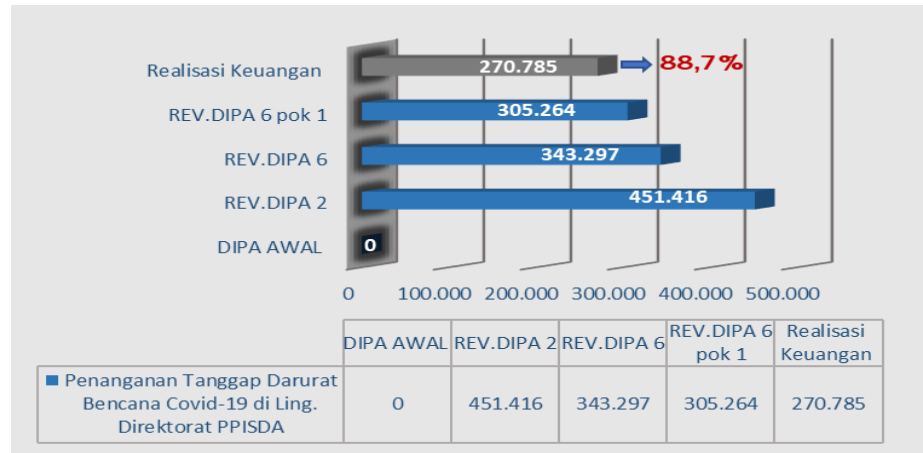
Jenis kegiatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Direktorat PPISDA meliputi:

1. Pengaturan jadwal pegawai yang bekerja di kantor (WFO) dan dirumah (WFH);
2. Screening terhadap pegawai melalui tes dengan swab antigen, dan PCR;
3. Pengadaan vitamin/penambah daya tahan tubuh dan masker untuk setiap pegawai;
4. Himbauan untuk selalu taat melaksanakan protokol kesehatan kepada seluruh pegawai;
5. Penerapan isolasi terhadap pegawai yang positif Covid-19;
6. Pemberian penambah daya tahan tubuh kepada yang positif Covid-19;
7. Tracing kepada pihak yang kontak fisik dengan yang sudah dinyatakan positif Covid-19;
8. Penyemprotan disinfektan secara berkala di lingkungan kerja;
9. Koordinasi data untuk pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di lingkungan PUPR;
10. Pembatasan kegiatan perkantoran dan di luar kantor; dan

11. Pengaturan bepergian bagi pegawai-pegawai saat libur/cuti bersama;

Berikut grafik kronologis perubahan anggaran pada paket kegiatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Direktorat PPISDA dan realisasi keuangannya:

Grafik 4.3.
Kronologis
Anggaran
Penanganan
Tanggap Darurat
Bencana Corona
Virus Disease
2019 (Covid-19)
di Lingkungan
Direktorat
PPISDA (rupiah
dalam ribuan).



Pelaksanaan screening test (swab antigen) terhadap pegawai Direktorat PPISDA

Anggaran pada paket kegiatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Direktorat PPISDA baru ada pada revisi DIPA 2 dengan nilai Rp 451 jutaan. Seiring wabah corona yang mulai mereda, anggaran ini mengalami optimalisasi sebanyak 2x, yaitu pada revisi dipa 6 dan revisi dipa 6 pok 1 dengan pagu akhir sebesar Rp 305.264.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp 270.785.521,00 setara dengan 88,7% sedangkan untuk capaian fisiknya sebesar 89%.

RO1.K2 PENYUSUNAN IDENTIFIKASI PROYEK KPBU INFRASTRUKTUR SDA

Pencapaian terhadap Komponen tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan Paket kegiatan berikut ini:

⇒ **Penyusunan Identifikasi dan Pipeline Proyek KPBU Bidang SDA TA. 2022**

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan seleksi proyek Sumber Daya Air yang kemudian dapat dijadikan sebagai proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan, dengan sasaran tersusunnya Identifikasi dan Pipeline Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air sebagai dokumen Penyiapan dan Kerjasama Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Identifikasi dan Pipeline Proyek KPBU bidang SDA telah tersusun Pipeline Proyek KPBU Bidang Sumber Daya Air 2020-2024 sebagai acuan bagi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air dalam melaksanakan penyiapan KPBU. Pipeline Proyek KPBU Bidang Sumber Daya Air 2020-2024 terdapat 2 (dua) proyek bendungan, 3 (tiga) proyek Daerah Irigasi (DI), 1 (satu) proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM), dan 1 (satu) Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

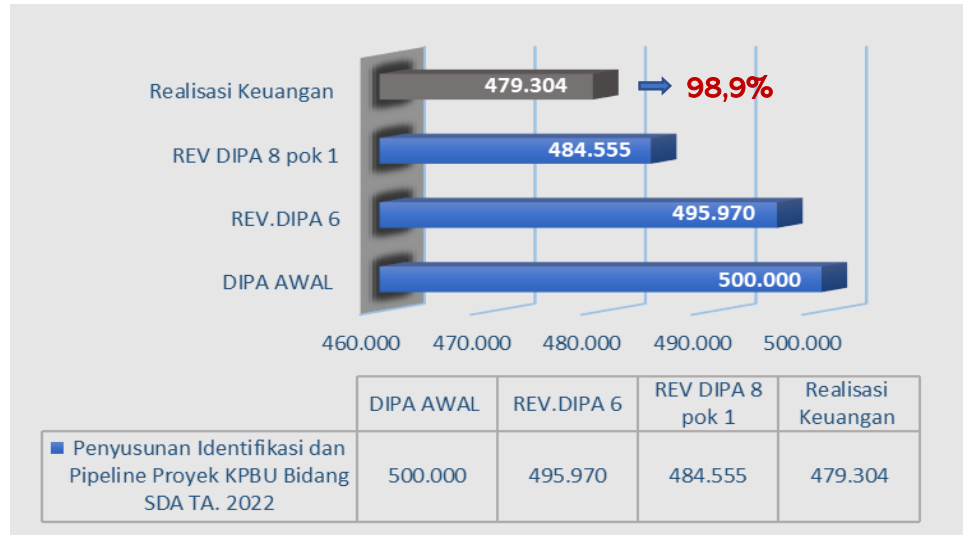
Tindak lanjut yang akan di jalankan untuk paket kegiatan ini adalah Penyusunan Rencana Umum dan Masterplan yang sudah dikoordinasikan dan sudah disetujui oleh stakeholders terkait.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada paket Penyusunan profil dan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur SDA yaitu:

1. Focus Group Discussion Skema KPBU Syariah Sektor SDA, tanggal 7 Juli 2022
2. Konsultasi Publik Proyek KPBU Unsolicited Revitalisasi dan Modernisasi Irigasi Sistem Interkoneksi High Level Diversion (HLD) Wilayah Sungai Lombok NTB tanggal 22 September 2022

Capaian kinerja paket kegiatan ini sebesar Rp 479.304.368,00 setara dengan 98,9% (keuangan), sedangkan untuk capaian fisiknya sebesar 99% dengan outputnya adalah Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Identifikasi dan Pipeline Proyek KPBU Bidang SDA TA. 2022. Berikut grafik kronologis perubahan anggaran pada paket kegiatan Penyusunan Identifikasi dan Pipeline Proyek KPBU Bidang SDA TA. 2022:

Grafik 4.4.
Kronologis
Anggaran
Komponen
Penyusunan
Identifikasi
dan Pipeline
Proyek KPBU
Bidang SDA
TA. 2022
(rupiah dalam
ribuan)



RO.2_ Studi PENDAHULUAN Pembiayaan INFRASTRUKTUR SDA

KOMPONEN/INDIKATOR		Target Renstra	Paket Kegiatan		Capaian	Pagu Awal	Pagu Akhir
						(dlm ribuan)	
Komponen 1	Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur SDA	1	1	Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Infrastruktur SDA	1 RK	Rp 500.000,-	Rp 854.898,-

Tabel 4.5. Target dan Capaian pada Rincian Output 2 (Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur SDA)

RO2.K1 PENYUSUNAN STUDI PENDAHULUAN KPBU INFRASTRUKTUR SDA

Pencapaian terhadap Komponen tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan Paket kegiatan berikut ini:

⇒ Penyusunan Studi Pendahuluan Proayek KPBU Infrastruktur SDA

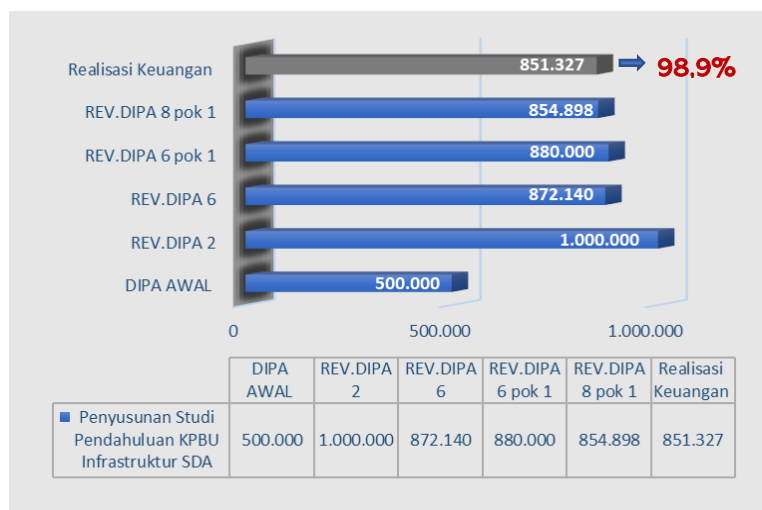
Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun Studi Pendahuluan yang terdiri dari analisis perlunya penyediaan suatu infrastruktur tertentu, khususnya proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air serta manfaatnya apabila dikerjasamakan dengan Badan Usaha Pelaksana melalui KPBU. Pada TA.2022, Direktorat PPISDA, DJPI telah menyusun Studi Pendahuluan untuk 3 (tiga) proyek KPBU yaitu DI Komering, Proyek KPBU Irigasi Sistem Interkoneksi High Level Diversion (HLD) Wilayah Sungai Lombok, dan Proyek KPBU Daerah Irigasi Colo.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada paket Penyusunan Profil dan Identifikasi Proyek KPBU Sektor SDA ini:

1. FGD Peluang Penyelenggaraan KPBU Availability Payment (AP) Operasi dan Pemeliharaan Irigasi, tanggal 14 April 2022
2. Rapat Koordinasi Tim KPBU Dalam Penyediaan Infrastruktur Bendungan Bodri, Jawa Tengah tanggal 13 Mei 2022
3. Focus Group Discussion (FGD) Alternatif Pembiayaan dan Potensi Pendapatan Lainnya pada Proyek KPBU Unsolicited Sektor Sumber Daya Air tanggal 6 September 2022



Capaian kinerja paket kegiatan ini sebesar Rp 851.327.391,00 setara dengan 99,58% (keuangan), sedangkan untuk capaian fisiknya sebesar 100% dengan outputnya adalah Rekomendasi Kebijakan Studi Pendahuluan Proayek KPBU Sektor SDA. Gambar disamping grafik kronologis



Grafik 4.5. Kronologis Anggaran Komponen Studi Pendahuluan KPBU infrastruktur SDA (rupiah dalam ribuan).

perubahan anggaran pada paket kegiatan Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek KPBUSektor SDA TA. 2022 yang disebabkan karena adanya optimalisasi anggaran.

RO.3 _ PRA Studi Kelayakan PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SDA

KOMPONEN/ INDIKATOR		Target Rens-tra	Paket Kegiatan		Capaian	Pagu Awal	Pagu Revisi Akhir
						(dlm ribuan)	
Komponen 1	Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA	1 RK	1	Penyusunan Kajian Prastudi Kelayakan KPBUSektor SDA TA. 2022	1 RK	Rp 1.500.000,-	Rp 1.119.750,-
Komponen 2	Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan SDA	2 RK	1.	Penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan KPBUSektor Sumber Daya Air TA. 2022 ganti judul menjadi: Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBUSektor Brownfield SDA	1 RK	Rp 1.750.000,-	Rp 511.276,-
			2.	Penyusunan Evaluasi Kajian Studi Kelayakan KPBUSektor Unsolicited Sektor Sumber Daya Air TA. 2022	1 RK	Rp 750.000,-	Rp 982.608,-

Tabel 4.6. Target dan Capaian pada Rincian Output 3 (Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA)

RO3.K1 PENYUSUNAN KAJIAN AWAL PRA STUDI KELAYAKAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SDA

Pencapaian terhadap Komponen tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan Paket kegiatan berikut ini:

⇒ Penyusunan Kajian Prastudi Kelayakan KPBUSektor Sumber Daya Air TA. 2022

Kajian Prastudi Kelayakan dilaksanakan untuk:

- Mendapatkan gambaran kelayakan DI Colo terhadap kebutuhan air irigasi di Daerah Irigasi Colo Barat dan Timur dari berbagai aspek sesuai dengan persyaratan yang tertuang di dalam Permen PUPR No. 21/2018 dan Permen PUPR No. 1/2016.

- b. Menentukan skema KPBU terbaik berdasarkan hasil kajian berbagai aspek antara lain aspek teknis, ekonomi, keuangan, dan kesesuaian dengan hukum, serta aspek lingkungan dan sosial.
- c. Menentukan perlu atau tidaknya Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah.
- d. Memperoleh persetujuan dari para pemangku kepentingan mengenai KPBU



Kunjungan ke Kantor BBWS Bengawan Solo

Adapun yang menjadi isu utama yang perlu untuk ditindaklanjuti untuk mendapatkan konfirmasi lebih lanjut terkait Kajian Akhir Prastudi Kelayakan KPBU (Outline Business Case-OBC) Daerah Irigasi Colo, Jawa Tengah, diantaranya:

- a) Sinkronisasi program antara instansi pemerintah terhadap penerima manfaat yang bergerak di sektor pertanian.
- b) Sinkronisasi dan validasi data asset yang berhubungan dengan bendung colo maupun jaringan irigasi Colo. Hal ini akan memberikan pengaruh terhadap ruang lingkup KPBU.
- c) Perlu dibentuknya Komisi Irigasi untuk DI Colo untuk memonitor pembagian air dari hulu hingga ke hilir.



Kunjungan Ke Titik DI Colo

Perlu dilakukan Survei Investigasi Desain (SID) terhadap keseluruhan saluran irigasi bersama antara Badan Usaha Pelaksana dengan pemangku kepentingan seperti BBWS.

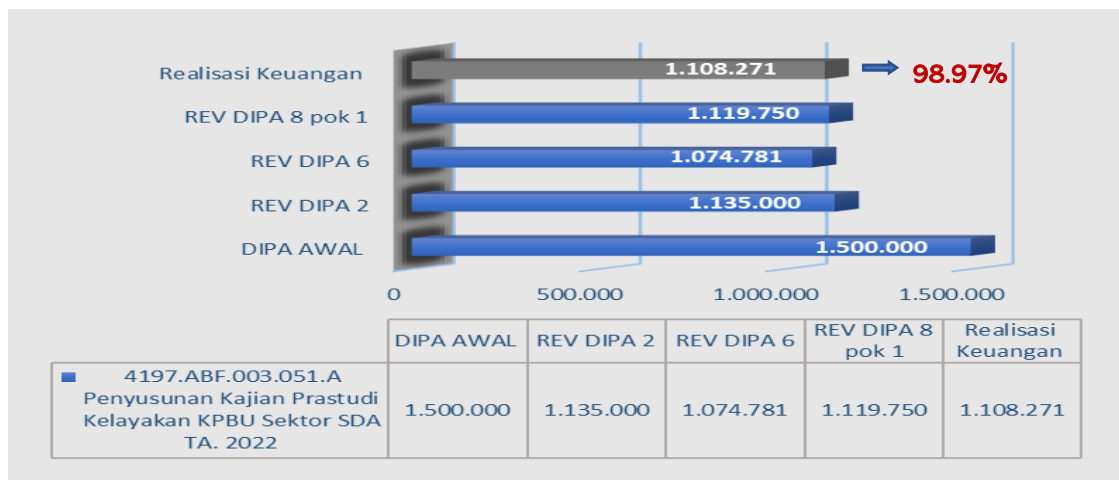
Kegiatan yang telah dilaksanakan pada paket ini adalah:

1. Rapat Pembahasan Progres Proyek KPBU Unsolicited Revitalisasi dan Modernisasi Irigasi Sistem Interkoneksi High Level Diversion (HLD) Wilayah Sungai (WS) Lombok, Nusa Tenggara Barat, tanggal 9 Agustus 2022

2. Focus Group Discussion (FGD) Kajian Teknis Serta Kajian Ekonomi dan Finansial Proyek KPBUs Unsolicited Revitalisasi dan Modernisasi Irigasi Sistem Interkoneksi High Level Diversion (HLD) Wilayah Sungai (WS) Lombok, Nusa Tenggara Barat dan Daerah Irigasi (DI) Komering, Sumatera Selatan, tanggal 26 Oktober 2022

Capaian kinerja paket kegiatan ini sebesar Rp 1.108.271.082,00 setara dengan 99,97% (keuangan), sedangkan untuk capaian fisiknya sebesar 99% dengan outputnya adalah Rekomendasi Kebijakan Studi Pendahuluan Proyek KPBUs Sektor SDA TA 2022.

Berikut grafik kronologis perubahan anggaran pada paket kegiatan Penyusunan Kajian Prastudi Kelayakan KPBUs Sektor Sumber Daya Air TA 2022:



Grafik 4.6. Kronologis Anggaran Kegiatan Penyusunan Kajian Prastudi Kelayakan KPBUs Sektor Sumber Daya Air TA. 2022 (rupiah dalam ribuan).

RO3.K2 PENYUSUNAN KAJIAN AKHIR PRA STUDI KELAYAKAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SDA- rp

Pencapaian terhadap Komponen tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan Paket kegiatan berikut ini:

⇒ Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBUs Brownfield Sektor SDA

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk melakukan penyusunan Kajian Prastudi Kelayakan KPBUs Brownfield Sektor Sumber Daya Air yang terdiri dari kajian hukum, kajian teknis dan lingkungan, dan kajian ekonomi dan finansial, kajian bentuk KPBUs, kajian risiko serta kajian kebutuhan Dukungan/Jaminan Pemerintah.

Untuk mempercepat target bauran EBT dan memaksimalkan potensi bendungan

yang telah di bangun oleh Kementerian PUPR dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan bendungan yang telah selesai dibangun untuk pembangunan

Rapat Koordinasi Proyek KPBu Sektor Sumber Daya Air dengan PT Van Oord Indonesia



PLTA/PLTM/PLTMH, maka Direktorat PPISDA melakukan studi lebih lanjut terkait KPBu Brownfield sektor Sumber Daya Air melalui penyusunan Prastudi Kelayakan Awal Proyek KPBu PLTM Bendungan Jenelata, Sulawesi Selatan.

Setelah melakukan Analisa terhadap beberapa kajian, dilaksanakannya Proyek KPBu PLTM yang Memanfaatkan Bendungan Jenelata dapat mengurangi penggunaan dana APBN untuk alokasi biaya pengoperasian bendungan hingga Rp5,7 Milyar per-tahunnya (sumber: laporan swakelola Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBu Brownfield Sektor SDA)

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada paket ini adalah:

1. Rapat Koordinasi Proyek KPBu Sektor Sumber Daya Air dengan PT. Van Oord Indonesia Tanggal 27 April 2022
2. Konsultasi Publik Proyek KPBu Unsolicited Daerah Irigasi (DI) Komering, Sumatera Selatan 1 Sept 2022
3. FGD Kajian Prastudi Kelayakan Awal Proyek KPBu Pemeliharaan Bendungan dan PLTM Bendungan Jenelata, Sulawesi Selatan, Tanggal 22 Desember 2022



Konsultasi Publik Proyek KPBu Unsolicited Daerah Irigasi Komering

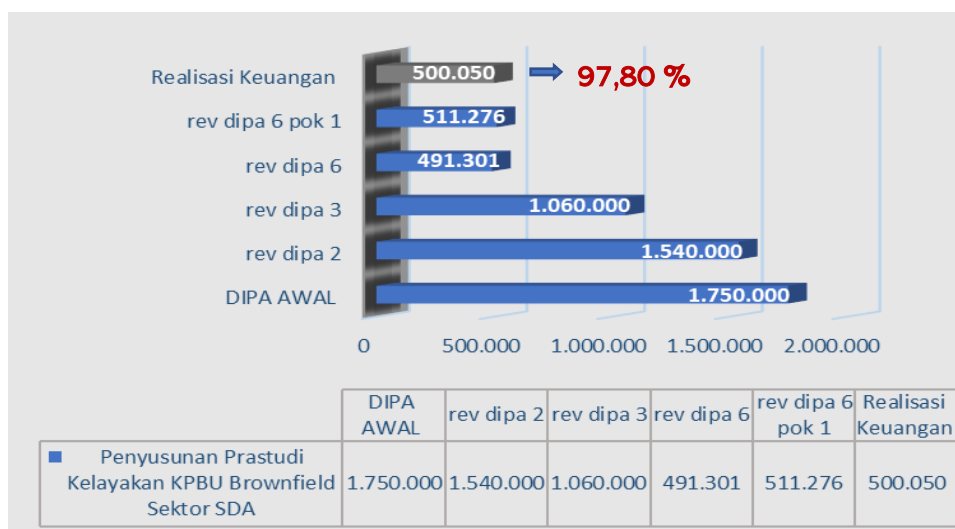


Penandatanganan Berita Acara Konsultasi Publik Proyek KPBu Unsolicited Daerah Irigasi Komering di Hotel Parai Puri Tani, Martapura

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target pada kegiatan ini Kurang lengkapnya data dalam penyusunan Prastudi Kelayakan PLTM Bendungan Jenelata sehingga Kajian Prastudi Kelayakan yang disusun kurang komprehensif. Sedangkan tindak lanjut dalam menghadapi masalah tersebut: dengan melakukan koordinasi dengan BBWS Pompengan Jeneberang terkait kajian teknis dalam penyusunan Kajian Prastudi Kelayakan

Capaian kinerja paket kegiatan ini sebesar Rp 500.050.580,00 setara dengan 97,80% (keuangan), sedangkan untuk capaian fisiknya sebesar 98% dengan outputnya adalah Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU Brownfield Sektor SDA. Berikut grafik kronologis perubahan anggaran pada paket kegiatan Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU Brownfield Sektor SDA ini:

Grafik. 4.7
Kronologis
perubahan
anggaran
kegiatan
Penyusunan
Prastudi
Kelayakan
KPBU
Brownfield
Sektor SDA
(rupiah dalam
ribuan).



⇒ Penyusunan Evaluasi Kajian Studi Kelayakan KPBU Unsolicited Sektor SDA TA 2022

Proyek KPBU atas Prakarsa Badan Usaha (Unsolicited) dimulai dengan pengajuan proposal dan dokumen pra-studi kelayakan (pra-FS) ke Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK). Kemudian PJPK melakukan evaluasi dokumen Pra-Studi Kelayakan tersebut untuk mendapatkan persetujuan. Dengan diterbitkannya persetujuan dari PJPK, Badan Usaha Pemrakarsa dapat melanjutkan pengerjaan dokumen Studi Kelayakan dan menyerahkan kembali ke PJPK untuk dilakukan evaluasi lanjutan. Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan untuk menyusun evaluasi kajian Studi Kelayakan KPBU Unsolicited Sektor SDA TA. 2022.

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target pada kegiatan ini:

- Adanya ketidakpastian ruang lingkup pekerjaan KPBU sehingga berdampak

- pada timeline penyusunan Studi Kelayakan Proyek KPBU
- b. Belum tersusunnya SLA untuk Proyek KPBU DI Komering dan Saluran Interkoneksi HLD WS Lombok
- c. Belum ada koordinasi lebih jauh terkait keterlibatan petugas OP eksisting pada kelembagaan KPBU

Sedangkan tindaklanjut yang telah dilakukan:

- a. Dit. PPISDA telah berkoordinasi dengan Badan Usaha Calon Pemrakarsa, BBWS Sumatera VIII (DI Komering) dan BWS Nusa Tenggara I (HLD) dalam rangka konsolidasi ruang lingkup pekerjaan KPBU
- b. Direktorat PPISDA sedang menyusun pedoman SLA yang dapat digunakan dalam evaluasi FS termasuk kriteria SLA yang disusun oleh Calon Pemrakarsa
- c. Badan Usaha Calon Pemrakarsa akan melakukan kajian lebih lanjut terkait keterlibatan petugas OP eksisting pada kelembagaan KPBU
- d. Badan Usaha Calon Pemrakarsa diminta untuk menyelesaikan isu-isu pada penyusunan Studi Kelayakan agar timeline bisa berjalan sesuai target yang telah ditentukan

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada paket ini adalah:

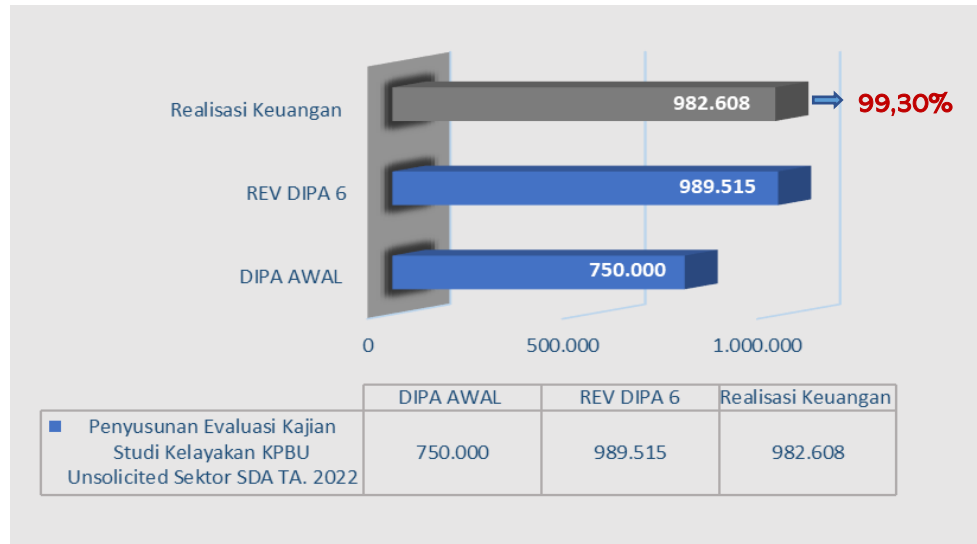
1. Rapat Tindak Lanjut Progres Penyusunan FS Proyek KPBU Unsolicited Daerah Irigasi (DI) Komering Sumatera Selatan tanggal 28 Juni 2022
2. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Surat Izin Prakarsa Proyek KPBU Unsolicited Revitalisasi dan Modernisasi Irigasi Sistem Interkoneksi High Level Diversion (HLD) Wilayah Sungai (WS) Lombok NTB tanggal 29 Juni 2022
2. Rapat Koordinasi Pembahasan Progres Penyusunan FS Proyek KPBU Unsolicited Daerah Irigasi (DI) Komering, Sumater Selatan, tanggal 10 Juni 2022
3. Konsinyasi Pembahasan Kesesuaian Syariah pada Konsep Perjanjian KPBU Unsolicited Daerah Irigasi Komering dan saluran Interkoneksi tanggal 7s/d 8 Oktober 2022
4. FGD Pedoman Service Level Agreement (SLA) KPBU Sub-Sektor Irigasi, tanggal 9 Desember 2022



Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Surat Izin Prakarsa Proyek KPBU *Unsolicited* Revitalisasi dan Modernisasi Irigasi Sistem Interkoneksi *High Level Diversion* Wilayah Sungai Lombok, Nusa Tenggara Barat

Capaian kinerja paket kegiatan ini sebesar Rp 982.608.170,00 setara dengan 99,30% (keuangan), sedangkan untuk capaian fisiknya sebesar 100% dengan outputnya adalah Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Evaluasi Kajian Studi Kelayakan KPBUS Unsolicited Sektor Sumber Daya Air TA 2022. Berikut grafik kronologis perubahan anggaran pada paket kegiatan Penyusunan Evaluasi Kajian Studi Kelayakan KPBUS Unsolicited Sektor Sumber Daya Air TA. 2022.

Grafik. 4.8
Kronologis
perubahan
anggaran
kegiatan
Penyusunan
Evaluasi Kajian
Studi Kelayakan
KPBUS
Unsolicited
Sektor SDA TA.
2022 (rupiah
dalam ribuan).



RO.4_ Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA

KOMPONEN / INDIKATOR		Target Rens-tra	Paket Kegiatan	Capaian	Pagu Awal (dln ribuan)	Pagu Revisi
Komponen 1	Penyiapan Dukungan Kerjasama Investasi Infrastruktur SDA	1 RK	Penyiapan Dokumen Pengusahaan Dukungan Pemerintah dalam Pelaksanaan Proyek KPBUS Sektor SDA TA. 2022	1 RK	Rp 500.000,-	Rp 745.589,-

Tabel 4.7. Target dan Capaian pada Rincian Output 4 (Dukungan Kerjasama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA)

RO4.K1 PENYIAPAN DUKUNGAN KERJASAMA INVESTASI INFRASTRUKTUR SDA

Pencapaian terhadap Komponen tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan Paket kegiatan berikut ini:

- ⇒ **Penyiapan Dokumen Pengusahaan Dukungan Pemerintah dalam Pelaksanaan Proyek KPBUS Sektor SDA TA. 2022**

Untuk mendukung penerapan KPBU di Indonesia, Kementerian Keuangan menyediakan berbagai fasilitas dan dukungan pemerintah, yaitu fasilitas penyiapan proyek dan persiapan Transaksi atau Project Development Fund (PDF), dukungan kelayakan atau Viability Gap Fund (VGF), dan penjaminan infrastruktur. Selain itu, disediakan skema pengembalian investasi proyek KPBU yakni skema Pembayaran Berdasarkan Ketersediaan Layanan atau yang biasa dikenal dengan Availability Payment (AP). Sehingga diperlukan kegiatan ini guna memfasilitasi penyusunan dokumen pengusahaan dukungan pemerintah tersebut dalam pelaksanaan KPBU sektor sumber daya air.

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target pada kegiatan ini:

- a. Adanya ketidakpastian lingkup KPBU dan kepastian kapasitas fiskal Kementerian PUPR untuk pembayaran AP sehingga berdampak pada pengajuan Surat Konfirmasi Pendahuluan AP
- b. Belum terpenuhinya readiness criteria Proyek KPBU sehingga berdampak pada pengajuan Screening Form Penjaminan

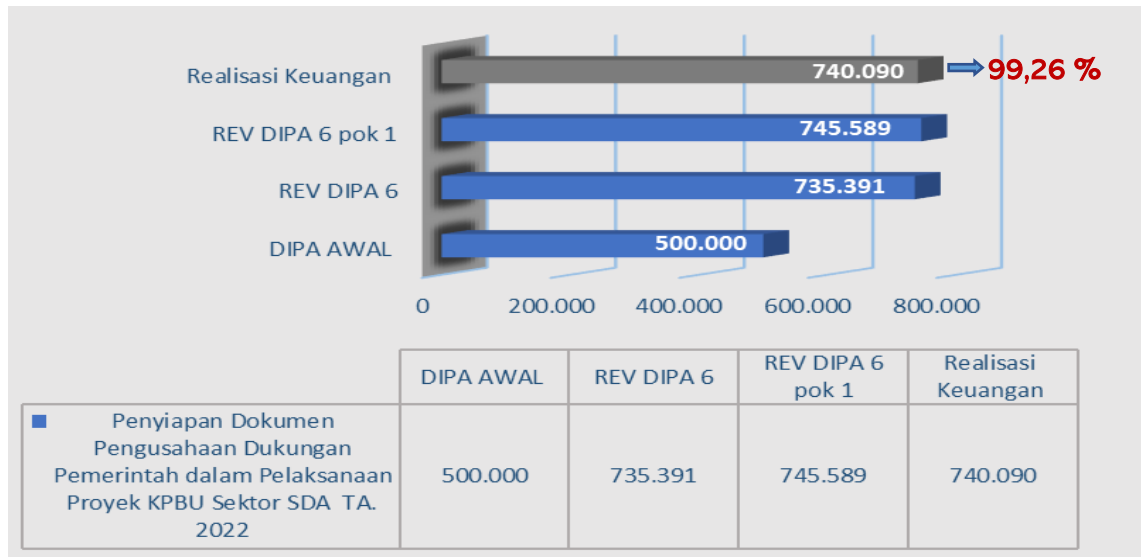
Sedangkan tindaklanjut yang telah dilakukan:

- a. Dit. PPISDA telah melakukan koordinasi dengan Dit. SPPSDA dan Biro PAKLN terkait kapasitas fiskal untuk pembayaran AP
- b. Dit. PPISDA telah berkoordinasi dengan stakeholders terkait untuk pemenuhan readiness criteria untuk percepatan pengajuan Screening Form Penjaminan ke PT PII

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada paket ini adalah:

1. Rapat Kick Off Penyusunan FBC Proyek KPBU Bendungan Merangin dan Integritasnya dengan SPAM, Provinsi Jambi tanggal 24 Maret 2022
2. Rapat Pembahasan Review Outline Business Case (OBC) Proyek KPBU Bendungan Merangin, tanggal 18 April 2022
3. Rapat Pembahasan Isu Legal Pada Aspek Operasi dan Pemeliharaan Proyek KPBU Infrastruktur SDA tanggal 25 Mei 2022
4. Rapat Pembahasan Progres Penyusunan Kajian Teknis, Hukum dan Kelembagaan serta Ekonomi dan Finansial pada dokumen FS Proyek KPBU Unsolicited DI Komering, tanggal 19 Agustus 2022
5. Rapat Finalisasi Kesesuaian Syariah pada Konsep Perjanjian KPBU Unsolicited Daerah Irigasi Komering Tanggerang Selatan, tanggal 28 Oktober 2022
6. Rapat Pembahasan Aspek Teknis KPBU Bendungan Merangin, tanggal 15 Desember 2022

Capaian kinerja paket kegiatan ini sebesar Rp 740.090,00 setara dengan 99,26% (keuangan), sedangkan untuk capaian fisiknya sebesar 100% dengan outputnya adalah Rekomendasi Kebijakan Penyiapan Dokumen Pengusahaan Dukungan Pemerintah dalam Pelaksanaan Proyek KPBU Sektor SDA TA. 2022. Berikut grafik kronologis perubahan anggaran pada paket kegiatan tersebut diatas:



Grafik. 4.9 Kronologis perubahan anggaran kegiatan Penyiapan Dokumen Pengusahaan Dukungan Pemerintah dalam Pelaksanaan Proyek KPBU Sektor SDA TA. 2022 (rupiah dalam ribuan).



Rapat Pembahasan Review OBC Proyek KPBU Bendungan Merangin



Rapat Pembahasan Progres FS Proyek KPBU Unsolicited DI Komering

RO.5 _ Proyek KPBU SDA yang siap dikerjasamakan

KOMPONEN /INDIKATOR		Target Renstra	Paket Kegiatan		Capaian	Pagu Awal	Pagu Revisi
						(dlm ribuan)	
Komponen 1	Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur SDA	1 DOK		Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air TA 2022	1 DOK	Rp 1.000.000,-	Rp 861.207,-
Komponen 2	Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur SDA	2 Kesepakatan	2	Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Bendungan TA. 2022	5 Kesepakatan	Rp 1.100.000,-	Rp 1.075.935,-
				Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur SDA TA. 2022 SDA Baku	-	Rp 900.000,-	Rp 0

Tabel 4.8. Target dan Capaian pada Rincian Output 5 (Proyek KPBU SDA yang siap dikerjasamakan)

RO5.K1 PELAKSANAAN DUKUNGAN DAN PENYIAPAN TRANSAKSI PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SDA

Pencapaian terhadap Komponen tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan Paket kegiatan berikut ini:

- ⇒ **Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air TA 2022**
Maksud dari kegiatan ini untuk menyiapkan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam tahap transaksi KPBU bidang SDA. Sedangkan tujuannya mempersiapkan pelaksanaan di tahap transaksi untuk proyek KPBU bidang SDA yang saat ini telah berada di tahap perencanaan dan di tahap penyiapan.

Kesimpulan yang diperoleh dari kegiatan Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Bidang SDA adalah:

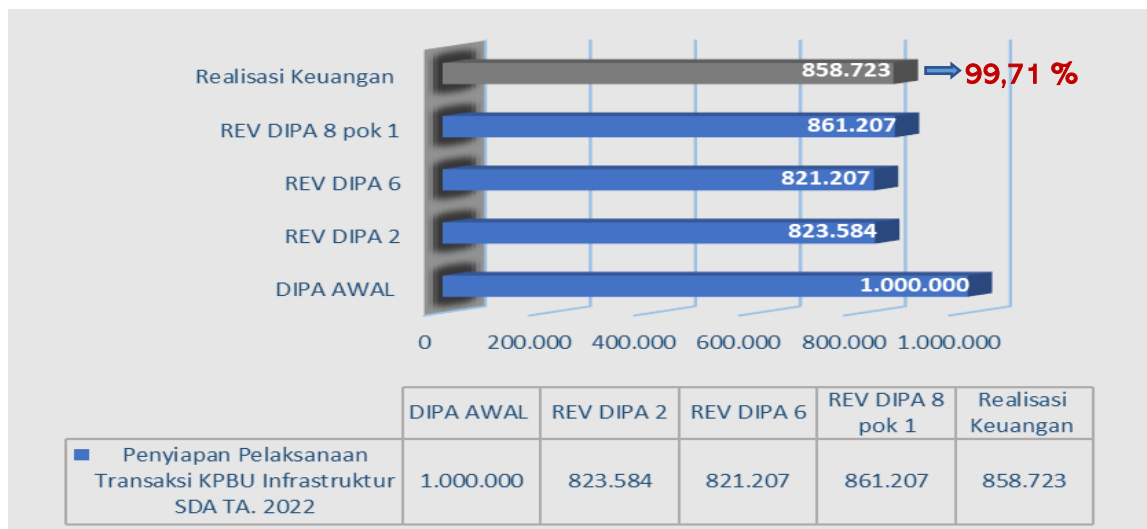
1. Proyek KPBU Bendungan Merangin telah tercantum dalam PPP Book. Dokumen-dokumen yang telah tersedia adalah SK Tim KPBU, Kepmen PUPR tentang pendelegasian sebagian kewenangan PJKP, screening form penjaminan, Studi Pendahuluan, OBC, DED, dan LARAP. Berdasarkan perkembangan dan kesiapan, proyek KPBU Bendungan Merangin diharapkan dapat melaksanakan tahap prakualifikasi pada kuartal ketiga tahun 2022.
2. Proyek KPBU Bendungan Bodri sedang dalam pengajuan PPP Book. Dokumen-dokumen yang telah tersedia adalah Studi Pendahuluan, OBC, FBC, draft dokumen pengadaan, dan RTRW. Berdasarkan perkembangan dan kesiapan, proyek KPBU Bendungan Bodri diharapkan dapat melaksanakan tahap prakualifikasi pada kuartal kedua tahun 2023.
3. Proyek KPBU SPAB Kuwil terintegrasi SPAM Regional Bimataru belum tercantum dalam PPP Book. Dokumen-dokumen yang telah tersedia dalam proyek KPBU ini adalah Studi Pendahuluan, OBC, AMDAL SPAB, LARAP SPAB, dan DED SPAB. Berdasarkan perkembangan dan kesiapan, proyek KPBU ini diharapkan dapat melaksanakan tahap prakualifikasi pada triwulan pertama tahun 2023.
4. Proyek KPBU Pemeliharaan Bendungan dan BGS PLTM Bintang Bano ini belum tercantum dalam PPP Book. Dokumen-dokumen yang telah tersedia dalam proyek KPBU ini adalah dokumen FS Pemrakarsa dan draft dokumen pengadaan. Berdasarkan perkembangan dan kesiapan, proyek KPBU ini diharapkan dapat melaksanakan tahap prakualifikasi pada Februari 2022.
5. Proyek KPBU SPAB Sidan sudah tercantum dalam PPP Book. Dokumen-dokumen yang telah tersedia dalam proyek KPBU ini adalah dokumen Studi Pendahuluan KPBU SPAB Sidan, Lol dan Pra FS SPAM Ayung 1 dari calon pemrakarsa kepada PJKP, dan surat usulan penambahan lingkup unit air baku ke dalam lingkup KPBU SPAM. Berdasarkan perkembangan dan kesiapan, proyek KPBU SPAB Sidan terintegrasi SPAM Ayung 1 diharapkan dapat melaksanakan tahap prakualifikasi pada kuartal ketiga tahun 2022.
6. Dokumen-dokumen yang telah tersedia dalam proyek KPBU SPAB dan SPAM Karian Barat adalah dokumen Studi Pendahuluan KPBU SPAB Karian Barat, dokumen OBC KPBU SPAB Karian Barat, Lol PT Adhi Karya kepada Gubernur Banten, review design SPAB, dan dokumen lingkungan SPAB. Berdasarkan perkembangan dan kesiapan, proyek KPBU SPAB dan SPAM Karian Barat diharapkan dapat melaksanakan tahap prakualifikasi pada kuartal kedua tahun 2024.



Rapat Pembahasan Dokumen RfQ dan RfP Proyek KPBUs *Unsolicited* PLTA 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target pada kegiatan ini adalah Perubahan rencana pelaksanaan kegiatan akibat mundurnya timeline proyek. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan timeline proyek.

Capaian kinerja paket kegiatan ini sebesar Rp 858.723.000,00 setara dengan 99,71% (keuangan), sedangkan untuk capaian fisiknya sebesar 100% dengan outputnya adalah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBUs Infrastruktur SDA TA. 2022. Berikut grafik kronologis perubahan anggaran pada paket kegiatan Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBUs Infrastruktur SDA TA. 2022:



G

Grafik. 4.10 Kronologis perubahan anggaran kegiatan Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBUs Infrastruktur Sumber Daya Air TA 2022 (rupiah dalam ribuan).

RO5.K2 PELAKSANAAN PENDAMPINGAN DAN TRANSAKSI PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SDA

Pencapaian terhadap Komponen tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan Paket kegiatan berikut ini:

⇒ Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Bendungan TA. 2022

Pencapaian kinerja pada indikator 2 ini didukung oleh 2 paket kegiatan yaitu Pelaksanaan Transaksi Dan Pendampingan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Bendungan TA. 2022 serta Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur SDA Lainnya TA. 2022. Pada awal tahun 2022 terjadi penghapusan paket kegiatan Pendampingan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur SDA Lainnya TA. 2022 dikarenakan tidak adanya proyek KPBU sektor irigasi yang masuk ke tahap transaksi di tahun 2022, selain itu adanya perubahan lingkup proyek yang semula hanya infrastruktur penyediaan air baku (SPAB) menjadi terintegrasi dengan infrastruktur penyediaan air minum (SPAM). Status proyek SPAB yang semula proyek solicited dengan PJKP Menteri PUPR berubah menjadi proyek unsolicited SPAM dengan PJKP Pemerintah Daerah. Oleh karena itu pada Rincian Ouput 5 ini, tepatnya di indikator 2, hanya didukung oleh satu paket kegiatan saja yaitu Pelaksanaan Transaksi Dan Pendampingan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Bendungan TA. 2022

Tujuan dari paket ini adalah untuk melaksanakan transaksi pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan dan pengembangan infrastruktur bendungan sampai dengan tahap *financial close*.

Sementara itu, sebanyak 4 (empat) proyek KPBU belum memasuki tahap transaksi pada tahun 2022 yaitu Proyek KPBU Bendungan Merangin, Proyek KPBU Bendungan Bodri, Proyek KPBU SPAB Sidan, dan Proyek KPBU SPAB Karian Barat belum memasuki tahap



Pengumuman Lelang

DIRECTORATE GENERAL OF PUBLIC WORKS AND HOUSING INFRASTRUCTURE FINANCING
MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND HOUSING
REPUBLIC OF INDONESIA
ANNOUNCEMENT OF PREQUALIFICATION
NUMBER: 11/KPSU/PBB/XI/2022

Minister of Public Work and Housing invites business entities to participate in Special Purpose Vehicle ("SPV") procurement prequalification for Public Private Partnership Project of Bintang Bano Dam Maintenance and Provision of Mini Hydro Power Plant Infrastructure Capacity 6.3 MW, West Nusa Tenggara Province. The project's investment return is obtained through a tariff mechanism (user charge).

The implementation of this project is based on Presidential Regulation Number 38 of 2015 regarding Public Private Partnerships in Infrastructure Provision. The project was initiated by a business entity (unsolicited project) with the "Right to Match" mechanism.

Project investment costs are estimated at IDR 170.023.000.000,- (One Hundred Seventy Billion Twenty Three Million Rupiah). The scope of the project includes the Provision of Mini Hydro Power Plant Capacity 6.3 MW which is implemented under the Design-Build-Finance-Operate-Maintenance-Transfer (DBFOMT) scheme and maintenance of Bintang Bano Dam. The concession period is 27 years, consisting of 2 years of the construction period and 25 years of the operational period.

The business entities that are interested to participate in the Prequalification can register and collect Request for Qualification electronically at:

Date	: November 30 th - December 9 th 2022
Time	: 09.00-16.30 GMT+7
Website	: http://pembayaan.pu.go.id/sipadu
Email	: pengadaan_kpbu@pu.go.id

Prequalification Participants must fulfill the requirements:

- Participants in the form of Limited Liability Companies or foreign legal entities either single firm or consortium. Foreign legal entities do not have to be domiciled in Indonesia;
- Participants within the last 10 years must have experience and ability in providing similar infrastructures such as construction (EPC) experience, or Independent Power Producer (IPP) experience, or management, operation, and maintenance (OM) experience at least 1 (one) project and completed (COD);
- Participants have the financial capacity to invest and have experience in financing and/or seeking sources of financing for Infrastructure provision; and
- Meet other requirements specified in the Prequalification Document

To collect the Request for Qualification, Participants must fulfill and submit electronic documents as follows:

- Upload a copy of evidence showing the authorized party to represent the business entity or consortium of business entities;
- Upload a power of attorney from the authorized party to represent the business entity or consortium of business entities with a copy of the articles of association and the latest board of directors composition deed or the consortium agreement (if the Prequalification Document is collected by a representative);
- Upload original Identity (Identity Card/Passport/Driving License); and
- The registrant may not represent more than one business entity or consortium of business entities.

Jakarta, November 21st 2022

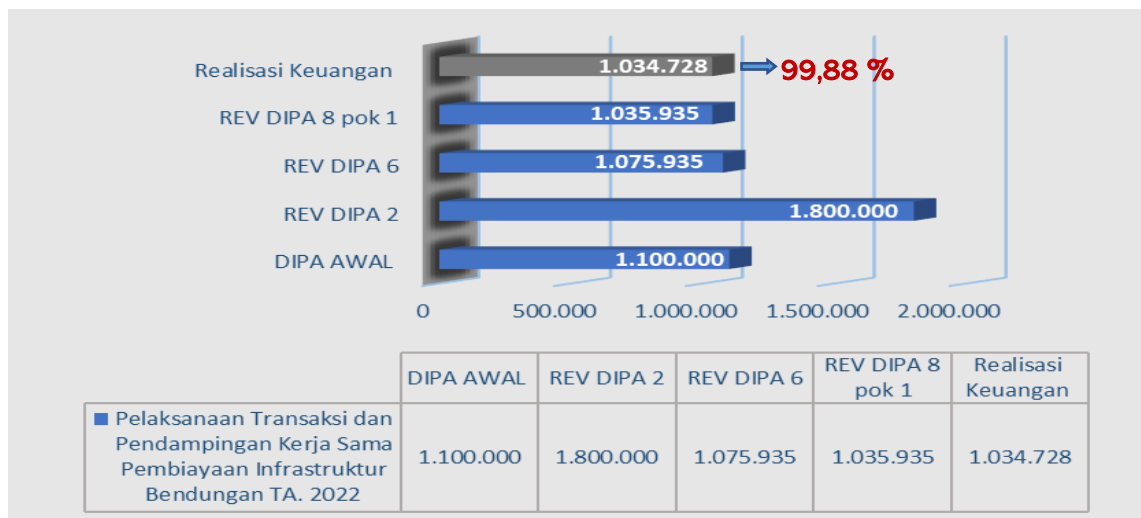
Procurement Committee for Public Private Partnership Project Of Bintang Bano
Dam Maintenance and Provision of Mini Hydro Power Plant Infrastructure
Capacity 6.3 MW West Sumbawa Regency,
West Nusa Tenggara Province.

opin@thejakartapost.com.

transaksi dikarenakan berbagai hal yang telah dijabarkan dalam bab 4 laporan swakelola paket kegiatan ini.

Berdasarkan proses pengadaan Badan Usaha Pelaksana (BUP) yang telah dilaksanakan hingga mencapai tahap prakualifikasi, disimpulkan bahwa 4 (empat) peserta yang memasukan Dokumen Kualifikasi dinyatakan lulus. Proses selanjutnya yaitu tahap lelang atau Dokumen Permintaan Proposal yang akan dilaksanakan pada Januari 2023 sesuai dengan jadwal yang telah tercantum pada Dokumen Prakualifikasi.

Capaian kinerja paket kegiatan ini sebesar Rp 1.034.728.610,00 setara dengan 99,88% (keuangan), sedangkan untuk capaian fisiknya sebesar 100% dengan outputnya adalah 5 kesepakatan. Berikut grafik kronologis perubahan anggaran pada paket kegiatan Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Bendungan TA. 2022:



Grafik. 4.11 Kronologis perubahan anggaran kegiatan Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Bendungan TA. 2022 (rupiah dalamribuan).





RO.6_ PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SDA

KOMPONEN / INDIKATOR		Target Renstra	Paket Kegiatan		Capaian	Pagu Awal	Pagu Revisi
						(dlm ribuan)	
Komponen 1	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PPISDA	4 Lap	1	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Infrastruktur SDA Tahun 2022	1 Lap	Rp 500.000,-	Rp 497.295,-
			2	Automatic Adjustment	1 Lap	Rp 450.000,-	Rp 0
			3	Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan KPBU SDA Melalui Media Informasi	1 Lap	Rp 300.000,-	Rp 239.550,-
			4	Penyusunan Pengelolaan Risiko Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Infrastruktur SDA	1 Lap	Rp 300.000,-	Rp 239.221,-

Tabel 4.9. Target dan Capaian pada Rincian Output 6 (Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA)

RO6.K1 PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PPISDA

Pencapaian terhadap Komponen tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan Paket kegiatan berikut ini:

⇒ Penyusunan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Infrastruktur SDA Tahun 2022

Maksud dari paket kegiatan ini untuk melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan investasi pembiayaan infrastruktur SDA TA 2022 dengan memberikan gambaran mengenai perkembangan, identifikasi permasalahan serta upaya pemecahannya terhadap pelaksanaan investasi pembiayaan infrastruktur SDA. Berikut ini point-point penting yang di dapat dari hasil pemantauan yang telah di lakukan paket kegiatan ini selama TA 2022:

- a. Direktorat PPISDA menyampaikan Usulan Muatan KPBU pada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, bahwa dalam hal KPBU dan peningkatan efisiensi pelaksanaan pekerjaan infrastruktur SDA, kerja sama pendanaan dapat termasuk pelaksanaan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dengan ketentuan tidak mencakup perizinan SDA dan kebijakan alokasi air.
- b. Direktorat PPISDA telah menyusun:
 - 1) Pedoman Service Level Agreement Subsektor Irigasi;
 - 2) Buku Profil Risiko Proyek KPBU Subsektor Irigasi; dan
 - 3) Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Proyek KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan melalui Pemanfaatan Infrastruktur Bendungan.
- c. Progres pelaksanaan KPBU sektor SDA dapat dilihat pada tabel berikut ini:

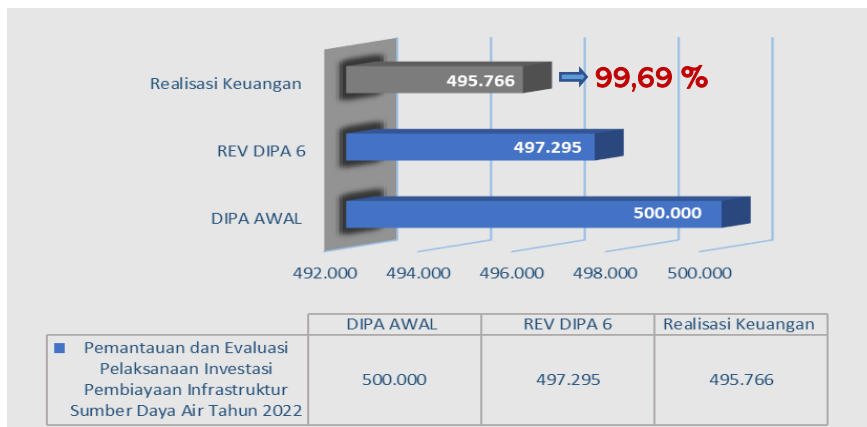
No.	Proyek	Tahapan KPBU	Progres TA 2022
<i>Solicited</i>			
1.	Bendungan Merangin, Jambi	Penyiapan	<i>Kick Off</i> Penyusunan Dokumen <i>Final Business Case</i> (24 Maret 2022)
2.	Bendungan Bodri, Jawa Tengah	Penyiapan	1. Penyusunan Dokumen AMDAL (Januari-November 2022) 2. Konfirmasi Pendahuluan AP dari Kementerian Keuangan (29 November 2022)
3.	DI Colo, Jawa Tengah	Penyiapan	1. Penyusunan Dokumen Studi Pendahuluan- <i>Outline Business Case</i> (Agustus-Desember 2022) 2. Konsultasi Publik (6 Desember 2022)
<i>Unsolicited</i>			
4.	Pemeliharaan Bendungan Bintang	Transaksi	1. <i>Market Consultation</i> (23 Mei 2022) 2. <i>Market Interest Confirmation</i> (26

	Bano dan Penyediaan Infrastruktur PLTM Bintang Bano Kapasitas 6,3 MW, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat		Agustus 2022) 3. Penerbitan Persetujuan Pengadaan Badan Usaha (14 November 2022) 4. Prakualifikasi (21 November-26 Desember 2022)
5.	PLTA 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji, Sumatera Selatan	Penyiapan	1. Penerbitan Surat Izin Prakarsa (8 Maret 2022) 2. Penyampaian Dokumen Studi Kelayakan oleh Calon Pemrakarsa (31 Agustus 2022) 3. <i>Market Sounding</i> (8 Desember 2022) 4. Penyampaian Dokumen Final Studi Kelayakan oleh Calon Pemrakarsa (27 Desember 2022)
6.	DI Komering, Sumatera Selatan	Penyiapan	1. Penerbitan Surat Izin Prakarsa (28 April 2022) 2. Konsultasi Publik (1 September 2022) 3. Pernyataan Kesesuaian Syariah dari DSN-MUI (8 November 2022) 4. <i>Market Sounding</i> (20 Desember 2022)
7.	Saluran Interkoneksi <i>High Level Diversion</i> Wilayah Sungai Lombok, Nusa Tenggara Barat	Penyiapan	1. Penerbitan Surat Izin Prakarsa (20 Juni 2022) 2. Konsultasi Publik (22 September 2022) 3. Pernyataan Kesesuaian Syariah dari DSN-MUI (8 November 2022) 4. <i>Market Sounding</i> (20 Desember 2022)

Capaian kinerja paket kegiatan ini sebesar Rp 495.766.610,00 setara dengan 99,88% (keuangan), sedangkan untuk capaian fisiknya sebesar 100% dengan outputnya adalah 5 kesepakatan. Berikut grafik kronologis perubahan anggaran pada paket kegiatan Penyusunan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Infrastruktur SDA Tahun 2022:

:

Grafik. 4.12
Kronologis perubahan
anggaran kegiatan
Penyusunan
Pemantauan dan
Evaluasi Pelaksanaan
Investasi Pembiayaan
Infrastruktur SDA
Tahun 2022 (Rupiah
dalam ribuan)





Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Potensi Pemanfaatan Bendungan Tugu untuk PLTMH dan PLTS

⇒ **Penyusunan Pengelolaan Risiko Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (Automatic Adjustment)**

Pada awal tahun anggaran paket kegiatan ini mendapatkan anggaran sebesar Rp 450.000.000,00. Namun pada revisi DIPA 1, paket kegiatan ini terkena pemblokiran anggaran yang disebut *automatic adjustmen* namun anggaran tersebut masih melekat pada pagu anggaran Direktorat PPISDA sehingga menyebabkan capaian anggaran tidak maksimal. Pada akhir tahun, tepatnya revisi DIPA 8, anggaran automatic adjustmen telah di keluarkan dari pagu anggaran Direktorat PPISDA. Namun di akhir tahun paket kegiatan ini tetap membuat laporannya sesuai dengan target DIPA 2022 yaitu laporan Penyusunan Pengelolaan Risiko Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air.

⇒ **Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan KPBUSDA Melalui Media Informasi**

Maksud dari paket kegiatan ini untuk melaporkan hasil Pelaksanaan KPBUSDA Sumber Daya Air Melalui Media Informasi TA 2022 dalam rangka memberikan informasi mengenai progres pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air dan tujuannya meningkatkan pemahaman terkait pelaksanaan KPBUSDA Sumber Daya Air Melalui Media Informasi TA 2022 sehingga meningkatkan minat para badan usaha sebagai calon investor untuk berinvestasi pada proyek KPBUSDA infrastruktur sumber daya air.

Buletin PPISDA di tahun 2022 terbit sebanyak empat edisi dalam satu tahun. Tiap edisi per triwulan berisi informasi-informasi mengenai kegiatan yang telah

dilakukan Direktorat PPISDA dalam pelaksanaan KPBU Sektor Sumber Daya Air dalam kurun waktu tiga bulan terakhir. Dari seluruh kegiatan yang dilakukan Direktorat, beberapa kegiatan yang dipublikasikan dalam Buletin PPISDA dipilih dengan menyesuaikan tahapan-tahapan dalam skema KPBU.

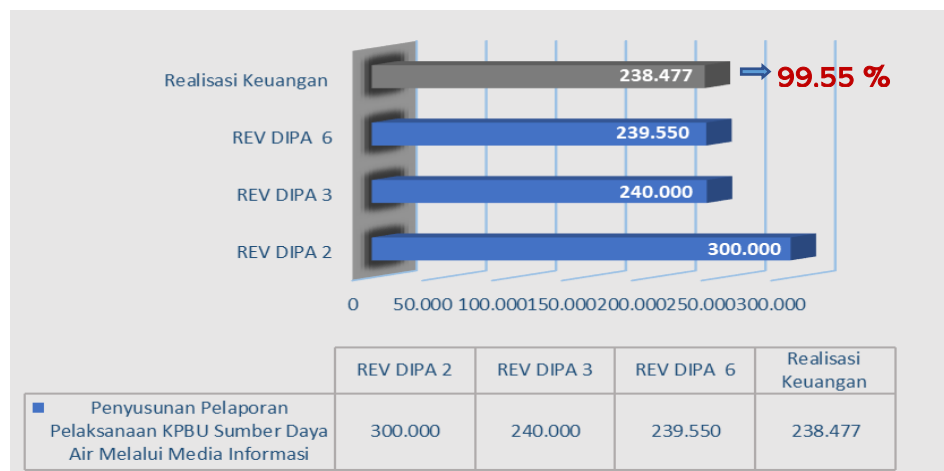
Kegiatan yang telah dilaksanakan pada paket ini adalah:

1. Evaluasi Media Informasi KPBU Sektor Sumber Daya Air dan Pembahasan Buletin PPISDA Edisi II TA 2022, tanggal 18 Juli 2022;
2. Rapat Persiapan Penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air tanggal 8 September 2022
3. Rapat Persiapan Penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, tanggal 12 Desember 2022



Capaian kinerja paket kegiatan ini sebesar Rp 238.477.000,00 setara dengan 99,55% (keuangan), sedangkan untuk capaian fisiknya sebesar 100% dengan outputnya adalah Laporan Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan KPBU SDA Melalui Media Informasi. Berikut grafik kronologis perubahan anggaran pada paket kegiatan Pelaporan Pelaksanaan KPBU SDA Melalui Media Informasi:

Grafik. 4.11
Kronologis
perubahan
anggaran
kegiatan
Penyusunan
Pelaporan
Pelaksanaan
KPBU SDA
Melalui Media
Informasi



⇒ **Penyusunan Pengelolaan Risiko Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Infrastruktur SDA**

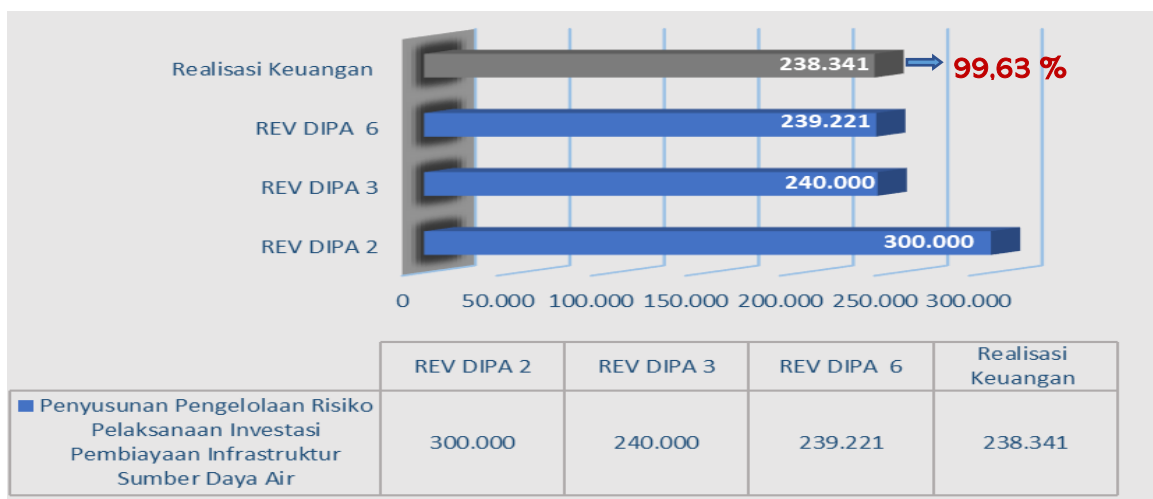
Maksud dari paket kegiatan ini melaporkan hasil penyusunan Pengelolaan Risiko Pelaksanaan Investasi Sumber Daya Air dengan memberikan gambaran mengenai identifikasi risiko, pemeringkatan risiko, pengalokasian risiko, dan upaya pemecahannya melalui mitigasi risiko, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan risiko pada pelaksanaan investasi pembiayaan infrastruktur proyek KPBU sektor Sumber Daya Air. Tujuannya untuk menganalisis risiko mulai dari mengidentifikasi, mengalokasikan risiko, melakukan pemeringkatan risiko, melakukan upaya pemecahannya melalui mitigasi risiko yang terjadi atas kegiatan penyelenggaraan pembiayaan proyek KPBU infrastruktur sumber daya air. Selanjutnya melakukan pemantauan dan evaluasi tahapan analisa dan pengelolaan risiko pada proyek KPBU sektor Sumber Daya Air. Dengan demikian, diperoleh gambaran mengenai pengelolaan risiko telah dilakukan serta merumuskan strategi pengendalian risiko.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada paket ini adalah:

1. Rapat Persiapan Penyusunan Profil Risiko Sektor Sumber Daya Air, tanggal 20 Juli 2022
2. Sharing Session Penerapan Manajemen Risiko Proyek KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air (Sub-Sektor Irigasi) tanggal 2 Agustus 2022
3. Pembahasan Penyusunan Profil Risiko KPBU Sektor Sumber Daya Air tanggal 10 Agustus 2022
4. Pembahasan Progres Penyusunan Profil Risiko Proyek KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air (Sub-Sektor Irigasi) tanggal 29 Agustus 2022
5. Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Profil Risiko Proyek KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air (Sub-Sektor Irigasi) tanggal 2 September 2022
6. Rapat Pembahasan Penilaian Risiko Proyek Dalam Penyusunan Buku Risiko Proyek KPBU Infrastruktur Sub Sektor Irigasi tanggal 31 Oktober 2022
7. Rapat Pembahasan Buku Saku Profil Risiko Proyek KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air (Sub-Sektor Irigasi) , tanggal 7 Desember 2022
8. Finalisasi Buku Profil Risiko Proyek KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air (Sub-Sektor Irigasi) tanggal 23 Desember 2022



Capaian kinerja paket kegiatan ini sebesar Rp 238.341.445,00 setara dengan 99,63% (keuangan), sedangkan untuk capaian fisiknya sebesar 100% dengan outputnya adalah Laporan Penyusunan Pengelolaan Risiko Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Infrastruktur SDA. Berikut grafik kronologis perubahan anggaran pada paket kegiatan Penyusunan Pengelolaan Risiko Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Infrastruktur SDA:



Grafik. 4.12 Kronologis perubahan anggaran kegiatan kegiatan Penyusunan Pengelolaan Risiko Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Infrastruktur SDA

RO.7_ KINERJA DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SDA

KOMPONEN / INDIKATOR		Target Rens-tra	Paket Kegiatan	Capaian	Pagu Awal	Pagu Revisi
					(dlm ribuan)	
Komponen 1	Kinerja Pembiayaan Infrastruktur SDA	1 Laporan	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PPISDA	1 Laporan	Rp 300.000,-	Rp 0,-

Tabel 4.10. Target dan Capaian pada Rincian Output 7 (Kinerja Direktorat pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA)

Pencapaian terhadap Komponen pada RO ini dilakukan dengan menyelenggarakan paket kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA. Pada awal tahun anggaran paket kegiatan ini mendapatkan anggaran sebesar Rp 300.000.000,00. Namun pada revisi DIPA 1, paket kegiatan ini terkena pemblokiran anggaran yang disebut automatic adjustmen namun anggaran tersebut masih melekat pada pagu anggaran Direktorat PPISDA sehingga menyebabkan capaian anggaran tidak

maksimal. Pada akhir tahun, tepatnya revisi DIPA 8, anggaran automatic adjustmen telah di hilangkan dari pagu DIPA Direktorat PPISDA. Sehingga, untuk paket kegiatan ini tidak ada pencapaian realisasi anggaran. Hanya saja paket ini tetap membuat laporannya yaitu Laporan Kinerja Dierktorat PPISDA.

4.2. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Perbandingan kinerja bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi atas keberhasilan dan/atau kegagalan sesuai target yang diperjanjikan pada tahun berjalan. Pada laporan kinerja ini disajikan perbandingan dalam beberapa aspek, antara lain: perbandingan capaian kinerja dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan capaian kinerja dengan standar nasional.

4.2.1 Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Pada tabel 4.11 terdapat perbandingan capain kinerja Direktorat PPISDA selama 3 tahun di periode renstra 2020- 2024. Jika disandingkan capain kinerja selama 3 tahun ini dengan rencana pagu anggaran yang ada di renstra dan pagu anggaran yang ada di DIPA, tahun 2023 mengalami kenaikan. Pada tahun pertama (2020) pagu anggaran PPISDA pada renstra sebesar 11.043 (sebelas milyar empat puluh tiga juta rupiah), pagu dipa sebesar 11.042 (sebelas milyar empat puluh dua juta rupiah), capaian output mencapai angka 20 lebih besar dari target sebesar 19 dengan presentasi angka sebesar 24,56 % dari target sebesar 25 %. Pada tahun kedua (2021) pagu anggaran PPISDA pada renstra sebesar 16.000 (enam belas milyar), pagu dipa sebesar 11.048 (sebelas milyar empat puluh delapan juta rupiah) capain output hanya 13 lebih rendah dari target renstra sebesar 14 dengan capaian presentasi tahun 2021 sebesar 24,25 % dari target 25 %. Pada tahun ketiga (2022) pagu anggaran PPISDA pada renstra sebesar 47.290 (empat puluh tujuh milyar dua ratus Sembilan puluh juta rupiah), pagu dipa setelah revisi sebesar 9.494 (Sembilan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah) capain output hanya 18 lebih rendah dari target renstra sebesar 19. Namun pada tahun 2023 ini Direktorat PPISDA menggunakan target DIPA sebagai pedoman perhitungan capaian dikarenakan anggaran yang tercantum dalam PK sama dengan anggaran yang ada di DIPA. Karena hal tersebut presentasi perhitungan capaian kinerja Dierktorat PPISDA tahun 2022 sebesar 25% dari target 25 %.

NO	PERBANDINGAN	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU Dan Perumahan				
Indikator Kinerja: Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sda				
1	PAGU RENSTRA (rupiahdlm juta)	11.043	16.000	47.290
2	PAGU DIPA (rupiahdlm juta)	11.042	11.048	9.494
3	CAPAIAN ATAS TARGET PK	24,56%	24,25%	25%
4	CAPAIAN ANGGARAN (rupiahdlmjuta)	10.081 (90,61%)	10.022 (90,72%)	9.368 (98,67%)
5	CAPAIAN OUTPUT	20	15	18

Tabel 4.11. Perbandingan Capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya



4.2.2 Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat PPISDA dengan target jangka menengah

Perbandingan capaian kinerja dengan target jangka menengah menggunakan data capaian tahun 2020-2022 dan Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020-2024. Berdasarkan data tersebut, diperoleh informasi sebagai berikut:

N O	OUTPUT KEGIATAN		SATUAN	TARGET RENSTRA 2020-2024	CAPAIAN KINERJA				PROGRES CAPAIAN
					2020	2021	2022	TOTAL	
1	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA			17	4	4	2	10	59%
	1	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA	RK	6	2	2	1	5	83%
	2	Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur SDA	RK	11	2	2	1	5	45%
2	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur SDA			7	1	1	1	3	43%
	1	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur SDA	RK	7	1	1	1	3	43%
3	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA			18	3	4	3	10	56%
	1	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA	RK	9	2	1	1	4	44%
	2	Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA	RK	9	1	3	2	6	67%
4	Dukungan Kerjasama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA			5	1	1	1	3	60%
	1	Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja sama Investasi Infrastruktur SDA	RK	5	1	1	1	3	60%
5	Proyek KPBU SDA yang di kerjasamakan			18	3	1	5	9	50%
	1	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur SDA	DOK	9	3	1	1	1	56%
	2	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur SDA	KSPK	9	0	0	5	5	56%
6	NSPK Pembiayaan Infrastruktur SDA			12	4	2	0	6	50%
	1	Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur SDA	NSPK	12	4	2	0	6	50%
7	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan SDA			16	3	1	4	8	50%
	1	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	LAP	16	3	1	4	8	50%
8	Kinerja Pembiayaan Infrastruktur SDA			5	1	1	1	3	60%
	1	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	LAP	5	1	1	1	3	60%
TOTAL				98	20	15	18	53	54%

Tabel 4.12. Perbandingan Capaian kinerja dengan target jangka menengah

Pada tabel 4.12 dapat dilihat, capaian kinerja Direktorat PPISDA selama 3 tahun ini dibandingkan dengan target renstra periode 2020-2024 dirata-rata nilainya sebesar 54 %. Dari 11 indikator output kegiatan, capaian yang nilai persentasinya masih di bawah 50 % ada 3 indikator output kegiatan yaitu Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur SDA (45%), Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur SDA (43%), Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA (44%).

Dalam mencapai target jangka menengah, terdapat beberapa kondisi dan tantangan yang dihadapi, antara lain:

1. Keterbatasan alokasi anggaran di tahun berjalan dengan yang tercantum dalam Renstra 2020-2024, menyebabkan keterbatasan ruang gerak dalam menjalankan rencana kegiatan yang telah disusun di tahun berjalan tersebut.
2. Perubahan kebijakan hampir di setiap tahun berjalan anggaran menyebabkan perlunya penyesuaian peraturan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga mempengaruhi target dan realisasi di tahun berjalan tersebut.
3. Dokumen Renstra 2020-2024 tidak dapat dilakukan revisi sehingga masukan/perubahan target masing-masing kegiatan hanya dapat diakomodir melalui dokumen evaluasi paruh waktu Renstra Direktorat Jenderal.



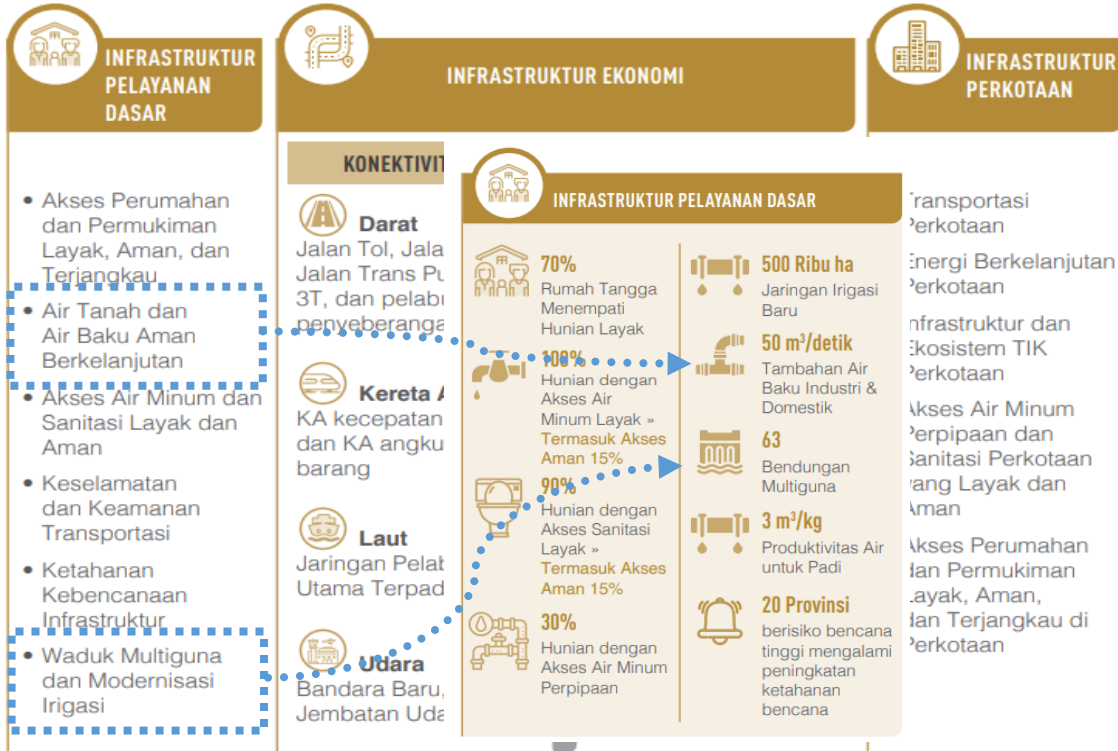
4.2.3 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Dalam RPJMN 2020-2024 menyebutkan bahwa dalam pembangunan infrastruktur, terdapat beberapa strategi dalam pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar, yang salah satunya adalah air tanah dan air baku aman berkelanjutan, waduk multiguna dan modernisasi irigasi.



PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

STRATEGI



Sumber: Ringkasan Eksekutif RPJMN 2020-2024

Perbandingan capaian kinerja dengan standar nasional menggunakan data capaian tahun 2020-2022 dan RPJMN 2020-2024. Capaian Kinerja Direktorat PPISDA TA 2022 yang berjumlah 5 kesepakatan mendukung program RPJMN mengenai pembangunan infrastruktur layanan dasar: 1. air tanah dan air baku aman berkelanjutan; 2. serta waduk multiguna dan modernisasi irigasi yaitu: Pemeliharaan Bendungan dan Penyediaan Infrastruktur PLTM Bintang Bano (Unsolicited), Bendungan Bodri (solicited) dan PLTA Tigadihaji (unsolicited), DI Komering (unsolicited) dan Revitalisasi Dan Modernisasi Irigasi Sistem Interkoneksi High Level Diversion (HLD) Wilayah Sungai (WS) Lombok (unsolicited). Untuk segala isu dan permasalahan yang dihadapi selama pencapaian target tersebut, terlampir dalam bab V sub bagian permasalahan.

4.3. REALISASI ANGGARAN

4.3.1 Realisasi Anggaran per RO TA 2022

Realisasi anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2022 berdasarkan e-monitoring PUPR adalah sebesar Rp9.368.348.000,00 atau sekitar 98,67% dari pagu yang diterima yaitu sebesar Rp11.250.000.000,00 dan kemudian di revisi menjadi Rp9.494.539.000,00. Sedangkan capaian fisik sebesar 99,03%.

KOD E	KRO	SATU AN KRO	RO	SAT RO	PAGU (Rp dlm ribuan)	REALISASI (Rp dlm ribuan)	REALISASI		FISIK	
							RN (%)	RL (%)	RN (%)	RL (%)
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur SDA					9.494.539	9.368.348	100	98,67	100	99,03
ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	RK	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA	RK	1.420.303	1.363.731	100	96,02	100	96,41
			Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur SDA	RK	854.898	851.327	100	99,58	100	100
			Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA	RK	2.620.541	2.590.930	100	98,87	100	99,18
			Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	RK	745.589	740.090	100	99,26	100	100
AEE	Kemitraan	KSPT	Proyek KPBU SDA yang Siap Dikerjasamakan	KSP T	1.897.142	1.893.452	100	99,81	100	100
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	LAP	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	LAP	976.066	972.584	100	99,64	100	100
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	LAY	Layanan Perkantoran	LAY	980.000	956.234	100	97,57	100	98,00
Sumber : Emonitoring online status 31 Desember 2022										

Sumber : Emonitoring online status 31 Desember 2022

Tabel 4.13. Realisasi anggaran per Rincian Output TA 2022

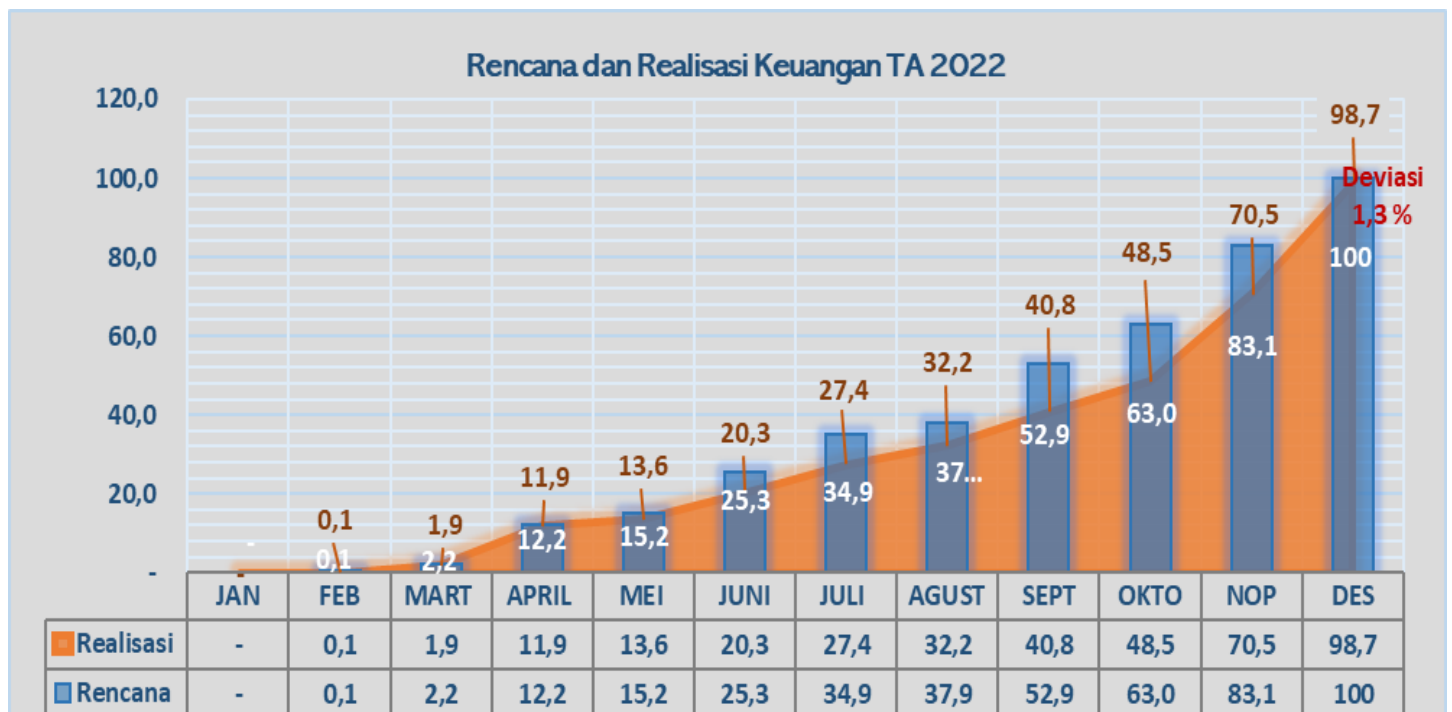
4.3.2 Realisasi Anggaran per Paket Kegiatan TA 2022

Komponen	Kode	Paket Kegiatan	S/ K	Pagu	Realisasi	Keuangan		Fisik	
				(Rp dlm ribuan)	(Rp dlm ribuan)	RN (%)	RL (%)	RN (%)	RL (%)
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur SDA				9.494.539	9.368.348	100	98,67	100	99
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA	4197.ABF .001.051. A	Penyusunan Rencana Kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA TA 2023	S	630.484	613.641	100	97,33	100	98
	4197.ABF .001.051. B	Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid- 19 di Lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	S	305.264	270.786	100	88,71	100	89
Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur SDA	4197.ABF .001.052. B	Penyusunan Identifikasi dan Pipeline Proyek KPBU Sektor SDA TA 2022	S	484.555	479.304	100	98,92	100	99
Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur SDA	4197.ABF .002.051. A	Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Sektor SDA	S	854.898	851.327	100	99,58	100	100
Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA	4197.ABF .003.051. A	Penyusunan Kajian Prastudi Kelayakan KPBU Sektor SDA TA 2022	S	1.119.750	1.108.271	100	98,97	100	99
Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA	4197.ABF .003.052. A	Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU <i>Brownfield</i> Sektor SDA	S	511.276	500.051	100	97,80	100	98
	4197.ABF .003.052 B	Penyusunan Evaluasi Kajian Studi Kelayakan KPBU <i>Unsolicited</i>	S	989.515	982.608	100	99,30	100	100

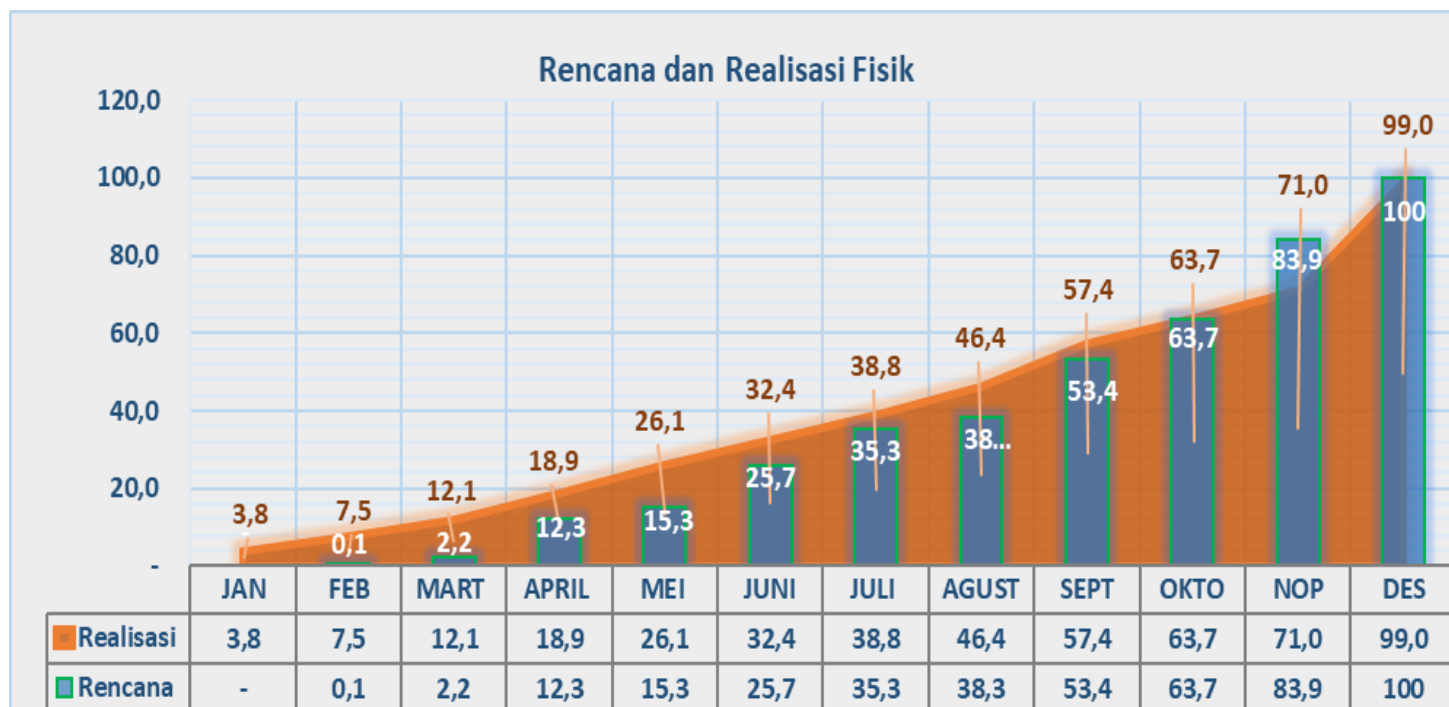
		Sektor SDA TA 2022							
Penyiapan Dokumen Kerja Sama Investasi Infrastruktur SDA	4197.ABF.004.051 A	Penyiapan Dokumen Pengusahaan Dukungan Pemerintah dalam Pelaksanaan Proyek KPBU Sektor SDA TA 2022	S	745.589	740.090	100	99,26	100	100
Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur SDA	4197.AEE.001.051 A	Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Infrastruktur SDA TA 2022	S	861.207	858.723	100	99,71	100	100
Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur SDA	4197.AEE.001.052 A	Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Bendungan TA 2022	S	1.035.935	1.034.729	100	99,88	100	100
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	4197.EBD.953.051 A	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Infrastruktur SDA TA 2022	S	497.295	495.766	100	99,69	100	100
	4197.EBD.953.051 B	Penyusunan Pengelolaan Risiko Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Infrastruktur SDA (<i>Automatic Adjustment</i>)	S	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	4197.EBD.953.051 C	Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan KPBU SDA Melalui Media Informasi	S	239.550	238.477	100	99,55	100	100

	4197.EBD .953.051 D	Penyusunan Pengelolaan Risiko Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Infrastruktur SDA	S	239,2210	238.341	100	99,63	100	100,00
Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	4197.EBD .953.052 A	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA Tahun 2022 (Automatic Adjustment)	S	0	0	0,00	-	0,00	0,00
Layanan Perkantoran	4194.EBA .994.002 M	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPISDA	S	980.000	956.234	100	97,57	100	98,00

Tabel 4.14. Realisasi anggaran per paket kegiatan TA 2022



Grafik. 4.13 Sandingan Rencana dan Capaian anggaran per bulan selama TA 2022



Grafik. 4.14 Sandingan Rencana dan Capaian Fisik per bulan selama TA 2022

4.3.3 Sandingan Realisasi Anggaran TA 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya

Selama periode periode renstra 2020-2024, capaian realisasi anggaran Direktorat PPISDA mengalami peningkatann. Capaian realisasi anggaran di tahun 2020 sebesar 90,61%, sedangkan capaian pada tahun anggaran 2021 meningkat 0,11%. Pada tahun anggaran 2022 realisasi anggaran Direktorat PPISDA mengalami peningkatan kembali 7,95% dengan angka capaian sebesar 98,67%. Berikut sandingan realiasi anggaran 2020-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

KODE	PAKET KEGIATAN	2020			2021			2022		
		PAGU	Realisasi	%	PAGU	Realisasi	%	PAGU	Realisasi	%
4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur SDA	11.042.309	10.081.213	90,61	11.048.405	10.022.757	90,72	9.494.539	9.368.348	98,67
KRO	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	6.899.227	6.363.540	92,24	8.025.289	7.207.438	89,81	5.641.331	5.546.078	98,31
RO	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA	1.893.811	1.788.415	94,40	905.791	774.013	81,89	1.420.303	1.363.731	96,02
RO	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur SDA	945.822	857.094	90,62	1.488.774	1.259.732	90,62	854.898	851.327	99,58

RO	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA	3.602.995	3.272.648	93,27	4.902.802	4.570.369	74,28	2.620.541	2.590.930	98,87
RO	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	456.599	445.383	97,54	727.922	603.324	82,88	745.589	740.090	99,26
AFA	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	1.539.155	1.413.213	90,41	673.665	543.803	80,72	0	0	0
RO	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.539.155	1.413.213	90,41	673.665	543.803	80,72	0	0	0
KRO	Kemitraan	1.468.500	1.328.347	89,74	2.166.922	2.044.809	95,87	1.897.142	1.893.452	99,81
RO	Proyek KPBU SDA yang Siap Dikerjasamakan	1.468.500	1.328.347	89,74	2.166.922	2.044.809	95,87	1.897.142	1.893.452	99,81
KRO	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.135.427	976.113	85,97	1.162.029	1.126.780	96,97	976.066	972.584	99,64
RO	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	959.549	834.066	85,56	945.372	918.425	97,15	976.066	972.584	99,64
RO	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	175.878	142.047	83,61	216.657	208.355	96,17	0	0	0

Sumber : Emonitoring online

Tabel 4.15. Sandingan Realisasi anggaran TA 2020-2022

Pada tahun 2022, terdapat 2 Rincian Output yang tidak ada realisasi anggarannya yaitu RO NSPK (tidak ada alokasi anggarannya pada DIPA) dan RO Kinerja (mengalami pemblokiran anggaran (automatic adjustmen) di awal tahun anggaran 2022).

4.4. ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI

Tahun 2022 merupakan tahun ke 3 Pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia. Walaupun persentasi korban pandemi mulai menurun, namun kegiatan tetap dihimbau untuk dibatasi. Kementerian PUPR melakukan upaya realokasi anggaran dan automatic adjustmen (terkhusus pada KRO Layanan manajemen kinerja internal) dan refocusing anggaran di beberapa kegiatan pada dalam rangka penghematan. Pagu awal tahun 2022, Direktorat PPSDA mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 10.250.000.000,00 (sepuluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak termasuk anggaran layanan perkantoran. Setelah mengalami revisi DIPA di akhir tahun pagu anggaran Direktorat PPSDA sebesar Rp 9.494.539.000,00 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) seperti yang telah dijelaskan

dalam Bab 3 tentang DIPA. Namun hal tersebut tidak terlalu mempengaruhi target dari masing-masing output, karena capaian kinerja Direktorat PPISDA tetap bisa mencapai 25 % dari target PK sebesar 25 %. Sedangkan berdasarkan realisasi anggaran capaian kinerja Direktorat PPISDA mencapai 98,67 % setara dengan Rp 9.368.348.000,00 (sembilan milyar tiga ratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Berikut merupakan upaya efektivitas dan efisiensi yang diterapkan oleh Direktorat PPISDA dengan tetap memperhatikan pencapaian yang optimal atas pelaksanaan anggaran dan kinerja, antara lain:

- a. Mendorong digitalisasi keterpaduan pelaporan dan inputing data kinerja serta pertanggung jawaban anggaran pada sistem informasi eksisting, antara lain: Krisna Bappenas-Kemenkeu, Sakti Kemenkeu, i-eMonitoring PUPR, SiRUP-LPSE LKPP, e-Sakip PUPR dan Smart DJA Kemenkeu.
- b. Pemanfaatan teknologi menjadi alternative paling efektif dalam mencapai target yang telah di rencanakan. Sisi positif dari pandemi Covid mulai terbiasa pertemuan/rapat tanpa harus dilakukan dengan cara tatap muka (pertemuan virtual: zoom meeting, google working space, whatsapp Cisco Webex), sehingga penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan di luar kantor mempertimbangkan skala prioritas dan berbasis anggaran.
- c. Menjaga konsistensi penjadwalan kegiatan yang telah disusun dengan memperhatikan kualitas output kinerja optimal.
- d. Memberikan kesempatan dan motivasi kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan pengembangan karir melalui pendidikan dan pelatihan.

4.5. ANALISIS KINERJA ORGANISASI

Direktorat PPISDA dalam mencapai pelaksanaan pencapaian targetnya, memiliki banyak kendala dan permasalahan baik internal maupun eksternal.

4.5.1. Analisis Keberhasilan

Dalam pencapaian kinerja Direktorat PPISDA, ditemukan beberapa faktor yang mendukung keberhasilan dalam mencapai kinerja diantaranya:

1. Dukungan sarana dan prasarana ketersediaan gedung/ruang kerja yang memadai untuk menampung jumlah pegawai di lingkungan Direktorat PPISDA. Dalam hal pelaksanaan tugas, baik yang berupa perangkat keras maupun perangkat lunak telah dilakukan pemutakhiran hardware dan software, guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai;

2. Hubungan yang erat dengan para *stakeholder*/pemangku kepentingan telah terjalin baik. Koordinasi secara intensif dengan lintas unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR dan antar Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
3. Dukungan dari Kantor Bersama dalam melakukan monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan KPBU Infrastruktur SDA;
4. Tersedianya Layanan Data dan Informasi mengenai progress proyek KPBU melalui dashboard Simpul KPBU, memudahkan pimpinan di lingkungan DJPI untuk mendapatkan informasi yang up to date serta pelaporan progres proyek yang disampaikan secara berkala melalui Laporan Mingguan;
5. Disusunnya action plan proyek KPBU sektor SDA untuk memudahkan dalam penyelesaian masalah yang terjadi.

4.5.2. Analisis Kegagalan

Dalam pencapaian kinerja Direktorat PPISDA, ditemukan beberapa faktor yang menghambat sehingga menyebabkan kegagalan/keterlambatan dalam pencapaian kinerja diantaranya:

1. Kuantitas SDM di lapangan masih belum memadai. Beban kerja Direktorat PPISDA yang cukup berat, dan luasnya ruang lingkup pekerjaan, ternyata belum disertai dengan jumlah dan kualitas SDM yang memadai;
2. Ketidak seimbangan antara jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan non ASN baik teknis maupun non teknis. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya ketidakseimbangan beban kerja dengan jumlah Sumber Daya Manusia yang tersedia;
3. Belum seluruh SDM memahami indikator keberhasilan dari masing-masing tugas dan fungsinya dan berjenjang dari atasan langsungnya.
4. Alokasi anggaran yang terbatas mempengaruhi optimalisasi perencanaan dan ekspansi kerjasama terhadap investasi pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan khususnya sektor SDA;
5. Belum maksimalnya penerapan *Standar Operational Procedure* (SOP) dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan bahkan beberapa kegiatan masih belum ada SOPnya;
6. Belum rincinya bentuk *Standar Operational Procedure* (SOP) yang sudah ada untuk dapat dikerjakan oleh para pegawai dan dievaluasi oleh pimpinan di lingkungan unit kerja Direktorat PPISDA;
7. Dalam pelaksanaan proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air, dokumen yang dibutuhkan dari pemrakarsa sering mengalami keterlambatan. Hal tersebut berpengaruh terhadap *timeline*;
8. Pandemi Covid-19 yang dampaknya masih dirasakan hingga akhir tahun 2022 sehingga mempengaruhi aktivitas sosial di masyarakat secara tidak langsung

berpengaruh pada pelaksanaan survei ke lokasi maupun pelaksanaan kegiatan yang mengharuskan untuk bertatap muka.

4.6. Analisis Dampak dan Manfaat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2020 pasal 545 tentang tugas Direktorat PPISDA yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air. Pada tahun anggaran 2022 Direktorat PPISDA melakukan Upaya untuk meningkatkan kinerja Direktorat PPISDA terkait pelaksanaan KPBU sektor Sumber Daya Air dengan cara melakukan percepatan proyek KPBU SDA yang telah dan sedang dilaksanakan, hal ini bertujuan untuk mendukung capaian target Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sesuai Renstra 2020-2024. Berikut diuraikan beberapa manfaat kinerja output yang dimaksud, antara lain:

1. Pedoman Service Level Agreement Subsektor Irigasi;



Direktorat PPISDA menyusun Service Level Agreement (SLA) Subsektor Irigasi yang nantinya akan digunakan sebagai acuan pemberian layanan oleh Badan Usaha. Adanya SLA memungkinkan PJPK untuk melakukan penilaian terhadap Badan Usaha dalam mematuhi Perjanjian KPBU, hukum yang berlaku, persyaratan teknis, Indikator Kinerja Bangunan Jaringan Irigasi maupun Indikator Kinerja Layanan Operasi dan Pemeliharaan dalam pemenuhan layanan air irigasi sebagaimana yang telah direncanakan serta ketentuan lingkungan dan sosial. Selain itu, SLA digunakan sebagai tolok ukur pembayaran Availability Payment (AP) oleh pemerintah kepada Badan Usaha. serta digunakan sebagai tolok ukur pembayaran Availability Payment (AP) oleh pemerintah kepada Badan Usaha. Rumusan SLA untuk subsektor irigasi disusun mengacu Indeks Kriteria Sistem Irigasi (IKSI) dengan penilaian yang dapat dilakukan secara mobile (e-PAKSI) serta Irrigation Service Agreement (ISA) yang sedang dikembangkan melalui loan dari World Bank (Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project/ SIMURP).

2. Buku Profil Risiko Proyek KPBU Subsektor Irigasi;
Pada TA 2022, Direktorat PPISDA menyusun Profil Risiko Proyek KPBU Subsektor Irigasi yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan kajian



risiko. Hal ini dikarenakan, alokasi risiko yang transparan dan terukur menjadi dasar terlaksananya kemitraan bagi para pihak serta berkontribusi pada kesuksesan penyelesaian proyek di masa konstruksi hingga operasi. Dengan demikian, analisis yang komprehensif diperlukan sehingga dapat memberikan insentif bagi pihak (Pemerintah maupun Badan Usaha) yang paling efektif dan efisien mengelola risiko. Selain itu, kajian risiko diperlukan dalam upaya mitigasi dan alokasi risiko sehingga berimplikasi pada meningkatnya kepastian bagi badan usaha serta lembaga pembiayaan dalam berinvestasi dan memberikan pembiayaan pada

proyek KPBU sub-sektor irigasi. Profil Risiko Proyek KPBU Subsektor Irigasi yang disusun mencakup risiko lokasi, desain dan konstruksi, pendapatan, sponsor, finansial, operasi, interface, force majeure, konektivitas jaringan, kepemilikan aset, serta politik dan kebijakan.

3. Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Proyek KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang memanfaatkan Bendungan milik Kementerian PUPR;



Pada TA 2022, Direktorat PPISDA menyusun Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Proyek KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang memanfaatkan bendungan milik Kementerian PUPR. Adanya pedoman ini diharapkan dapat menjadi salah satu alat pengendalian dan perangkat dalam memantau kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan termasuk pemanfaatan dan keberlanjutan dari program. Dengan demikian, apabila ditemui adanya permasalahan baik pada tahap perencanaan, penyiapan, transaksi hingga pelaksanaan perjanjian KPBU, maka dapat diinventarisir dan selanjutnya segera dirumuskan

alternatif solusinya. Pedoman yang disusun berfokus pada tahap perencanaan hingga transaksi (financial closed), namun juga diulas sedikit mengenai pelaksanaan pengendalian di tahap pelaksanaan perjanjian kerja sama. Pedoman ini menggunakan metode checklist tracking, dan dilengkapi dengan formulir pemantauan dan evaluasi

4. Penerbitan Buletin PPISDA

Pada TA 2022, Direktorat PPISDA juga menerbitkan Buletin PPISDA setiap tiga bulan sekali. Buletin ini menjadi media untuk menyampaikan informasi mengenai perkembangan proses pelaksanaan proyek KPBU sektor Sumber Daya Air kepada publik sehingga diharapkan berimplikasi pada meningkatnya minat Badan Usaha untuk berinvestasi melalui pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air.



4 edisi Buletin PPISDA yang di terbitkan di TA 2022

4.7. PENERAPAN MANAJEMEN Resiko

Dalam mencapai tujuan, setiap organisasi pasti berhadapan dengan berbagai masalah/kendala. Masalah yang dihadapi ada kemungkinan akan menjadi resiko di masa depan dan bila tidak ditangani sejak awal akan mempengaruhi capaian kinerja organisasi. Manajemen risiko membantu organisasi dalam mengelola setiap risiko yang mungkin terjadi dan berdampak pada pencapaian tujuan organisasi.

Direktorat PPISDA telah melaksanakan penyelenggaraan manajemen risiko sesuai dengan amanat yang terdapat di Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan cara melakukan Pemantauan inovasi pengendalian. Dalam Tahapan ini memastikan penerapan inovasi pengendalian yang telah dinyatakan dalam matriks pernyataan risiko. Pemantauan secara berkala dilakukan untuk menilai seberapa efektif sebuah inovasi pengendalian dan menilai kemampuan suatu inovasi pengendalian dalam menurunkan nilai kemungkinan dan atau dampak dalam setiap risiko. Dengan adanya tabel pemantauan inovasi pengendalian, dapat diketahui lebih awal mitigasi resikonya. Sehingga pencapaian target kinerja dapat dilaksanakan lebih maksimal.

Berikut ini tabel pemantauan inovasi pengendalian pada tingkat UPRT-2 Direktorat PPISDA:

No.	Pernyataan Risiko	Inovasi Pengendalian (Mitigasi)	Target Waktu
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU Dan Perumahan			
Indikator Kinerja: Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sda			
1	Pelaksanaan tahap penyiapan KPBU tidak sesuai target	Koordinasi intensif antara PJPK dengan <i>stakeholder</i> terkait dalam proses keberlanjutan suatu proyek	Sepanjang tahun 2022
2	Keterbatasan anggaran untuk memenuhi capaian output	a. Menyusun skala prioritas kegiatan di lingkungan Direktorat PPISDA dan <i>exercise</i> skenario; b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Direktorat PPISDA per bulan dan triwulan; c. Menyusun perubahan rencana kegiatan	Sepanjang tahun 2022
3	Penundaan dan/atau penghentian proyek KPBU sektor sumber daya air yang telah memasuki tahap penyiapan KPBU	Berkoordinasi rutin dengan <i>stakeholder</i> terkait yakni Ditjen. SDA, Setjen Kementerian PUPR, Bappenas, dan PT.SMI dalam setiap proses penyusunan regulasi, perencanaan dan penyiapan KPBU sektor sumber daya air	Sepanjang tahun 2022
4	Kurangnya minat calon investor pada proyek KPBU sektor sumber daya air	a. Meningkatkan kualitas dokumen Penyiapan KPBU sektor SDA yang dapat menarik minat Calon Investor; b. Penambahan intensitas pembahasan dan pelaksanaan <i>Market Sounding</i> dan <i>Market Consultation</i> ;	Sepanjang tahun 2022

Tabel 4.16. Tabel pemantauan inovasi pengendalian pada tingkat UPRT-2 Direktorat PPISDA

Terlampir Matriks Pemantauan Inovasi Pengendalian pada Tingkat UPR T-2 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air pada lampiran laporan ini.

4.8. Evaluasi Sakip Direktorat PPISDA

4.8.1. Evaluasi Sakip TA 2021

Berdasarkan surat no: UM.0201-Pp/35 tanggal 11 Februari 2022 tentang Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Direktorat PPISDA Tahun Anggaran 2021, yang bertindak selaku Evaluator adalah Petugas Sakip dari Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan didapatkan hasil evaluasi terhadap SAKIP Direktorat PPISDA adalah sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	BOBOT/NILAI MAKS	NILAI HASIL EVALUASI TA. 2020	NILAI HASIL EVALUASI TA. 2021	GAP
1.	Perencanaan Kinerja	30 %	25,23	27,89 %	2,66 ↑
2.	Pengukuran Kinerja	25 %	19,73	19,69 %	↓ 0,04
3.	Pelaporan Kinerja	15 %	12,8	12,39 %	0,41 ↓
4.	Evaluasi Kinerja	10 %	6,75	6,88 %	↑ 0,13
5.	Capaian Kinerja	20 %	12,22	12,01 %	0,21 ↑
	TOTAL	100 %	76,74	78,86 %	

Tabel 4.17. Tabel Penilaian Evaluasi SAKIP TA 2021 Direktorat PPISDA disandingkan dengan TA 2020

Nilai yang di dapat dari hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Direktorat PPISDA tahun 2021 sebesar 78,86% dengan predikat BB (sangat baik). Implementasi SAKIP pada tahun 2021 meningkat 2,12point dari tahun 2020 dengan nilai 76,74%. Berdasarkan hasil evaluasi di atas, diketahui terdapat rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti dalam upaya perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja tahun 2022, antara lain:

NO	REKOMENDASI EVALUATOR	TINDAK LANJUT
1	PERENCANAAN	
	a. Dalam perencanaan kinerja perlu untuk mempertimbangkan praktik-praktik terbaik dalam perencanaan program maupun proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air.	Saat ini di Indonesia belum ada Praktik terbaik atau proyek infrastruktur dalam perencanaan program maupun proyek KPBU SDA. Namun Direktorat PPISDA telah mengadopsi pembelajaran dari proyek lain misalnya Proyek KPBU bidang jalan jembatan yang menggunakan AP dan ditindaklanjuti dengan menyelenggarakan <i>lesson learned</i> . Selain itu, Bendungan Merangin di Jambi juga menjadi percontohan dalam perencanaan Bendungan Bodri di Kendal.
	b. Perlu melakukan reviu terhadap Dokumen Renstra unit kerja (Eselon II) secara berkala.	Reviu Renstra hanya dilaksanakan di tingkat Unit Organisasi (DJPI). Namun Direktorat PPISDA telah melaksanakan Evaluasi Paruh Waktu Renstra pada tanggal 8 April 2022. Nota dinas (terlampir di akhir laporan ini)
2	PENGUKURAN KINERJA	
	a. Realisasi atau capaian tahun berjalan perlu dibandingkan dengan standar nasional atau RPJMN;	Realisasi telah disandingkan dengan RPJMN dan Standar Nasional tercantum dalam BAB 4.

	b. Realisasi atau capaian kinerja unit kerja perlu dibandingkan dengan standar nasional atau dengan organisasi / instansi sejenis yang setara atau sekelas.	Realisasi hanya di sandingkan dengan strategi Nasional tercantum dalam BAB 4. Namun belum di sandingkan dengan unit kerja setingkat karena tidak ada unit kerja yang RO nya sama dengan Direktorat PPISDA.
3	PELAPORAN KINERJA	
	a. Informasi tentang analisis efisiensi sumber daya perlu dijelaskan secara ekstensif;	Informasi yang dijelaskan dalam laporan kinerja berikutnya sdh bersifat ekstensif
	b. Informasi kinerja perlu digunakan secara menyeluruh untuk perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan peningkatan kinerja.	Informasi yang digunakan dalam laporan telah menjadi evaluasi untuk perencanaan di tahun berikutnya. Dengan melakukan evaluasi paruh waktu renstra. Pada tanggal 8 April 2022.
4	EVALUASI KINERJA	
	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja perlu ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan, penerapan manajemen kinerja, dan mengukur keberhasilan unit kerja.	- Telah di laksanakan Rapat Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP TA. 2021 dan Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Quartal I TA. 2022
5	CAPAIAN KINERJA	
	a. Capaian kinerja tahun 2021 tidak mencapai target;	Capaian kinerja TA 2021 tidak mencapai target, beberapa hal menjadi kendalanya, salah satunya: dinamika beberapa proyek yang menyebabkan target yang sudah disusun dan dilaksanakan harus dihentikan karena pembatalan beberapa proyek.
	b. Capaian tahun 2021 lebih rendah dari tahun 2020;	Capaian TA 2021 lebih rendah dari tahun 2020. Namun tahun 2022 ini capaian kinerja lebih tinggi dari tahun 2021. Data terlampir dalam Laporan ini bab 4.

c. Belum adanya inisiatif pemberantasan korupsi yang konkrit yang meningkatkan kepercayaan masyarakat dan inovasi manajemen kinerja; Terjadi penurunan kinerja yang dilaporkan (output dan outcome) sehingga Capaian Kinerja agar dapat ditingkatkan,	Upaya pemberantasan korupsi yang konkrit akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait lainnya dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat dan inovasi manajemen kinerja.
---	--

Tabel 4.18. Tabel Penilaian Evaluasi SAKIP TA 2021 Direktorat PPISDA

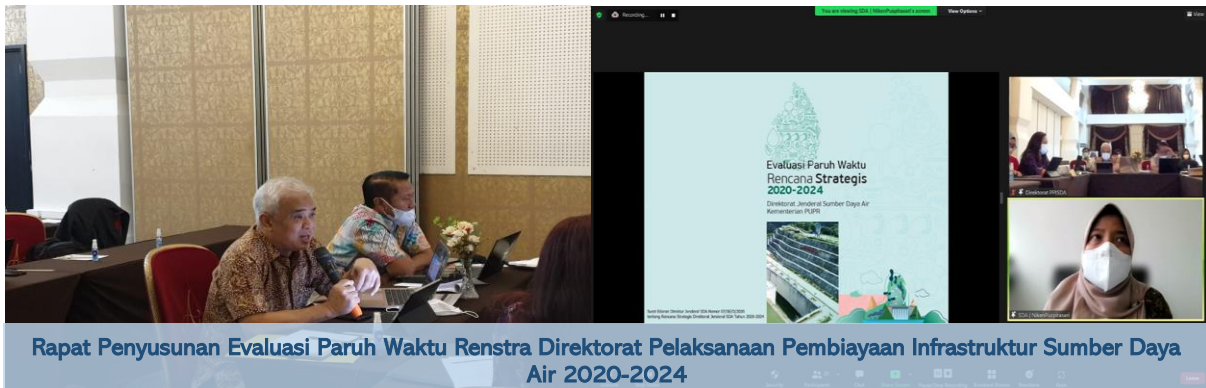
4.8.2. Tindak Lanjut terhadap Evaluasi Sakip 2021

Tindak lanjut terhadap Evaluasi Sakip 2021 telah dilakukan beberapa rapat diantaranya;

1. Rapat Penyusunan Evaluasi Paruh Waktu Renstra Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air 2020-2024, dilaksanakan pada tanggal 8 April 2022 (nota dinas terlampir)
Point-point pembahasan :
 - a. Berdasarkan *timeline* EPW Renstra Kementerian PUPR yang disusun oleh BPIW, Reviu Renstra yang dilakukan adalah terkait target dan capaian, permasalahan, isu strategis, dan arah kebijakan ke depan.
 - b. Berdasarkan Renstra DJPI 2020-2024, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air memiliki target 9 (sembilan) proyek yang siap dikerjasamakan pada periode 2020-2024, sedangkan pada EPW Renstra Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air terdapat 10 (sepuluh) proyek yang berpotensi untuk dilaksanakan melalui skema KPBU sehingga target berdasarkan Renstra DJPI diharapkan dapat terpenuhi.
 - c. Terdapat *gap* target kinerja berdasarkan Renstra dan realisasi pada 2020-2022 sebesar 10 di antaranya, yaitu: 5 rekomendasi kebijakan, 2 NSPK, dan 3 laporan, target kinerja berdasarkan Renstra adalah 53 dan realisasi kinerja adalah sebesar 43. *Gap* target kinerja disebabkan adanya penyesuaian dengan DIPA yang diperoleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air yang tidak sesuai dengan anggaran pada Renstra.
 - d. Berdasarkan RPJMN 2020-2024 terdapat 6 (enam) bendungan yang termasuk dalam rencana pembangunan bendungan baru menggunakan skema KPBU, yaitu: Bendungan Merangin, Bendungan Pasir Kopo, Bendungan Muara Juloi, Bendungan Sakagilas, Bendungan Krekeh dan Bendungan Kusan.
 - e. Namun demikian terjadi dinamisasi rencana KPBU yang disebabkan antara lain adanya proyek yang dikeluarkan, diganti, ditunda, dan adanya usulan proyek baru dari calon pemrakarsa maupun arahan dari Menteri PUPR.

Sehingga penyesuaian proyek untuk didanai melalui KPBU dari Ditjen. SDA meliputi: (1) Bendungan Merangin; (2) Bendungan Bodri; (3) Bendungan Muara Juloi; (4) Air Baku Karian *Intake* Petir; (5) Air Baku Sidan; (6) Air Baku Kedunglanggar; (7) Air Baku Kuwil; (8) NCICD *Stage* B; (9) Sabo Dam Merapi; (10) Daerah Irigasi Colo; (11) Daerah Irigasi Semen Krinjo; (12) Daerah Irigasi Komering; (13) *High Level Diversion* di Lombok; (14) Pemeliharaan Bendungan dan BGS PLTM Bintang Bano; (15) PLTA Bendungan Tigadihaji; (16) PLTA Bendungan Titab; (17) PLTA Bendungan Napun Gete; (18) PLTA Bendungan Rotiklot; dan (19) PLTA Bendungan Karalloe. Sehubungan dengan hal tersebut Dirjen. SDA akan menyampaikan nota dinas kepada Menteri PUPR untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.

- f. Pada Renstra Ditjen. SDA 2020-2024, salah satu isu yang terjadi adalah rendahnya pencapaian *output* khususnya untuk irigasi dan pengendalian banjir (di bawah 40%) dimana hal ini disebabkan tidak hanya masalah teknis tetapi juga pendanaan dan pengadaan tanah sehingga diharapkan dapat menjadi masukan bagi DJPI khususnya Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air untuk mendukung peningkatan pencapaian *output* tersebut melalui penerapan skema KPBU.
- g. Terkait kapasitas fiskal, Ditjen. SDA sampai saat ini belum melakukan *exercise* dalam rangka penganggaran AP, mengingat penganggaran AP dilaksanakan dalam jangka panjang dan kapasitas fiskal Ditjen. SDA juga sangat bergantung pada pagu yang diberikan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan.
- h. Berdasarkan informasi dari Direktorat Sistem Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, belum terdapat anggaran sebesar Rp300 Miliar untuk pengadaan tanah Bendungan Merangin pada Renja Ditjen. SDA TA. 2023. Apabila pengadaan tanah dibiayai oleh DIPA Ditjen. SDA maka akan berisiko terhadap terhambatnya proses KPBU karena Satker Tanah hanya mendapatkan anggaran per tahun sebesar Rp1 Triliun.
- i. Indikator *cut off* proyek yang siap ditawarkan yang telah disepakati adalah tersusunnya dokumen transaksi. Dengan *cut-off* Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air memiliki 2 (dua) proyek yang siap ditawarkan yaitu Proyek KPBU Bendungan Bodri dan Proyek KPBU Pemeliharaan Bendungan-BGS PLTM Bintang Bano. Namun demikian, pada Berita Acara Capaian Kinerja DJPI TA. 2021, dicantumkan bahwa tidak ada proyek KPBU sektor SDA yang siap dikerjasamakan sehingga diperlukan revisi Berita Acara.



2. Rapat Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP TA. 2021 dan Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Quartal I TA. 2022, dilaksanakan pada tanggal 11 April 2022 (Notadinas terlampir).

Point-point Pembahasan :

- Capaian kinerja Direktorat PPISDA pada TA 2021 adalah 24,25% dari target 25%.
- Hasil evaluasi implementasi SAKIP Direktorat PPISDA pada TA 2021 mencapai nilai 78,86% predikat BB (Sangat Baik). Pada TA 2022 diharapkan Direktorat PPISDA dapat mempertahankan/ meningkatkan nilai SAKIP.
- Tindak lanjut atas hasil evaluasi implementasi SAKIP TA 2021 dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk memperbaiki/ meningkatkan perencanaan kinerja pada TA 2022 sehingga dapat berimplikasi pada peningkatan nilai SAKIP pada tahun berikutnya.
- Realisasi keuangan di tingkat Kementerian PUPR sebesar 13,34% sementara DJPI sebesar 4,50% berdasarkan status database E-Monitoring pada 11 April 2022. Penyerapan DJPI merupakan progres terendah dari seluruh unit organisasi.
- Pada TA 2022, pagu anggaran Direktorat PPISDA adalah Rp11.250.000.000,00 (termasuk layanan perkantoran). Realisasi keuangan Direktorat PPISDA adalah Rp346.065.000,00 atau sebesar 3,08% dengan realisasi fisik sebesar 3,28%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar

Rp10.903.935.000,00 atau 96,92% (status E-Monitoring 11 April 2022 pukul 08.00 WIB).

- f. Sebanyak lima paket kegiatan realisasinya masih 0%, namun dua di antaranya merupakan paket kegiatan yang mengalami *automatic adjustment*. Saat ini telah diusulkan dua paket kegiatan baru.
- g. Direktorat PPISDA telah menyusun prognosis berdasarkan rencana penarikan anggaran hingga Desember 2022, yaitu 92,68% (pagu Rp10.250.000.000,00). Prognosis akhir tidak mencapai 100% karena terdapat *automatic adjustment*. Selain itu, Direktorat PPISDA juga telah menyusun rencana kegiatan pada Quartal II TA 2022.
- h. Pagu rencana belanja DJPI melalui bela pengadaan/ *digipay* terlaporkan >100% namun realisasi belanja masih 0%.
- i. Kendala/Isu pada Quartal I TA 2021 antara lain:
 - (1) Penyesuaian dan/atau penundaan beberapa kegiatan sebagai upaya antisipatif atas meningkatnya kasus terkonfirmasi positif covid-19;
 - (2) Penyesuaian kebijakan program/kegiatan; dan
 - (3) Ekstensi segmen COA pada SAKTI dalam rangka redesain sistem perencanaan dan penganggaran.
- j. Dalam upaya tertib administrasi, salah satu berkas pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas yang harus disampaikan ke Satker adalah Laporan Perjalanan Dinas/ Nota Dinas/ Dokumentasi.





BAB

5

- ⇒ **Kesimpulan**
- ⇒ **PERMASALAHAN**
- ⇒ **REKOMENDASI**

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja merupakan salah satu wujud nyata akuntabilitas kinerja yang kompleks pada instansi/organisasi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan anggaran serta target yang telah diamanatkan dalam Renstra, DIPA maupun Perjanjian Kinerja. Keberhasilan ataupun Kegagalan dalam pencapaian kinerjanya, semua tertuang dalam laporan kinerja. Dari proses perencanaan hingga akhir pencapaian kinerja.

Selama TA 2022, Direktorat PPISDA mengalami 4x Revisi DIPA dan Revisi Perjanjian Kinerja sebanyak 2x. Hal tersebut dikarenakan adanya automatic adjustmen dan Refocusing anggaran internal DJPI.

Capaian Direktorat PPISDA terhadap sasaran kegiatan (SK) meningkatnya penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 25% sesuai dengan target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja. Sedangkan capaian atas anggaran dalam DIPA mencapai angka 98,7% dari pagu anggaran setelah revisi sebesar Rp 9.494.539.000,00 (Sembilan milyar empat ratus Sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).

Direktorat PPISDA selama TA 2022 telah melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala sebagai berikut:

1. Laporan mingguan;
Pemantauan dan evaluasi mingguan yang dilakukan untuk melihat progres kinerja mingguan seperti: progress anggaran, progress proyek KPBU, kendala, isu strategis tindak lanjut serta kegiatan yang dilaksanakan selama seminggu.
2. Laporan Bulanan;
Pemantauan dan evaluasi bulanan yang dilakukan untuk mengukur progres kinerja setiap bulan seperti: progress anggaran, progres atas target Renstra dan Perjanjian Kinerja, progress proyek KPBU, kendala, isu strategis, tindak lanjut serta kegiatan yang dilaksanakan selama 1 bulan.
3. Evaluasi per Quartal, Pemantauan dan evaluasi bulanan yang dilakukan untuk mengukur progres kinerja per 4 bulan, waktu pelaksanaan:
 - a) Monitoring dan Evaluasi Proyek KPBU Sektor SDA Quartal I TA 2022 diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 di Grand Kemang Hotel

- b) Monitoring dan Evaluasi Proyek KPBU Sektor SDA dan Pembahasan Capaian Kinerja Direktorat PPISDA Air Quartal II TA 2022 diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 di Hotel Ambhara
- c) Monitoring dan Evaluasi Proyek KPBU Sektor SDA dan Pembahasan Capaian Kinerja Direktorat PPISDA Air Quartal III TA 2022 diselenggarakan bersamaan dengan Rapat Evaluasi Penyiapan KPBU TA 2022 dan Percepatan Pelaksanaan KPBU Sektor Sumber Daya Air TA 2023-2024 pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 di Hilton Bali Resort

5.2 PERMASALAHAN/KENDALA

Dalam melaksanakan berbagai kegiatan selama TA 2022, teridentifikasi beberapa kendala yang dihadapi untuk memenuhi target kinerja, yaitu:

- 1) Adanya kebijakan refocussing anggaran yang dilakukan beberapa kali menyebabkan proses penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat.
- 2) Infrastruktur Sumber Daya Air menghasilkan intermediate output sehingga pembiayaan dengan skema KPBU tidak dimungkinkan untuk menggunakan pengembalian dalam bentuk pembayaran oleh pengguna (user charge/ tarif). Implikasinya, pengembalian dalam bentuk pembayaran atas ketersediaan layanan (Availability Payment/ AP) terkendala oleh kapasitas fiskal yang dimiliki Kementerian PUPR, sebab terdapat beberapa kontrak tahun jaman (Multi Years Contract/ MYC).
- 3) Isu legal terkait kegiatan operasi dan pemeliharaan, khususnya pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 dan pada Pasal 57 ayat (8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 sehingga berdampak pada ruang lingkup proyek KPBU. Dengan demikian diperlukan sebuah payung hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan pada KPBU sektor Sumber Daya Air di Indonesia.
- 4) Kesiapan proyek yang tidak matang berimplikasi pada seringnya proyek berganti sehingga diperlukan pedoman/ tata cara untuk pengusulan proyek yang akan dibiayai dengan skema KPBU.
- 5) Proses penyiapan KPBU sektor Sumber Daya Air relatif lama, sebab belum ada preseden. Misalnya, proyek KPBU Bendungan Merangin yang dimulai dengan ekspose pada tanggal 25 Juni 2019, namun proses penyusunan dokumen FBC baru dilaksanakan tahun 2022; serta proyek KPBU Pemeliharaan Bendungan Bintang Bano dan Penyediaan Infrastruktur PLTM Bintang Bano Kapasitas 6,3 MW yang diinisiasi oleh Badan Usaha melalui penyampaian minat pada tanggal 10 November 2020 namun prakualifikasi baru dilaksanakan diakhir November 2022.

5.3 Rekomendasi

Berikut ini merupakan Rekomendasi untuk pelaksanaan KPBU sektor Sumber Daya Air antara

- 1) Perlunya upaya kolaboratif antara Kementerian PUPR dengan Kementerian Keuangan dalam rangka perencanaan penetapan besaran AP pada proyek KPBU sektor Sumber Daya Air, melalui beberapa strategi:
 - a. Fasilitasi pelaksanaan bimbingan teknis terkait skema KPBU-AP pada pihak-pihak terkait.
 - b. Melakukan estimasi kelayakan proyek dengan beberapa skema alternatif secara bersama-sama antara Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, BPK serta para ahli untuk menentukan formula perhitungan pembayaran AP.
 - c. Melakukan pemetaan proyek prioritas untuk memperoleh gambaran mengenai alokasi sumber pendanaan, untuk mencapai kapasitas fiskal yang optimal.
- 2) Perlunya sebuah payung hukum yang mengakomodir pelaksanaan KPBU Sektor Sumber Daya Air serta pelaksanaan operasi dan pemeliharaan pada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
- 3) Perlunya pedoman/ tata cara perencanaan dan pengusulan KPBU yang dilengkapi dengan rules of thumb sehingga memudahkan pelaksanaan perencanaan KPBU.
- 4) Melakukan kolaborasi riset dengan akademisi terkait skema pembiayaan alternatif, khususnya KPBU, pada proyek sejenis yang telah selesai sampai tahap operasi di negara lain, sehingga dapat dirumuskan skema pembiayaan yang kreatif dan inovatif dengan tetap memperhatikan aspek kelembagaan Indonesia.
- 5) Menjalinkan koordinasi yang intensif dan sinergis antar Kementerian/Lembaga dan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek KPBU sektor Sumber Daya Air.

